



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 November 2019
Pukul	: 10.00 s.d Selesai WIB.
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV) Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Per-Oktober Tahun 2019; 3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020; dan 4. Isu-Isu Aktual.
Anggota yang Hadir	: 46 Anggota dari 52 Anggota

FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. SUDIN, S.E.
2. SUNARNA, S.E., M.Hum.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. ONO SURONO, S.T.
5. Ir. MINDO SIANIPAR
6. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
7. VITA ERVINA, S.E.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. H. DEDI MULYADI, S.H.
2. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.H.
3. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
4. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.
5. Ir. ICHSAN FIRDAUS
6. BUDHY SETIAWAN
7. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
8. ALIEN MUS

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
2. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
3. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
4. Ir. SUMAIL ABDULLAH
5. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. H. SULAEMAN L. HAMZAH
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
4. YESSY MELANIA, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.

3. LULUK NURHAMIDAH, M.Si.
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
5. EDWARD TANNUR, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Dr. SUHARDI DUKA, M.M.
2. Drs. GUNTUR SASONO, M.Si.
3. HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
4. MUSLIM, S.H.I, M.M.
5. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.
6. BAMBANG PURWANTO, SST, M.H.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

1. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.
2. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
3. drh. SLAMET
4. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Yang IZIN

- :** **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
 2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
EMA UMIYYATUL CHUSNAH**

1. H. YADI SRIMULYADI
2. Hj. SRI WULAN, S.E.
3. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
4. FACHRY PAHLEVI KANGGOASA, S.E.
5. SLAMET ARIYADI
6. K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL
AFFANDY, S.Sy.

Undangan

- :** **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDY PRABOWO) beserta jajaran.**

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajarannya.

Yang terhormat Direktur Utama Perum Perikanan Republik Indonesia beserta jajarannya.

Yang terhormat Direktur Utama PT Garam.

Yang terhormat Direktur Utama Perikanan Nusantara.

Hadirin yang saya hormati,

mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala* Tuhan Yang Maha karena berkat rahmatnya dan hidayahnya kami dapat mengadakan Rapat Kerja ini dengan keadaan sehat *wal afiat*.

Sesuai dengan acara jadwal rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan I tahun 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 13 Oktober 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 31 Oktober 2019 pada hari ini: Rabu, tanggal 20 November 2019 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2019, evaluasi pelaksanaan anggaran per Oktober tahun anggaran 2019, rencana kerja dan program kegiatan tahun 2020 serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak Ibu yang saya hormati,

menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV saat ini Rapat Kerja Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 30 anggota, terdiri dari 9 Fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 246 dan pasal 251 ayat 1 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30)

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat dan akan diakhiri pada pukul 14.30. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai pasal 226 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar rapat
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2019, evaluasi pelaksanaan anggaran per Oktober tahun anggaran 2019, rencana kerja dan program kegiatan 2020 serta isu-isu lainnya;
3. Jawaban Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Pak Menteri waktu itu kami minta jawaban tertulis dan dijawab langsung nanti oleh masing-masing Eselon I supaya terjadi interaktif dan mendapatkan solusi terbaik;
4. Tanggapan anggota Komisi IV;
5. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
6. Kesimpulan rapat;
7. Penutup.
Apakah susunan acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Nampaknya anggota Komisi IV baru pada bangun *nih*, tadi pada *ngantuk*. Coba bikin sekretariat bikin kopi dulu.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menghadirkan terobosan, kebijakan, program dan kegiatan sejalan dengan kebutuhan rakyat. Hal ini sebagaimana kesimpulan Rapat Kerja tanggal 6 November 2019 antara lain:

1. memprioritaskan program bantuan Pemerintah;
2. infrastruktur
3. peningkatan sumber daya manusia

4. optimalisasi budidaya dan penangkapan, perizinan, pengawasan, pemberdayaan, dan perlindungan serta peningkatan hasil produksi perikanan dan keamanan yang bernilai tambah dan berdaya saing

Untuk itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin meminta penjelasan terkait dengan rencana kerja program dan kegiatan tahun anggaran 2020 sebesar 6,44 triliun. Dan juga ingin meminta kejelasan terhadap realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 4,32 triliun atau 78,61% dari pagu APBN tahun 2019 yang sebesar 5,48 triliun. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang sudah meningkat penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaran.

Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik meminta penjelasan langkah tindak lanjut hasil temuan BPK semester I tahun 2019 mengenai sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti: ditemukan pemborosan pekerjaan jasa profesional *converence organization* untuk kegiatan OOC di Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri sebesar 151.448.000 kedua, ditemukannya ketidaksesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2017 dengan pembayaran tunjangan kerja penyuluh perikanan tahun 2018 di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan sebesar Rp. 900.649.000. Ketiga, ditemukannya ketidaksesuaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan pekerjaan *Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Institute* di BRSDMKP dimana ada denda keterlambatan minimal Rp. 1.271.411.532. Untuk itu Komisi IV akan melakukan pendalaman pada RDP yang akan datang.

Selain itu Komisi IV juga meminta penjelasan terkait isu-isu penting terkini antara lain:

1. adanya hambatan program sentra kelautan dan perikanan terpadu di beberapa pulau terluar sehingga pembangunannya dinilai sangat lambat hingga saat ini.
2. adanya ketidakmaksimalan program *Integrated Cold Storage* di beberapa daerah hingga terindikasi tidak jalan alias mangkrak.
3. adanya perlakuan dari oknum perusahaan kapal, dalam negeri maupun luar negeri terhadap perjanjian upah dan fasilitas terhadap awak kapal atau ABK sehingga diduga melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, perlu kebijakan khusus pendampingan dan penjaminan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka upaya perlindungan awak kapal atau ABK.

4. adanya hambatan perizinan kapal dimana pelaku usaha sudah membayar. Pak Menteri, sudah membayar retribusi atau pungutan hasil perikanan (PHP) selama satu tahun. Namun izinnya belum keluar. Jadi nanti ke menterinya kan diganti kalau sudah bayar PHP tidak keluar juga nanti diganti Kementerian KKP dan PHP.
5. Adanya hambatan izin pemanfaatan dan peredaran koral dari Menteri sebelumnya sehingga iklim usaha sektor kelautan perikanan stagnan atau mati suri sedangkan domain pengelolaan pengaturan koral, karang, dan ikan hias di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan pendalaman pada RDP yang akan datang
6. Adanya tumpang tindih kewenangan tugas, fungsi, Satgas 115 dengan Dirjen PSDKP sehingga *output* yang dihasilkan tidak berbeda terlebih lagi sebagaimana amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan secara birokrasi struktur penugasannya.
7. terkait alokasi anggaran seharusnya dana sebesar Rp 4.000.000.000 tidak melekat di PSDKP namun dapat berdiri sendiri di luar KKP. Untuk itu ke depan, Komisi IV akan melakukan pendalaman pada RDP yang akan datang.

Saudara Menteri dan anggota Komisi VI yang saya hormati

Demikian pengantar ini kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas dan dilanjutkan dengan jawaban para pejabat Eselon I atas pertanyaan Komisi IV pada Rapat Kerja yang lalu. Pak Menteri silakan. Jadi Pak Menterinya saat ini jabatannya 2, di absen ini masih ada namanya Edhy Prabowo, anggota Komisi IV. Satu sisi masih juga menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kita tepuk tangan dulu. Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua yang baik dan bijaksana
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu

Namo Buddhaya
Salam kebajikan.

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi
Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI.
Para pejabat Eselon I.**

Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Ada juga para Direktur Utama yang dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perindo, Perinus, dan PT Garam.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja yang pertama antara Kementerian, mohon maaf yang kedua, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI membahas evaluasi hasil pemeriksaan BPK semester pertama tahun 2019, evaluasi anggaran per Oktober 2019, rencana kerja program dan kegiatan tahun anggaran 2020 dan isu-isu aktual.

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV yang kami hormati.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2019 BPK RI terdapat 20 temuan yang terdiri dari 12 temuan dalam Kelompok Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 8 temuan dalam kelompok kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan telah ditindaklanjuti sampai dengan 31 Oktober 2019 sebagai berikut, temuan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI)

1. Untuk memperbaiki tertibnya pengelolaan PNBPN, MKP telah menginstruksikan kepada 5 Eselon I tersebut untuk menyelenggarakan sistem dan prosedur pengendalian pengelolaan PNBPN yang memadai. Saat ini sedang disusun pedoman dan SOP pengendalian dan penatausahaan PNBPN, perbaikan sistem dan prosedur pengendalian dalam penyelenggaraan penugasan izin lokasi reklamasi, perbaikan kebijakan akuntansi terkait penerimaan biaya pendidikan.
2. Memperbaiki tertibnya pengelolaan anggaran belanja yang dalam barang dan belanja modal, MKP telah memberikan sanksi teguran kepada KPA, PPK, dan Bendahara, pengeluaran untuk lebih optimal dalam proses perencanaan anggaran. Pengendalian atas realisasi belanja sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

3. Memperbaiki tertibnya penatausahaan kas di bendara pengeluaran dan bendahara penerimaan, MKP telah menginstruksikan kepada KPA di masing-masing Eselon I untuk memberikan sanksi kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang kurang cermat dalam menjalankan tugasnya dan melakukan pengamanan kas yang berada dalam penugasan/penguasaannya.
4. Untuk memperbaiki tertibnya piutang bukan pajak di PPN Kejawatan tersebut, MKP telah menginstruksikan kepada Dirjen Perikanan Tangkap agar melakukan perbaikan dalam pengelolaan administrasi penatausahaan piutang, selain itu telah dilakukan penagihan piutang melalui KPKNL Cirebon kepada PT Hoi supaya segera melunasi kewajibannya kepada negara dan telah dilakukan penyetoran sampai dengan saat ini sebesar 1,4 miliar oleh PT Hoi dari temuan 14,07 miliar.
5. Untuk memperbaiki tertibnya pengelolaan persediaan berupa biota atau ikan sejenisnya dan pakan ikan hasil produksi mandiri pada Dirjen Perikanan Budidaya dan BRSDM ini, MKP telah menginstruksikan kepada Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan agar melakukan perbaikan akuntansi persediaan yang memadai melalui penyusunan Standar Operasi Prosedur penghitungan persediaan biota ikan atau yang sejenisnya dan SOP pencatatan persediaan pakan ikan khususnya pakan yang diproduksi secara mandiri
6. Untuk memperbaiki tertib pelaporan transaksi persediaan kepada 16 Satker KKP tersebut, MKP telah memberikan sanksi kepada kuasa pengguna barang, Satker terkait yang sudah optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dan pencatatan persediaan dan pengawasan pelaksanaan stok *opname* persediaan serta pemberian sanksi dari Kepala Satker terkait kepada operator aplikasi persediaan dan penanggungjawab persediaan atas pengelolaan catatan persediaan;
7. Untuk memperbaiki tertib pengelolaan dan penatausahaan aset tetap di masing-masing unit Eselon I tersebut, MKP telah menginstruksikan kepada kuasa pengguna barang di masing-masing Eselon I agar melakukan perbaikan fungsi pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan BMN melalui penyelesaian hibah BMN yang berasal dari dana dan konsentrasi dan tugas perbantuan serta inventarisasi BMN;

8. Untuk memperbaiki tertib pengelolaan dan penatausahaan aset tak berwujud dan aset lain-lain pada BRSDM dan DJPB tersebut, MKP telah menginstruksikan kepada Kepala BRSDM agar melakukan penatausahaan paten dan hasil kajian penelitiannya melalui inventarisasi dan penilaian ATB berdasarkan dokumen perolehan paten dan hasil kajian penelitian serta memberikan sanksi kepada operator BMN yang kurang optimal menatausahaan paten dan hasil kajian atau penelitian. Dirjen Perikanan Budidaya agar segera mengusulkan penghapusan aset lain-lain dalam kondisi rusak berat;
9. Untuk memperbaiki tertib penyaluran dan pencairan dana bergulir oleh LPMUKP, MKP telah memberikan sanksi kepada Direktur LPMUKP untuk mengoptimalkan pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dengan *stakeholder* dan melakukan pengembangan dana kelolaan dan pendapatan pengelolaan kerja sama pendanaan dan pengolahan risiko. Selain itu telah disusun dan dilakukan perbaikan mekanisme kerja dalam proses pencairan pinjaman pada BLU-LPMUKP.
10. Untuk memperbaiki tertib pengelolaan dana bergulir oleh LPMUKP, MKP telah menginstruksikan kepada Direktur LPMUKP untuk menyusun sub sistem yang memadai dalam mendukung penyajian laporan keuangan serta rekonsiliasi dengan bank mitra secara berkala.

Temuan dalam kepatuhan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan:

1. Atas keterlambatan penyetoran PNBPN pada 7 Satker tersebut, MKP telah menginstruksikan kepada Kepala Satker terkait agar melakukan perbaikan dalam pengawasan pengelolaan PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pembayaran tunjangan kinerja penyuluh perikanan tahun 2018 pada Pusatluh (Pusat Penyuluh) yang tidak sesuai dengan PerMenKP 59/2017 tersebut, MKP telah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satminkal pada 5 wilayah BPPP Medan, BRPPUPP Palembang, BRP APP Maros, BPPP Banyuwangi dan BPPP Tegal yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembayaran tunjangan kerja penyuluh;
3. Atas pemborosan jasa profesional *converence organizer* kegiatan OOC tersebut, MKP telah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Setkjen KKP selaku KPA PBK Satker

- terkait dan panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia barang dan jasa
4. Atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dipungut tersebut, MKP telah memberikan sanksi kepada KPA, PBK, dan PPHP serta dilakukannya penyetoran ke kas negara sebesar Rp 574.238.503,94 atas kelebihan pembayaran dan sebesar Rp 117.401.603 atas denda keterlambatan. Adapun sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 127.099.617 Direktorat Perbenihan DJPB dan Direktorat Pengelolaan Bina Mutu, Dirjen PDSPKP dan sisa denda keterlambatan sebesar Rp 54.620.580 terus dilakukan penagihan kepada pihak rekanan;
 5. Atas pengadaan sewa pesawat yang tidak sesuai ketentuan tersebut, MKP telah memberikan sanksi kepada KPA dan PBK karena belum optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan serta kurang mempertimbangkan efisiensi belanja dan KKAK;
 6. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan PIAMARI dan MIAMARI tersebut, MKP telah memberikan sanksi kepada KPA dan PBK karena kurang optimalnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan kepada pihak rekanan karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang disepakati serta telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1.271.411.523,44 atas pekerjaan pembangunan pekerjaan PIAMARI dan MIAMARI;
 7. Untuk memperbaiki tertib pembayaran angsuran yang menggunakan tarif layanan pola syariah tersebut, MKP telah memberikan sanksi kepada Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha yang kurang optimal dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan pembiayaan pola Syariah. Kepala Sub Divisi Pengolahan Resiko yang sudah optimal melaksanakan pengolahan resiko, investasi, dan aset serta kurang memahami sistem tentang pembagian bagi hasil Syariah
 8. Untuk memperbaiki tertib penyetoran provisi dan pemotongan pajak atas rekening dana kelolaan PRPL 019 pada BNI tersebut, MKP telah menginstruksikan kepada Kepala LPMUKP agar berkoordinasi dengan BNI untuk segera mengembalikan pemotongan pajak ke rekening LPMUKP sebesar Rp 52.487.497, membuat dan menetapkan petunjuk bersama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir, memberikan sanksi kepada Kepala Sub Divisi Keuangan LPMUKP yang belum sepenuhnya memahami aturan terkait pengolahan rekening BLU.

Agenda kedua, Pimpinan adalah evaluasi penyelenggaraan anggaran APBN 2019.

Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait agenda pembahasan yang kedua, izinkan kami menyampaikan realisasi pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 18 November 2019 termasuk *outstanding* kontrak sebesar 4 triliun, 4,3 triliun atau 78,61% dari pagu total KKP sebesar 5,5 triliun dengan rincian realisasi sebagaimana tercantum dalam *slide* ini. Di sini kita lihat capaiannya memang belum optimal tapi dari angka ini kita optimis di atas 95 rata-rata Pak Ketua. Agenda ketiga, rencana kerja program dan kegiatan KKP tahun 2020.

Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Tema rencana kerja Pemerintah tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Dalam RKP tahun 2020 KKP terkait dengan 5 prioritas nasional yaitu yang pertama, prioritas nasional pertama yaitu: pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Prioritas nasional kedua yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah, prioritas nasional ketiga nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan, prioritas nasional keempat ketahanan, air, energi, dan lingkungan hidup, prioritas kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan.

Prioritas nasional tersebut dijabarkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas yang selanjutnya diterjemahkan dalam *output* RKA K/L KKP tahun 2020. Terkait dengan agenda prioritas KKP tahun 2020 sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan PDB perikanan 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam nasional 3 juta ton, nilai tukar nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg per kapita per tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD 6,17 miliar dan jumlah luas kawasan konservasi perairan laut seluas 23,4 juta hektar.

Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar 6,45 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar 6,28 triliun, BLU sebesar 58,23 miliar, dan PNBPN sebesar 112,14 miliar. Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 berdasarkan jenis biaya yaitu: biaya operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,95 triliun dan belanja barang Rp. 761,23 miliar sedangkan alokasi anggaran untuk biaya non operasional KKP sebesar 3,74 triliun. Adapun anggaran per unit kerja Eselon I yaitu:

- a. Dirjen Perikanan Tangkap sebesar 702,46 miliar
 - b. Dirjen Perikanan Budidaya sebesar 739,57 miliar
 - c. Dirjen Penguatan Daya Saing sebesar 366,02 miliar
 - d. Dirjen Pengolahan Ruang Laut sebesar 507,58 miliar
 - e. Dirjen Pengawasan SDKP sebesar 1,06 triliun
 - f. Badan Riset dan SDM KP sebesar 1,87 triliun
 - g. Badan Karantina Ikan sebesar 601,08 miliar
 - h. Inspektorat Jenderal sebesar 85,27 miliar
 - i. Sekretariat Jenderal sebesar 515,62 miliar
- Selanjutnya pagu alokasi anggaran,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri saya agak tergelitik juga, masa Inspektorat dananya cuma 85 miliar? Bagaimana inspektorat memeriksa ke daerah-daerah? Kira-kira cukup gak dalam setahun itu 85 miliar? Misalnya kalau Inspektorat mengirim timnya ke Ambon atau ke Papua, bolak balik saja 1 orang ongkos minimal 10 juta, pesawatnya *tok*, belum operasional, belum makan. Saya pikir cobalah nanti kita bahas kembali dinaikkan anggarannya. Karena yakin kalau dengan 85 miliar ini enggak bakal cukup. Jadi jangan sampai nanti Saudara Irjen kerjanya cuma 4 bulan, 8 bulannya gak jalan alasannya apa? Uangnya *kaga* cukup. Ya Pak Menteri ya? Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua. Saya merasa mendapat dukungan yang kuat karena secara prinsip ini alasan yang sama, 5 tahun yang lalu sudah kita utarakan di sini dan pada saat saya dilantik jadi Menteri hal pertama yang saya panggil adalah Irjen Pak Ketua. Saya bicara masalah anggaran pengawasan KKP yang menurut kami sangat kecil dan saya minta untuk penyesuaian dan saya sudah perintahkan Irjen untuk melakukan. Hanya saja sekarang ini kan anggaran sudah disahkan oleh Komisi IV tahun lalu dan kami butuh waktu untuk penyesuaian. Kami siap atas perintah Ketua dan kalau sudah Ketua mengarahkan begini, kami siap untuk melakukan penyesuaian, sudah tinggal pelaksanaannya saja Pak Ketua

Kedua, masalah anggaran ini kan sudah terbagi. Memang perintah Pak Presiden waktu itu kita untuk menyesuaikan namun karena penyesuaian anggaran pun akhirnya akan persetujuan Komisi IV. Kami akhirnya memutuskan belum melakukan pembagian atau pergeseran sampai akhirnya

karena ini kan orang baru jadi harus tahu dulu *detail* nya baru setelah itu kami akan mengarahkan untuk perbaikan. Begitu juga selanjutnya ke depan Pak Ketua, manakala Pak Ketua menambah anggaran KKP menjadi lebih besar dari sekarang kami pun akan minta Irjen, anggaran Irjenpun akan secara proporsional bertambah Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua atas dukungannya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri, saran saya masih ada waktu untuk realokasi. Misal sudah ada dari 85 ya nanti realokasi yang lain dipindahkan 20 miliar jadikan 105 miliar lah. Gak layak lah Pak Menteri kalau terlalu kecil. Ini saran saya, ya Pak Menteri. Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik Pak Ketua.

Kami minta nanti waktu khusus untuk rapat, Raker sekali lagi khusus pemindahan alokasi anggaran antar Dirjen, mohon waktunya. Tapi kalau sekarang saya yakin Irjen belum siap poin-poinnya. Kita juga akan minta mana-mana yang akan digeser ke Dirjen yang lainnya. Secara prinsip Pak Ketua kami merasa punya kekuatan baru karena didukung Pak Ketua dan teman-teman Komisi IV.

Selanjutnya kami lanjut Pak Ketua. Selanjutnya pagu anggaran alokasi KKP tersebut akan digunakan untuk rencana kegiatan prioritas antara lain:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap diperuntukkan antara lain untuk membantu bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, rehabilitasi pelabuhan perikanan, syah bandar, syah bandar perikanan, sertifikasi alat kapal, partisipasi RFMO, dan operasional SKPT di 4 lokasi

Pak ketua ada hal lain yang memang selama 25 hari ini saya temukan, salah satu kesulitan dalam perizinan yang kita lakukan adalah bahwa nanti teknis, kami sekarang sedang garap peraturan-peraturan yang sudah ada. Tapi ada satu yang kita temukan di lapangan adalah kekurangan tenaga kerja, kekurangan orang yang melayaninya. Kemarin kami temukan di beberapa TV, di Batam maupun di Bangka Belitung dan seluruh Jawa apa DKI kemarin itu izin ini terlambat salah satu Pak Ketua, pelayannya sangat terbatas.

Jadi ada dua langkah yang kami lakukan. Yang pertama kami akan mencari tambahan tenaga kerja apakah itu kita akan mencari kontrak. Yang kedua, kami akan menambah jam kerja Pak Ketua. Jam kerjanya mungkin 24 jam karena prinsipnya mereka ini kan nelayan ini kan kerja 24 jam juga. Ikannya kan gak tahu datangnya kapan sehingga kita kan ini masih kami kaji karena konsekuensinya ujungnya nanti dari anggaran Pak Ketua.

Saya mohon izin Pak Ketua dan teman-teman Komisi, Bapak Ibu anggota Komisi IV yang terhormat mungkin ada penyesuaian alokasi terhadap anggaran ini untuk menguatkan, membuka izin itu 24 jam atau menambah gerai-gerai baru untuk mendatangi para nelayan bahwa nanti ada aturan yang terselip, aturan yang kepanjangan umumnya melakukan izin itu sampai 14 hari Pak Ketua walaupun Pak Ketua tadi menyampaikan lebih dari setahun ada yang dua tahun, yang belum sampai sekarang keluar sudah dibayar PHP kami sudah tangkap itu semua Pak Ketua. Sekarang kami dengan perhubungan juga Kamis besok Dirjen Tangkap saya minta untuk berkomunikasi dan sudah terjadi komunikasi, besok tinggal rapat teknis. Saya harapkan antara Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini satu suara dan memang sudah ditunjukkan oleh Menteri Perhubungan melakukan satu suara tinggal begitu ketika keluar izin yang 14 hari ini bagaimana kita bisa efisien sampai secepatnya kalau bisa satu hari selesai. Walaupun saya belum tahu, belum bisa pastikan berapa hari kami minta teknis.

Yang kedua Pak Ketua, selain Menteri Perhubungan juga ada Menteri Tenaga Kerja. Sama Ibu Menteri Tenaga Kerja kami juga sudah sering ketemu untuk menyampaikan bahwa, baru informal tapi teknisnya mungkin secara prinsip tidak masalah tentang izin-izin awak kapal yang ada di kapal harus atas izin Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Secara prinsip ini oke tinggal nanti tinggal pelaksanaan Pak Ketua. Mohon waktunya untuk segera kita realisasikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri, pendapat saya tidak perlu kerja sampai 24 jam yang penting niat baik, niat baik pejabatnya untuk mengerjakan hal tersebut. Ya mau 24, jangan 24 jam, 1 hari 48 jam kalau pejabatnya gak benar gak mau tanggung jawab, gak punya malu terhadap jabatan. Ya kita bicara jujur, kenapa Pak Menteri, ya sudah Sabtu Minggu diadakan piket untuk menerima orang yang akan *apply* izin. Dimulai lagi hari Senin lagi. Itu saya rasa lebih elok. Yang penting pejabatnya punya rasa malu dan punya rasa tanggung

jawab bahwa sebagai pejabat harus bertanggung jawab. Ya Pak Menteri? Terima kasih lanjutkan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua. Saya harus banyak belajar tanggung jawab dari Pak Ketua Sudin.

2. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya diperuntukkan antara lain untuk bantuan benih, bibit rumput laut, ekskavator, bioflok, mina padi, pakan mandiri, *cluster* percontohan kawasan budidaya, dan operasional SKPT di 3 lokasi. Ini perikanan 3 lokasi karena setiap SKPT ini punya penanggungjawab masing-masing Dirjen. Ada yang 3 ada 4 Pak Ketua;
3. program pengelolaan ruang laut diperuntukkan antara lain untuk: pugar, wisata bahari, pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan operasional SKPT di 4 lokasi;
4. program penguatan daya saing produksi Kelautan dan Perikanan diperuntukkan antara lain untuk: *cold storage*, pasar ikan dan sentra kuliner, gemar ikan, serta operasional SKPT di 2 lokasi;
5. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperuntukkan antara lain untuk: operasional kapal pengawas, dan penguatan pemberantasan IUU *fishing*;
6. program riset dan sumber daya manusia kelautan perikanan diperuntukkan antara lain untuk: pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, sertifikasi kompetensi, operasional tenaga penyuluh perikanan, kajian stok sumber daya ikan dan perairan umum daratan, inovasi teknologi adaptif, dan sarana prasarana riset;
7. program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan diperuntukkan antara lain untuk: penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, operasional pengawasan ekspor impor dan domestik, operasional pengawasan mutu, serta sarana prasarana pelayanan;
8. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP diperuntukkan antara lain untuk: pengawasan internal mitra inspektorat I sampai V, dan sinergi pengawasan dengan pihak eksternal;
9. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diperuntukkan antara lain untuk: penyiapan produk hukum dan penataan organisasi, pengelolaan SDM aparatur, perencanaan

pengelolaan administrasi dan PBJ, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistik dan informasi serta operasional BLU.

Agenda keempat yaitu isu-isu aktual.

Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait isu dengan isu-isu aktual yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan capaian dan pembangunan dalam pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2019 antara lain:

1. Laju pertumbuhan PDB perikanan triwulan ketiga tahun 2019 sebesar 5,85% atau mengalami kenaikan sebesar 42,20% jika dibandingkan triwulan ketiga tahun 2018.
2. Total produksi perikanan sebesar 18,56 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,57 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 12,99 juta ton.
3. Volume ekspor hasil perikanan Januari sampai September 2019 sebesar 823 ribu ton. Periode Januari sampai September tahun 2015, September tahun 2015 sampai 2019 volume ekspor mengalami pertumbuhan per tahun 1,75%. Untuk nilai ekspor hasil perikanan Januari sampai September 2019 sebesar USD 3,48 miliar. Periode Januari sampai September 2015-2019 nilai ekspor mengalami pertumbuhan per tahun 4,72%.
4. Nilai tukar nelayan mencapai 114,28 dan nilai tukar usaha nelayan mencapai 128,69. Nilai tukar pembudidaya ikan mencapai 102,46 dan nilai tukar usaha pembudidaya ikan mencapai 115,73.

Selanjutnya sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kerja tanggal 6 November 2019 kami memberikan kesempatan kepada masing-masing Eselon atas izin Ketua, Eselon I KKP sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi IV DPR RI. Namun demikian sebelum para Eselon I menyampaikan tanggapannya izinkan saya menyampaikan bahwa hal yang terkait kebijakan saat ini KKP sedang melakukan serial pertemuan dan seluruh *stakeholder* tidak hanya dengan nelayan atau pembudidaya tetapi juga mendengar masukan dari para asosiasi, pelaku usaha, kementerian lain, dan perguruan tinggi. Kami akan mencapai solusi yang terbaik sesuai dengan arahan Pak Presiden dan tentunya arahan Pimpinan Komisi IV dan para anggota Komisi IV yang kami hormati.

Mohon izin kami akan meminta Saudara Sekjen untuk memoderatori penyampaian tanggapan Eselon I atas pertanyaan Bapak/Ibu Komisi IV pada Raker tanggal 6 November 2019. Atas izin Ketua, izinkan kami untuk menyerahkan ke Sekjen.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya silakan, kami persilakan.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih.

Ibu Bapak sekalian yang saya hormati.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan. Silakan duduk Bapak Ono, dengan tertib. Pimpinan, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya belum jawab belum mempersilakan. Ini mau *nanya* apa mau interupsi?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Eenggak, gak *nanya*.

F- PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Permintaan kita sesuai kesepakatan kita pada setiap mitra kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya, singkat ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Singkat padat.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Karena kalau enggak nanti sampai jam 10 malam lagi nanti.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Siap Ketua.

Pak Menteri kita rapat dengan mitra kita baik dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan tentunya kita dari fungsi pengawasan kita, kita butuh tahu program detail dari kementerian yang Bapak pimpin. Dengan hormat tentunya kami meminta, walaupun kita tidak punya kewenangan untuk membahas Satuan Tiga. Tapi dengan hormat Pimpinan, kita meminta Satuan Tiga. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin harusnya Anda pagi-pagi datang tanya ke saya. 3 hari lalu Pak Menteri sudah menyerahkan ke kita cuman dalam bentuk *softcopy* lagi dicetak. Kalau tanya saya kan gak perlu interupsi. Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Atas izin Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 6 November yang lalu dan kami pun juga telah menyampaikan secara kolektif seluruh jawaban atas pertanyaan pada Rapat Kerja tanggal 6 November yang lalu, beberapa yang lalu.

Selanjutnya Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Ibu Bapak anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Izinkan Bapak Ketua pada kesempatan yang sangat baik ini. Sesuai dengan arahan dan kesimpulan dari Raker sebelumnya, pada kesempatan hari ini kami akan mencoba memfasilitasi semua pertanyaan terkait dengan jawaban yang akan diberikan oleh masing-masing Eselon I.

Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Setelah kami menyampaikan penjelasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariat jenderal, berikutnya kami minta izin Bapak Menteri dan Bapak Ketua agar supaya kawan-kawan masing-masing Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dirjen Pengolahan Ruang Laut, kemudian Dirjen Penguatan Daya Saing sekaligus

sebagai pelaksana tugas Dirjen PSDKP, dan akan dilanjutkan oleh Kepala BKIPM, Kepala BRSDM, dan Pak Irjen.

Untuk itu Bapak Ketua terkait dengan pertanyaan di lingkup Sekretariat Jenderal kami mencatat ada 3 pertanyaan berturut-turut sebagai berikut, kami akan memberikan penjelasan. Pertanyaan pertama disampaikan oleh yang terhormat Bapak Darori Wonodipuro terkait perlunya peningkatan eselonisasi petugas di lapangan. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan yang terhormat Bapak Darori terkait dengan peningkatan eselonisasi KKP di daerah. Kami menyadari hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan adanya peningkatan eselonisasi kawan-kawan unit pelaksana teknis yang di daerah. Untuk itu KKP saat ini telah menyiapkan naskah akademik perkembangan UPT KKP di daerah dan telah mengusulkan kepada Kementerian PANRB tentang penataan organisasi UPT KKP di daerah agar mendapat peningkatan kelas dari eselonisasi yang ada saat ini. Sebagai contoh: peningkatan status UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari Eselon IV ke Eselon III sehingga hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat daerah sehingga pengawasan SDKP dapat lebih optimal.

Yang kedua, yang terhormat Bapak Sulaeman Hamzah. Kami juga berterima kasih bahwa Bapak telah mendorong kepada kami seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan yang saat ini telah kami miliki. Tentu untuk hal ini, kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan sependapat dengan saran Sulaeman Hamzah agar kami dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sekjen kalau bisa tolong jangan terlalu panjang jawabannya. Kalau enggak nanti sampai jam 10 malam ini.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Oke, terima kasih. Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Gapapa? Oh ya silakan kalau gapapa.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik terima kasih. Pak Sulaeman Hamzah kami menyambut baik dan kami akan tindaklanjut untuk hal ini. Kemudian yang ketiga, ada dua pertanyaan masing-masing disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi IV, Pak Sudin serta Bapak Muslim terkait dengan jabatan kosong agar segera diisi. Bapak Ketua dan Pak Muslim kami berterima kasih banyak atas perhatian yang diberikan untuk hal ini dan kami perlu melaporkan bahwa khusus untuk pengisian jabatan kosong.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua, sebentar saja Pak Ketua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Interupsi ? Ya silakan Pak

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini Pak Ketua, ini kan bahan sudah tertulis, kalau dibacakan memang kaya kita sedang disertai saja nih. Kasih saja anggota kesempatan waktu membaca jadi kita lanjut saja membahas anggaran berikutnya supaya lebih efektif dan buat Pak Ketua. *Assalamualaikum*.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Hermanto waktu itu ada kesepakatan seluruh anggota Komisi IV kalau hanya di dalam tulisan, tidak ada interaksi. Kalau ada yang kurang jelas, *nanyanya* ke siapa? Maka saya bikin atas keputusan bersama dijawab tertulis dan dijelaskan. Ya kan? Maka Pak Hermanto kalau datang, duduk dari pagi sampai jam 10 malam, baru jelas. Ya? Maka tadi saya bilang minta sama Pak Sekjen, jawabannya singkat dan jelas. Jadi kalau ada anggota yang belum jelas, langsung bertanya. Ya Pak Hermanto ya?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya sarankan untuk singkat dan padat saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi saya sudah bilang Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jangan ini mau dibacakan semua, bisa sampai jam 1 malam kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak yakinlah, sesuai dengan nama saya Pak, nah namanya juga singkat Pak. Pak Sekjen tadi sudah saya sarankan singkat dan jelas. Kalau ada anggota merasa pertanyaannya belum jelas langsung bertanya. Ya Pak Sekjen? Lanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Siap. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya minta jangan ada interupsi dulu sampai jelas semuanya. Kalau nanti mau bertanya, bertanya lagi silakan.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih Pak Hermanto.

Terkait dengan pengisian jabatan kosong saat ini kami sedang bekerja untuk mengisi 151 posisi jabatan di level Eselon II, III, IV, dan V. Yang pertama kami laporkan untuk Eselon II *alhamdulillah* Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa melakukan pemilihan secara langsung tanpa menggunakan seleksi terbuka lagi. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ketua dan Ibu Bapak sekalian, posisi Eselon II di KKP dapat segera terisi. Sementara untuk Eselon III, IV, dan V sudah sedang dalam proses namun demikian kami masih menunggu arahan terbitnya petunjuk teknis dari KemPANRB menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan penghapusan Eselon III dan IV.

Bapak Ibu sekalian,

insyallah proses ini akan segera kita selesaikan dalam waktu dekat. Demikian Pak Ketua dan Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Apabila kami boleh lanjut maka mohon berkenan Pak Zulfikar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Interupsi Pimpinan. Sebelum dilanjut ke Direktorat yang lain. Saya ada satu pertanyaan menggelitik lah terkait dengan kekosongan ASN. Beliau sudah menatap saya tandanya setuju Pak. Jadi selama 5 tahun saya bergaul dengan Pak Sudin itu tanda-tandanya. Tapi kalau tidak menatap saya berarti tidak diizinkan. Betul ya Pak Menteri ya? Seperti itu kan? Izin dulu Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya silakan Pak Ono, silakan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Jadi dalam rangka proses pengisian ini kan dengan mekanisme yang lebih mudah ya kan? Tidak seperti yang sebelumnya. Nah cuma mungkin dari kemarin kan teman-teman juga ya patut curiga, patut curiga dan ini tidak harus terjadi lagi ke depan. Sebenarnya terkait dengan kekosongan 150 sekian itu apa sih? Apa yang mendasari itu? Pak Sekjen kan yang mempunyai kewenangan juga disitu. Jadi tolong diberikan info dulu Pak, kira-kira apa kemarin yang terjadi? Terima kasih Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, masalah ini Ketua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Diizinkan Pak Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya. 1 menit.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Makasih.

Pertama ini mungkin berkaitan masalah pengisian ya Pak Sekjen, Pak Menteri. Sebenarnya pertama saya setuju tadi bahwa pengisian jabatan ini dari internal jangan lagi melibatkan dari luar. Itu yang pertama ya, karena itu

pasti lebih paham masalah yang di dalam. Yang kedua, sebenarnya Bapak ini kan punya apa namanya, pejabat di daerah ya seluruh Indonesia. Kasih kesempatan mereka juga untuk berkompetisi untuk mengisi jabatan yang ada di pusat. Jadi supaya ada semacam apa namanya *reward and punishment* gitu. Itu saja Pak Ketua, 2 saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Andi kalau dari internal sendiri kalo gak bermutu dan gak punya bertanggung jawab untuk apa? Ya kan?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Yang jawab KKP saja Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan masalah KKP, usulan Pak Andi tadi, saya menegaskan. Jadi itu adalah domainnya Pak Menteri. Kalau Pak Menteri mau sukses ya pilihlah pejabat yang bertanggung jawab. Kalau Pak Menterinya ya mau cuman 2 tahun ya silakan. Lanjutkan.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik terima kasih Pak Ketua, Pak Ono, Pak Andi Akmal

Terkait dengan pertanyaan tentang 151 jabatan yang kosong selama ini perlu kami sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa rencana pengisian 151 jabatan kosong ini sebetulnya dikaitkan dengan rencana untuk melakukan efisiensi kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat itu sedang direncanakan. Namun demikian Ibu Bapak sekalian secara institusional Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan semua unit kerja Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan kita terus melaksanakan pengembangan *assessment center* yang diwajibkan dimiliki oleh semua instansi Pemerintah.

Ibu Bapak sekalian yang saya hormati.

Terkait dengan sekaligus melanjutkan jawaban saya kepada Pak Ono dan kepada Pak Andi Akmal, perlu kami laporkan Ibu Bapak sekalian bahwa KKP saat ini telah dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memiliki *talent pool management* yang cukup baik sehingga kita diberi penghargaan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama harus menggunakan seleksi terbuka. Namun untuk Kementerian Kelautan

dan Perikanan untuk pengisian JPT Pratama setingkat Eselon II Direktur atau Kepala Pusat kami boleh langsung menggunakan data *talent* yang kami miliki.

Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian.

Menjawab Pak Andi Akmal, Bapak betul bahwa 100% pegawai ASN, ASN KKP pusat dan daerah telah mengikuti *assessment*. Posisi kami dari hasil penilaian dari 9 matriks yang ada, ada 21% dari total ASN kita berada di matriks A. Target kami untuk pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami mempergunakan kandidat ASN yang telah mengikuti penilaian dan mendapatkan hasil hanya yang berada di matriks 1,2,3 dan 4 saja yang masuk ke dalam seleksi berikutnya.

Perlu kami laporkan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dengan adanya *talent pool management* maka kita menetapkan *passing grade*, nilai minimal JPM (*Job Person Match*) berdasarkan hasil *assessment* berlapis-lapis, kita memiliki angka 72 sehingga pada akhirnya Ibu Bapak sekalian, yang pertama yang bersangkutan masuk di dalam kelompok matriks 1,2,3 dan 4, yang kedua memiliki *passing grade* yang angkanya di atas 72. Artinya sekaligus menjawab Pak Andi Akmal bahwa kawan-kawan dari daerah pun juga tersaring, tersedot semuanya ke pusat pada saat melakukan rencana pengisian jabatan kosong ditingkat Eselon II maupun III. Demikian Pak Ono, Pak Andi Akmal, Pak Ketua, dan Ibu Bapak sekalian yang dapat kami laporkan, mudah-mudahan ke depan kami pun juga..

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pak Pimpinan. Saya rasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Jadi apa alasannya kemarin sampai kosong sekian banyak itu? Dan disisi lain banyak juga pejabat yang *nonjok*. Tolong dijawab.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ono.

Apa yang kami sampaikan tadi Pak Ono, Ibu Bapak sekalian, bahwa Pimpinan pada saat itu menginginkan, kita mengetahui Bapak bahwa dari 10 unit kerja Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan kita bisa *downsizing*, *me-rightsizing*, menghemat seluruhnya menjadi 9 unit kerja Eselon I pada programnya berikutnya memang direncanakan memang akan berkurang lagi satu atau dua unit kerja Eselon I. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian pada saatnya nanti akan dieksekusi sementara kawan-kawan di

Eselon II sudah terisi, III terisi, IV terisi, maka akan menimbulkan kesulitan yang berikutnya sehingga Pak Ono dan Ibu Bapak sekalian, mohon izin apa yang terjadi sampai dengan hari ini Eselon III, IV nya tentu ini adalah merupakan bagian dari Eselon II yang di atasnya. Demikian Pak Ono, mudah-mudahan penjelasan ini cukup, sehingga kita mohon izin untuk bisa mengklarifikasi apabila dibutuhkan pada saatnya nanti. Terima kasih Pak Ketua

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan.

Saya rasa Pak Nilanto ini masih takut ini pada Menteri yang lama ini. Jadi menurut saya ini kenapa saya tanyakan, Pak Menteri adalah sahabat saya, saya tidak mau sahabat saya menemukan kendala di kemudian hari sehingga harus tahu betul apa yang terjadi di dalam. Bukan rahasia umum lagi bahwa yang kemarin, yang tidak sesuai instruksi perintah Pimpinan, dicopot, diganti. Ini semua juga tahu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mas Ono, jangan terlalu panjang, Pak Menteri akan menjelaskan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Siap Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, izin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sebentar, saya belum selesai. Pak Darori saya dulu *dong* jangan dipotong dulu. Saya sedikit saja. Jadi, sehingga Pak Menteri harus tahu betul dan apalagi dengan mekanisme yang lebih mudah. Jangan sampai memilih orang berdasarkan suka dan tidak suka. Berdasarkan profesionalitas, kapasitasnya yang tepat. Dan inilah menjadi kunci KKP selain berkaitan dengan rakyat, internal dibenahi dulu Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Pak kasih Pak Menteri dulu, Pak Kanjeng tunggu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya hanya sedikit saja menekankan Pak.

Jadi begini teman-teman dari KKP, kita terbuka *sajalah*. Saya sudah *survey* ke Eselon II, Eselon III Pak Menteri, semua itu yang berkuasa 1 orang menteri. Eselon III pun yang menentukan menteri. Jadi Pak Sekjen gak usah nutupin betul itu. Mestinya Eselon I tuh Menteri yang milih, kalau Eselon II, Eselon I yang milih, Eselon III Sekdir-Sekdir. Ini enggak, mekanisme di KKP gak dipakai gitu. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke Pak Menteri, kalau ada yang mau dijelaskan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik terima kasih Pak Menteri, eh Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Itu kalau gak gini gak ketawa nanti. Harus ada sedikit *relax*. Jadi saya menawarkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ketua dan Pimpinan yang lain dan para Bapak Ibu anggota yang saya hormati.

Kita tahu 5 tahun kita pernah sama-sama dan dulu bagaimana kita dengan Kementerian ini begitu serius menanggapi. Kami tahu mungkin ada hal-hal yang mengganjal dan mohon izin, Pak Ono. Terima kasih atas dukungan moral, Pak Darori, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini kita waktunya untuk melupakan yang lalu walaupun sebagai catatan-catatan mohon izin ke depan menjadi tanggung jawab saya. Jadi yang sudah terjadi, sebagai misal jumlah orang yang belum terisi kami, biarlah kami perbaiki untuk ke depan Pak Ketua. Jadi kami gak mau bermaksud mempermasalahkan atau menyalahkan karena sudah terjadi. Jadi kami mohon izin untuk forum yang terhormat ini hal-hal yang sudah lama mungkin perlu menjadi catatan dan tidak bisa dihilangkan. Tapi untuk lebih enak saya mohon izin yang gini-gini Pak Menteri biar jadi tanggung jawab saya Pak Ketua. Jadi apa yang kurang sekarang akan kami perbaiki. Kami sudah

komitmen hal-hal yang terganjal akan kita bongkar ganjalannya. Yang terbuntu akan kita buka. Hal-hal komunikasi yang belum. Intinya sebenarnya Pak Ketua itu dikomunikasi.

Banyak hal yang kita temukan selama 25 hari yang kami temukan intinya ada di komunikasi yang terputus. Semua *stakeholder* yang saya temukan berkomunikasi paling sulit termasuk duta besar, duta besar beberapa negara yang merasa lebih dari 2 tahun setengah tidak diberi waktu untuk ketemu. Nah ini kami gak bermaksud untuk menyalahkan, pasti ada alasan bagi kebijakan yang lama. Tapi kami mohon kalau bisa kebijakan-kebijakan yang salah itu atau merasa kurang nyaman bagi teman-teman kita abaikan kita fokus ke depan. Tapi saya terus terang, kami ke depan kami minta tetapi dukungan yang selalu terbuka dan saya sebagai Menteri yang diberi mandat oleh Presiden tentunya atas teman-teman Komisi IV kami akan berkomitmen untuk meluruskan yang selama ini belum lurus. Jadi Pak Ono, terima kasih dukungannya sudah sampai saat ini.

Pak Ketua, tentang siapa-siapa yang memang akan diusulkan oleh teman-teman sini kami juga terbuka. Bahwa *assessment* penting, *assessment* adalah alat kontrol. Tapi ada sebelum *assessment* ada prioritas karena kami, mungkin juga para Dirjen ini tidak mengenal lebih *detail* karena juga ada Dirjen yang tidak asli datang dari sini. Ada yang dari luar, apalagi saya. Jadi saya yakin teman-teman Komisi IV ada yang sudah lebih dari 2, 3 periode di sini itu juga punya masukan-masukan dan kami akan terbuka dengan masukan itu. Jadi Pak Ketua, mohon izin yang lama-lama kalau bisa kita tutup kita berpikir ke depan positif tanpa membatasi untuk mengkritik saya sebagai Menteri yang sekarang. Terima kasih

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ketua, jadi saya tidak setuju kalau yang lama ditutup karena kalau PDI Perjuangan punya istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggal Pak. nah sehingga tetap saja. Termasuk misalnya evaluasi terkait dengan misalnya pelaksanaan APBN 2019. Yang mana masih produk yang lama. Nah sehingga tentunya inipun yang harus menjadi perhatian dan saya yakin Pak Menteri juga setelah keliling dengan ketemu dengan berbagai macam orang tidak terlepas dari masa lalu. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini kalau begini gak selesai-selesai nanti penjelasannya. Kasih waktu dulu lah menjelaskan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi Pimpinan, Interupsi itukan terlebih dulu didahulukan daripada yang biasa. Kalau disini anggota masih membutuhkan masih dibicarakan gak ada masalah karena kita kolektif oleh dia. Kecuali sesuai tatib kita bicara. 3 menit ya 3 menit tatibnya begitu. Pimpinan yang mau ngomong *abis* itu lihat ke bawah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin sekarang mau ngomong apa? Silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya *gini* Pak Menteri. Kita semua ingin mendengar alasan yang logis. Alasan yang logis itu adalah ada skema normatifnya dan ada yang lain. Yang dijelaskan oleh Pak Sekjen itu kita tidak mengerti apa sebenarnya yang dibicarakannya itu. Dan kita harus hadapi yang kita hadapi itu pejabat tertinggi di ASN di tingkat KKP itu adalah Sekjen dan kita tidak mendengar apa alasan yang logis yang ditanya oleh teman-teman dari tadi. Kenapa 150 kosong jabatan itu? Dampaknya luas. Yang korban nelayan. Kesuksesan Pak Menteri ke depan, saya jadi canggung asal Abang jadi ngomong Bapak ini. Jadi kesejahteraan nelayan itu adalah kesejahteraan nelayan adalah tolak ukur sukses dan tidaknya seorang Menteri KKP. Kalau nelayan makin buruk, kalau nelayan makin tidak mampu, tidak sejahtera, gagal jadi Menteri KKP. Dan hari ini yang ingin kita tahu dari 11 triliun atau 10 triliun dan tidak terserap sampai 6 triliun itu kegagalan atau apa. Dan yang ditanyakan oleh Pak Ono adalah rangkaian *ketidakterserapan* anggaran itu yang besar itu. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Haerudin? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen. 151 tadi ya Pak Sekjen, Anda mengatakan untuk efisiensi, betul? Tadi mengatakan persiapan untuk efisiensi. Sementara Pak Menteri ngomong masih kekurangan tenaga. Jadi Pak Sekjen saran saya, sudahlah. Bapak mengatakan “ya saya salah, saya dimaafkan, dan tidak akan saya ulangi” itu saja. Apa yang dikatakan Pak Ono tadi tahu. Saya bukan gak paham, saya paham Pak. “sudah saya melakukan kebijakan yang salah dan akan saya perbaiki” sudah, selesai. Jadi teman-teman ini gak nanya-nanya lagi. Betul Pak Haerudin?

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi Pimpinan. Mohon maaf.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Ini tidak bisa alasan efisiensi dan lain sebagainya. Ini kewajiban struktural.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak, Pak Muhtarom dengar dulu. Tadi Pak Sekjen mengatakan untuk efisiensi. Tadi.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Itu alasan yang *ndak* benar Pak, mohon maaf. Makanya saya Interupsi, makanya saya Interupsi, itu alasan yang tidak jelas karena ini akan mengganggu pelayanan. Kita cuman dicekoki alasan yang tidak rasional, tidak *logic*, dan tidak bisa diterima lah Pak. ini akan mengganggu, 151 pejabat ini *ndak* main-main Pak dampaknya. Kalau alasannya efisiensi. Ini Pemerintah bukan urusan perusahaan. Mohon maaf ini ini, terima kasih Pak gitu saja.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Saya Pak Ketua, Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya, silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Jadi mungkin sebaiknya, saya tawarkan Pak Ketua, saya saran, Pak Ketua tawarkan ke anggota. Apakah kita akan buka alasan ini atau tidak? Karena sebagian besar anggota meminta. Jadi kalau misalnya kita sepakat Komisi IV untuk membuka, tidak ada alasan untuk tidak dibuka. Kenapa ini penting saya sampaikan Pak? jadi kita lihat realisasi anggarannya Pak Ketua. Tinggal sebulan kurang ini, realisasinya baru 56%, 60 %, rata-rata 70%. Nah ini bukan hanya persoalan lama yang ingin ditutup atau dilupakan oleh Pak Menteri. Tapi ini adalah konsekuensi anggaran yang kita lihat karenanya saya termasuk yang mengusulkan agar persoalan itu dibuka, kenapa kosong itu? Terima kasih Pak Ketua.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya Pak Hermanto

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya ingin mengembalikan filosofi dari anggaran saja Pak Menteri dan Pak Sekjen. Jadi filosofi anggaran atau APBN itu sifatnya adalah alokatif. Jadi tidak berpikir tentang efisiensi. Jadi landasan APBN kita itu sangat minim terkait dengan soal efisiensi. Yang penting anggaran tersedia itu, itu semuanya *teralokir* kepada berbagai macam program dan kegiatan. Itu apa? Artinya itu adalah kita ingin membangun pertumbuhan ekonomi kita ini dan memberantas kemiskinan *gitu* loh. Tapi kalau kita tahan-tahan uang ini, ini memperpanjang usia kemiskinan, *gitu* Pak Ketua.

F-GERINDRA (Ir. H. T .A. KHALID, M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Saya pikir ini teman-teman DPR pada minta dibuka saya pikir apa salahnya kita buka, apalagi 2 tahun sudah KKP itu *disclaimer*. Kalau kita andalkan Menteri Pak Edhy yang dikelilingi oleh Dirjen dan orang-orang lama yang juga gagal, gak bisa kita mengatakan cuman gagal Bu Menteri. Gak bisa kita bisa mengatakan bahwa cuman Bu Susi yang gagal, KKP yang gagal. KKP ada orang-orang nya, saya pikir kita buka saja biar ini KKP ke depan semakin lebih bagus. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke, saya minta teman-teman jangan Interupsi dulu. Masalah tadi dibuka, nanti setelah dijawab, ada pertanyaan dari anggota saya minta dibuka. Ini bukan kemauan saya Pak Menteri, tetapi memang teman-teman anggota Komisi IV lainnya. Jadi biar menjawab dulu pertanyaan yang lalu, nanti pada waktu sesi bertanya, silakan kalau mau memang dibuka. Setuju gak? Saya tanya lagi setuju gak? Jadi tolong jangan dipotong dulu, dijelaskan dulu, nanti pada waktu sesi pertanyaan anggota, silakan. Ya Pak Sekjen tadi menyerahkan ke Eselon I lainnya, tolong jelaskan.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua. Ibu Bapak sekalian
Kami persilakan Pak Zulficar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Terima kasih Pak Sekjen, mohon izin Pak Menteri

Yang saya hormati Bapak Sudin Pimpinan Komisi IV dan jajarannya dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI.

Ada beberapa pertanyaan yang langsung terkait dengan Dirjen Perikanan Tangkap dan kami akan menyampaikan satu per satu secara singkat karena paparan tertulisnya sudah disampaikan. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sudin terkait target produksi perikanan tangkap tahun 2020 itu ditetapkan sebesar 8,02 juta ton. Ini perhitungannya dari mana? Target produksi tersebut itu ditetapkan dari sumber perikanan tangkap laut itu 7,3 juta ton, kemudian perikanan darat sebesar 636 ribu dengan pertimbangan apa? Pertama tren capaian produksi tahun-tahun sebelumnya dari 2015 ke 2018 itu rata-rata peningkatan 2,83% per tahun serta proyeksi tahun 2019 itu sebesar 7,6 juta ton atau naik 5,6%. Tahun 2018 sebesar 7,2

juta ton. Di samping itu kenaikan produksi tahun 2020 tersebut itu juga diharapkan dari adanya operasionalisasi bantuan kapal perikanan di bawah 5 GT sebanyak 300 unit dan bantuan alat perikanan tangkap yang kami sampaikan tahun 2019. Kemudian bantuan kapal perikanan 3 GT sebanyak 3.556 unit dan bantuan alat perikanan tangkap sebanyak 60.668 unit dari DAK tahun 2019 yang diharapkan mulai beroperasi efektif tahun 2020.

Kemudian bantuan kapal perikanan dari APBD murni tahun 2019 juga baik provinsi maupun kabupaten kemudian optimasi pendataan-pendataan kami di berbagai pelabuhan, *observer, electronic log book*, yang selama ini memang ditengarai masih cukup banyak *unreported*. Serta perbaikan-perbaikan fasilitas yang dilakukan di berbagai pelabuhan. Itu mungkin jawaban singkat yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Sudin.

Mohon izin Pak Ketua kami lanjut ke berikutnya. Yang kedua pertanyaan dari Bapak Andi Akmal Pasludin terkait mekanisme pemberian bantuan khususnya untuk aspirasi agar disederhanakan. Yang pertama kami mengapresiasi harapan anggota dewan tersebut dan siap untuk melakukan *review, review* dimaksud antara lain: mekanisme penyaluran bantuan dari mulai menyiapkan proposal hingga pelaksanaan, target-target kelompok penerima bantuan, dan lain-lain. PerMen ini diharapkan juga lebih *simple* dan mengikat hal-hal umum termasuk dalam juknis yang disampaikan.

Kemudian pertanyaan yang disampaikan diharapkan adanya peningkatan anggaran KKP sebesar mencapai 11 triliun. Kami sangat apresiasi juga dan terkait DJPT kami membutuhkan tambahan anggaran untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, perikanan, dan bantuan-bantuan Pemerintah. Terima kasih, apabila hal ini bisa realisasi.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Darori Wonodipuro. Terdapat dugaan adanya korupsi pada pengadaan kapal bantuan, mohon klarifikasi terkait hal ini. Bisa kami sampaikan bahwa terkait laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 15 Mei 2017 sesuai dengan berita acaranya, disampaikan terdapat temuan sebesar Rp 123.181.317.731 terkait pembangunan kapal perikanan tahun 2016 dan, terima kasih kami lanjutkan. Terkait pembangunan kapal perikanan tahun 2016 dinyatakan telah selesai dengan penyetoran bank garansi senilai 30 miliar. Kemudian dengan sisanya 92 miliar telah digantikan dengan penyelesaian pembangunan kapal perikanan yang telah didistribusikan kepada pada nelayan penerima bantuan. Dengan demikian BPK telah menyatakan bahwa rekomendasi senilai 123 miliar tersebut merupakan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah serta tidak ada lagi kelebihan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ono Suroso terkait terdapat masalah SIPI-SIPI perizinan yang di KKP. Perlu kami sampaikan bahwa terkait perizinan usaha perikanan tangkap, dapat kami sampaikan data per 14 November 2019 karena data ini dinamis dari hari ke hari. Untuk status SIPI untuk tahun 2018 masih ada 5 yang belum selesai di kami, 5 izin. Dua unit kapal persetujuan pembayaran PHP dan 3-unit kapal tandatangan blangko SIPI karena yang kapal pembangunan baru yang belum selesai. Kemudian untuk tahun 2019 periode Januari-September terdapat 14 unit kapal yang tertunda dengan rincian: 3 dalam proses tandatangan SIPI, dan 11 menunggu persetujuan PHP-nya. Kemudian untuk tahun 2019 periode Oktober hingga November 14 terdapat 160 unit kapal yang sedang proses penyelesaian izin. Jadi rata-rata per hari itu usulan izin masuk 30 sampai 40 dengan berbagai pesanan.

Selanjutnya khusus untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) hasil (suara tidak jelas) Dirjen tahun 2018 untuk SIUP baru kapal baru terdapat 66 dokumen dan tahun 2019 sebanyak 98 dokumen masih dalam proses persetujuan alokasi sehingga totalnya adalah 155 permohonan. Untuk permohonan SIUP baru kapal jual beli, SIUP perluasan, dan SIUP perubahan sedang dalam proses persetujuan dan permohonan saat ini sebanyak 114. KKP sedang melakukan percepatan proses-proses ini dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk eksekusi tindak lanjutnya sehingga *insyallah* diharapkan bisa selesai.

Selanjutnya kami ke pertanyaan berikutnya secara singkat kami sampaikan pertanyaan dari Bapak Sulaeman Hamzah terkait banyaknya keluhan proses perizinan kapal ikan. Dirjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat efisiensi segala macam tapi memang kami mohon maaf masih banyak tantangan dan mohon *input* masukan dari Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa untuk optimalisasi dari 14 hari bisa menjadi jauh lebih cepat memang banyak sekali hal perampingan yang perlu dilakukan karena sebelumnya itu cukup banyak itu pelayanan regular kita itu dulu harus 4 kali harus ke Jakarta. Setelah kami tetapkan *online* ini hanya 1 kali ke Jakarta. Nanti ke depan ini tidak perlu ke Jakarta lagi kemudian dengan adanya *online* ini sudah bisa lebih optimal dan diharapkan dalam bulan Desember nanti ini sudah bisa *full online* sehingga tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk urus tersebut.

Selain melakukan perbaikan sistem di atas Dirjen Perikanan Tangkap juga melakukan *review* dan asistensi laporan kinerja usaha dan laporan kegiatan penangkapan ikan dalam 2 tahun terakhir dimana kami menemukan terdapat 1,4 juta ton atau sekitar 1,4 miliar kilogram ikan yang tidak

dilaporkan yang nilainya bisa sekitar Rp 40.000.000.000.000 yang tidak dilaporkan dalam periode 2 tahun tersebut dan ini *alhamdulillah* sudah dilaporkan dan sudah kami sampaikan juga kepada Ditjen Pajak terkait hal ini dan ini akan meningkatkan nantinya potensi pajak kepada negara. Selain itu LKU LKP ini juga menjadi instrumen dalam melaksanakan fungsi sumber pengendalian sumber daya.

Perlu kami sampaikan juga beberapa hal yang butuh sekali *input* dari Bapak Ibu anggota DPR dan Pak Ketua bahwa terkait perizinan ini kami menemukan di lapangan masih ada 2.183 kapal-kapal di atas 30 *Gross Ton* ini yang belum memperpanjang izinnya padahal izinnya sudah habis. Ada yang sudah 3 tahun habis, ada yang 2 tahun habis, ada yang setahun habis. Ini belum memperpanjang izinnya sehingga kami mendorong ini juga agar segera melapor karena ini terkait dengan penerimaan negara. Kemudian sebelumnya tahun lalu ini banyak dikelola oleh calo dengan sistem *online* ini sudah kita coba untuk mengurangi secara drastis. Masih terdapat juga sekitar 1000 kapal baru yang dibangun di wilayah Indonesia ini yang belum mendapatkan rekomendasi izin dari KKP padahal aturan kita perlu ada rekomendasi sehingga ini perlu jalan keluar sehingga proses perizinannya bisa lebih optimal.

Kemudian kami juga mengestimasi masih terdapat 10 ribu lebih kapal daerah yang statusnya *markdown* yang ukurannya lebih besar dari yang ada sebenarnya sehingga ini sebenarnya perlu juga untuk mendapat perhatian agar nantinya ke depan tidak salah hitung dalam produksi, tata kelola dan pendapatan negara.

Terkait dengan pertanyaan kedua, bantuan kapal banyak *fiber*. Memang salah satu pertimbangan bahan kapal dari *fiber* itu adalah program bantuan ini karena kalau menggunakan kayu dikhawatirkan dalam jumlah banyak nantinya ini terkait dengan kebutuhan kayu atau hutan yang semakin besar. Sehingga dimana kondisi *illegal logging* juga dihadapi sehingga tupoksinya adalah *fiber*. Kapal dengan berbahan *fiber* ini sudah banyak dipakai juga di berbagai wilayah di Indonesia, pulau Jawa dan Sulawesi bahkan di Papua sudah beberapa kali kita lakukan uji coba, cukup bisa diterima. Tapi tentu saja kami terbuka untuk *input* apabila ada hal-hal spesifik yang perlu mendorong agar opsi-opsi lain dapat diantisipasi, baik itu kayu maupun yang lainnya.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haerudin terkait modernisasi kapal perikanan juga membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai seperti pelabuhan perikanan. Kami sangat sependapat bahwa optimasi pelabuhan sangat penting dilakukan. Saat ini terdapat 538 pelabuhan perikanan di

Indonesia, 22 diantaranya UPT pusat, 9 pelabuhan perintis, dan sisanya adalah pelabuhan perikanan daerah atau pelabuhan perikanan swasta. Dari jumlah tersebut baru 108 pelabuhan perikanan yang ditetapkan kelasnya dan beroperasi penuh. Sedangkan sisanya masih ada proses identifikasi, pemantauan kegiatan operasionalnya. Dan ini masih membutuhkan banyak sekali dukungan baik pembangunan secara fisik, teknis, SDM, syah bandar, dan berbagai hal yang terkait pengembangan pelabuhan.

Terkait dengan penganggaran untuk alokasi fisik, pelabuhan perikanan yang sudah ada di DIPA tahun 2020 sebanyak 94 miliar. Ini rencana difokuskan untuk 26 lokasi pelabuhan perikanan pusat dan perintis. Untuk itu kalau ada tambahan untuk misalnya optimasi pelabuhan-pelabuhan lainnya tentu saja kami sangat senang dengan berbagai usulan tersebut.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Daniel Johan ini dimana terkait dengan mencabut beberapa revisi, beberapa PerMen. Kami sampaikan bahwa KKP berkomitmen untuk memperkuat yang sudah baik dan juga untuk *me-review*, mengoptimalkan hal-hal yang masih kurang serta mencari terobosan-terobosan baru untuk menemukan solusi-solusi atau masalah-masalah yang masih ditemukan di lapangan. Seiring dengan hal tersebut terkait PerMen PerMenKP yang ada saat ini KKP dipimpin oleh Pak Menteri langsung. Ini sementara intensif menampung masukan dari seluruh *stakeholder* baik nelayan, pelaku usaha, LSM, perguruan tinggi, asosiasi, dan tentu saja sangat terbuka untuk *input* dari anggota Komisi IV DPR RI terkait peraturan-peraturan tersebut. KKP mempunyai informasi yang cukup dan pertimbangan yang matang dalam pengambilan-pengambilan kebijakan nantinya.

Kemudian terkait masyarakat yang paling miskin adalah nelayan tapi harus melaut dengan mengurus izin cukup banyak memang kesejahteraan nelayan ini sangat terkait dengan bagaimana efisiensi dan optimasi akses di lapangan. Nilai tukar nelayan saat ini perlu kami sampaikan *alhamdulillah* nilai tukar nelayan ini tertinggi. Ini saat ini kalau kita lihat hasil BPS tahun 2018 nilai tukar nelayan saat ini adalah 113,27 jauh lebih tinggi bahkan dari beberapa pelaku-pelaku usaha termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan lainnya *alhamduillah*. Dan ini tentu saja membutuhkan dukungan lebih lanjut agar pencapaian ini bisa dioptimalkan ke depan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian dan berbagai program yang ada.

Terkait banyaknya perizinan yang harus diurus oleh nelayan, memang urusannya bukan hanya di KKP tapi terdapat juga di Kemenhub, Kemenkes, Kominfo, Pemda yang rinciannya misalnya di KKP SIUP, buku kapal, dan

rekomendasi untuk pembangunan kapal dan cek fisik serta SIPI. Kemudian di pelabuhan ada *port clearance*, ini yang diurus saat datang atau berlayar misalnya surat persetujuan berlayar, surat layak beroperasi, surat tanda kedatangan, *vessel monitoring system*, *log book*, perjanjian kerja laut. Dari sisi Kementerian Perhubungan dokumen-dokumen juga cukup banyak yang perlu dirapikan yang diantisipasi bersama-sama, disinergikan. Pertama *gross* akte, surat ukur, sertifikat kelayakan, pas besar dan pas kecil, buku pelaut, ANKAPIN dan ATKAPIN, sertifikat pemadam kebakaran, *basic safety training*, *call sign*. Juga di *port clearance* nya ada kewajiban untuk AIS dan *crew list* atau sigil. Dari sisi Kemenkes ini ada beberapa aturan terkait sertifikasi kesehatan yang harus disertifikasi termasuk sertifikat *pre practice*, kemudian buku kesehatan kapal, sertifikasi P3K, karantina. Kemudian dari Kemenkominfo itu izin frekuensi radio kemudian disisi lain di tingkat dinas ini masih ada rekomendasi BBM bersubsidi untuk kapal di bawah 30 *gross ton* dan bukti pencatatan kapal perikanan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ini sementara kita mencoba untuk merapikan agar tidak terlalu banyak izin dan lebih *simple* untuk proses-proses ini sehingga jauh lebih cepat prosesnya. Kami juga memohon dukungan Komisi IV DPR RI untuk membantu memberikan *input*, gagasan, dan terobosan agar hal tersebut secepatnya dapat kami lakukan.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Panggah Susanto yaitu terkait perlunya perhatian terkait akurasi data apalagi data ikan bahwa susah sekali menghitung stok ikan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk menghitung stok ikan di Indonesia ini itu dilakukan secara reguler, secara tahunan, ada yang secara 2 tahun, itu melibatkan dari BRSDM, perguruan tinggi, juga dari berbagai perguruan tinggi yang ada juga berbagai organisasi yang ada dan juga bekerja sama dengan Komnas KAJISKAN, Komisi Nasional Untuk Pengkajian Sumber Daya Ikan yang akhirnya nanti menetapkan status stok yang ada. Kemudian pada saat kegiatan penangkapan di laut, ini dengan mengembangkan program *observer on board* juga *log book*, untuk *electronic log book* dan berbagai proses-proses pendataan lainnya. Berdasarkan informasi-informasi tersebut lah kemudian diformulasi berbagai kebijakan terkait dengan sumber daya ikan yang ada. Tentu saja ini tidak sempurna dan masih banyak ruang-ruang untuk *improvement* untuk hal ini dan ini sangat terbuka untuk berbagai masukan dari Bapak Ibu maupun dari para pakar.

Selanjutnya pertanyaan dari KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy agar dilakukan evaluasi terkait bantuan kapal nelayan yang tidak sampai ke penerimanya. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh bantuan yang sudah

berhasil diadakan melalui proses PBJ telah diserahkan kepada penerima bantuan. Terkait dengan usulan yang belum terealisasi pada tahun berjalan itu dikarenakan ada teknis pengadaan atau gagal lelang. Ini beberapa kali ada gagal lelang sehingga terjadi diujung-ujungnya itu kalau dipaksakan ini bisa nanti akan bermasalah sehingga ini biasanya dikembalikan ke tahun berikutnya. Untuk itu proses evaluasi terhadap BSPI dan operasional perlu dilakukan secara berjenjang untuk mengoptimalkan proses ini.

Selanjutnya dari Hj. Nur'aeni terkait bantuan yang diserahkan tidak sesuai dengan usulan nelayan. KKP akan terus berupaya agar bantuan yang diserahkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan dan proses-prosesnya antara lain: identifikasi, seleksi, verifikasi usulan calon penerima, penetapan calon penerima bantuan, pengadaan bantuan, familiarisasi bantuan, distribusi bantuan. Kemudian beberapa proses-proses yang lain termasuk *e-katalog*, ini diantisipasi sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. KKP sangat terbuka untuk menerima masukan dari seluruh pihak untuk mengoptimalkan agar pengadaan bantuan kapal ini bisa lebih efektif.

Pertanyaan dari Ibu Luluk Nurhamidah. Nelayan perempuan masih belum ada pengakuan karena dianggap sebagai rumah tangga nelayan. Perlu kami informasikan bahwa profesi nelayan perempuan telah diakui baik dalam KTP maupun kartu nelayan atau Kusuka. Dari 1.433.854 nelayan yang sudah terdaftar dalam *database* kartu Kusuka, sebanyak 62.886 adalah perempuan nelayan bahkan nelayan perempuan nelayan telah menerima asuransi. Dari total asuransi yang telah diberikan tahun 2016-2019 sebanyak 1.198.177 sebanyak 23.628 diantaranya adalah perempuan. Tentu saja ini masih harus ditingkatkan dan terima kasih atas *input* yang telah disampaikan. Terkait cangkang nelayan yang hadir batasnya sampai Februari, perlu ketegasan dalam kebijakan, mencabut kebijakan cangkang ini sebagaimana telah disampaikan jawabannya oleh Pak Menteri bahwa kita melakukan proses menjaring masukan, dari seluruh *stakeholder* termasuk nelayan, akademisi, untuk melakukan langkah yang hati-hati dan cermat yang nantinya terkait kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah dan polemik baru yang bisa lebih optimal.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Alien Mus, Ibu mohon maaf. Ada pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan memasang rumpon di laut dangkal dimana pada sekali operasi penangkapan ikan dapat menghasilkan 900 ton ikan. Hal ini merugikan nelayan kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang rumpon, rumpon di klasifikasi menjadi 2 rumpon. Rumpon hanyut dan rumpon yang menetap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saudara Dirjen, yang bersangkutan gak, belum datang jadi dilewati saja.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T, M.Sc):

Terima kasih Pak Ketua, kami lanjut ke berikut.

Kami pindah ke pertanyaan dari Bapak H.T.A. Khalid. Pelabuhan perikanan yang dibangun pasca tsunami saat ini tidak beroperasi optimal seperti di Bireun.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Khalidnya gak ada, lewati saja. Biar cepat, karena ini nanti Pak Menteriya jam 7 ada acara makan malam bersama Presiden.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Baik kami lanjut ke Pak Muslim. Ini terkait prosesi kapal dan ini jawabannya sama dengan yang sudah disampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Ono tadi sehingga kami tidak ulangi.

Kemudian pertanyaan dari Bapak Abdullah Tuasikal terkait program bantuan agar disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Kami terima *input* ini dan kami butuh masukan lebih jauh dan *insyallah* akan kami optimalkan proses-proses bantuan ini.

Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sumail Abdullah, kebijakan yang diambil KKP harus berdasarkan kajian yang mendalam, kami sepakat dan kami akan mendalami.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pimpinan, saya Interupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya Pak, silakan. Jadi Pak Sumail gak ada lagi keluar jangan dijawab nanti saja jawabnya sekalian.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ya terima kasih. Nah banyak hal yang saya tanya tapi jawabannya cuman *sikit*. Tapi yang satu ini cukup sangat penting.

Pak Menteri yang saya hormati, Pak Dirjen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 26 itu terkait dengan penerbitan izin pemasangan rumpon. Disini dikatakan bahwa semua rumpon yang ada itu adalah ilegal, ini semua yang ada adalah ilegal. Pasal 7 PerMen no 26 mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon. Untuk Direktur Jenderal izinnya di jalur penangkapan 3, itu jelas. Sedangkan pasal 9, ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi rumpon di wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. PerMen ini itu keluar sejak tahun 2014. Ini sudah 2019, kurang lebih 5 tahun. Pertanyaannya bahwa Pak Direktur itu sudah buat apa? Sosialisasinya seperti apa? Sehingga yang negara yang begini besar, luas wilayah lautnya yang begini besar, rumpon mungkin ada ribuan tapi kok tidak terlihat.

Yang kedua, Pak Direktur. Persyaratan pemasangan rumpon itu berdasarkan pasal 11. Saya kira ini cuma butuh waktu kurang lebih gak *nyampe* 2 minggu, kok herannya sampai sekarang 1 pun tidak ada. Ah itu saja saya minta mungkin sedikit dijelaskan oleh Pak Dirjen yang punya kewenangan agar lebih jelas karena kita bicara soal izin kapal dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada rumpon maka seluruh kapal jaring yang ada di negara Republik Indonesia dia tidak bisa melaut. Ah itu mungkin dijelaskan biar lebih jelas, ini yang pertama saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak? biar dijawab langsung. Supaya Bapak paham. Ya jawab langsung Pak Dirjen.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin rumpon sehingga tidak bisa kami tindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang perlu kita antisipasi.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pak saya inikan Pak. Kenapa belum ada surat masuk untuk perizinan? Saya kira karena sosialisasi samper belum ada. Kami pun lewat masyarakat ya, masyarakat nelayan yang ada di Maluku juga sering konsultasi, katanya

dari atas itu belum, dari atas gak tahu siapa, ya? Jadi kalau alasannya itu tidak ada yang masukan maka hari Senin yang akan datang kalau orang dari nelayan dari Maluku karena sangat merugikan orang Maluku. Di atas 30 GT yang diberikan untuk masyarakat di Maluku tidak ada satupun melaut karena orang Maluku itu biasanya tertib dan disiplin ya. Untuk itu saya mengharapkan kalau memang belum masuk itu maka saya akan hubungi nelayan-nelayan agar minggu depan ajukan surat lalu target seperti apa yang dikatakan, biar *clean* ya. Kalau enggak kan juga pendapatan negara dari pemasangan rumpon juga kan kita juga gak dapat. Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi menjadi catatan apabila ada peraturan segeralah disosialisasikan. Jangan cuma dikirim ke Dinas karena sebagian Dinas ada yang gagal paham, ada yang malas mensosialisasikan. Karena apa? Itu kan Peraturan Menteri bukan peraturan Bupati saya, bukan peraturan Gubernur saya. Juga Pak Sekjen waktu itu rapat terakhir sampai hari ini belum diserahkan permasalahan PerMen yang terbit. Waktu itu kita rapat bertiga, Sekjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekjen KKP, Sekjen Kementerian Pertanian harus menyerahkan PerMen-PerMen yang sudah dikeluarkan agar apabila kami pulang ke dapil, ditanya oleh rakyat kami, kami bisa menjelaskan bahwa ini anda melanggar PerMen ini. Kalau sampai hari ini kan kita gak tahu. Seolah-olah PerMen itu adalah untuk internal bukan untuk dipublikasikan. Oke? Jelas? Lanjutkan.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua untuk *inputnya*. Saya kira ini sangat strategis untuk mendorong kedepan untuk sosialisasi. Cuman memang juga ada ganjalan satu dimana aturan rumpon ini belum dimasukkan dalam PP 75 sehingga PP 75 ini lah sementara kami proses untuk usulan sehingga nantinya bisa diakomodir. Terima kasih Pak, mohon disampaikan kepada kami sehingga kami bisa proses lebih lanjut.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Jadi saya kira jawabannya itu saja. Bahwa ada yang belum jelas, jangan masalah *disalahin*. Tadi kan masalah *disalahin*, tidak ada yang masuk kan? Kalau memang ada yang kurang maka diharapkan itu agar segera diselesaikan biar semuanya lancar. Terima kasih.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Baik Pak terima kasih.

Kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Krisnatus Kurniawan. Di Kalbar tidak ada laut tapi ada sungai terpanjang yakni sungai Kapuas, di Kapuas juga perlu dikembangkan. Kami sampaikan bahwa tahun 2017 KKP telah memberikan beberapa pengembangan pembangunan tempat pendaratan ikan, perairan darat di sungai Kapuas tepatnya di Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, pekerjaan senilai 2,3 miliar. TPI ini sudah beroperasi dan merupakan titik kumpul pendaratan ikan air tawar bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kondisi perairan darat hampir seluruh Indonesia ini pada musim kemarau April dan September ini mengalami kekeringan yang menyebabkan permukaan air danau turun serta menyebabkan naiknya suhu perairan dan berkurangnya kandungan oksigen. Ini yang bisa menyebabkan kematian-kematian masal sehingga perlu diantisipasi dengan informasi teknologi dan bimbingan budidaya yang lebih efektif. Kemudian agar tidak terjadi kerugian lebih besar akibat kondisi ini, ini tentu saja ada tata kelola untuk pemanenan yang perlu diperkenalkan, disosialisasikan kepada masyarakat.

Untuk pembangunan bendungan akan dipertimbangkan lebih lanjut ini dapat menahan volume air ini memerlukan kajian lebih dulu. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, Kementerian PUPR merupakan instansi yang merupakan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah sungai sehingga semua kegiatan yang melibatkan air dan badan air harus mendapatkan izin dari Kementerian PUPR.

Selanjutnya mohon izin kami lanjut kepada pertanyaan ke-20, Pak Edward Tannur. Pembangunan pelabuhan perikanan melalui APBN merujuk kepada lokasi pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang rencana induk pelabuhan perikanan nasional. Sampai dengan saat ini pelabuhan perikanan di kabupaten Timur Tengah Selatan ini belum masuk dalam daftar pelabuhan perikanan KepMen tersebut. Berkenaan dengan hal ini KKP akan berkoordinasi dengan dinas kelautan agar dapat segera mengusulkan pelabuhan perikanan untuk dimasukkan dalam rencana induk sehingga dapat kami proses lebih lanjut.

Selanjutnya pertanyaan dari Pak Fadholi. Ini sama dengan pertanyaan nomor 12 sehingga kami mohon lanjut ke Bapak Sutrisno, H. Sutrisno. Dari anggaran DJPT sebanyak 702 miliar, hanya 224 miliar yang ditujukan untuk nelayan, terkait dengan alokasi tersebut kami sampaikan, total anggaran

kami memang 702 miliar untuk tahun 2020. Alokasi tersebut prioritas untuk nelayan sebesar 224 miliar atau sebesar 32,88%. Kemudian anggaran belanja pegawai operasional ini sebanyak 43%, kemudian belanja non operasional termasuk belanja kegiatan prioritas pelaksanaan tugas fungsi Dirjen sebanyak 24% dan KKP..DJPT tentu saja sangat mengapresiasi usulan untuk penambahan hal ini tentu saja atas izin *approval* dari Bapak Menteri dan diharapkan nantinya bisa untuk pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan dan bantuan-bantuan Pemerintah yang fokus kepada nelayan.

Demikian Bapak Ketua, 20 pertanyaan secara singkat kami sampaikan. Kalau ada yang belum lengkap atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut kami tentu saja siap untuk merespon *input*, saran, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. *Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya Pak Ono silakan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Bukan memberikan tanggapan, hanya meminta klasifikasi saja. Tadi disebutkan di 2019 ada bantuan 60 ribu unit alat tangkap dari DAK, benar gak *statement* itu?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Betul Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, ST):

DAK?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

DAK.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

60 ribu unit? Karena dulu KKP saja pernah membuat 13.800 unit terealisasinya cuman 7 ribu. Ini alat tangkapnya apa? Mohon izin Pak Ketua, sedang saya telepon.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Jadi Pak Ono terima kasih untuk *input* nya. Jadi kalau DAK ini sebenarnya program provinsi dan kabupatennya. Sehingga kita hanya merekap, bukan anggarannya bukan dari..dari kita Pak. Tapi data itu seluruh alat tangkap dan kapal ini, kami siapkan untuk Bapak nanti kalau.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Datanya ada Pak? segera saya minta ya. Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Pak ketua, saya sedikit memperdalam dari Pak Ono.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Jadi saya kira *gini* Pak Dirjen, dana DAK itu kan itu ke daerah *gitu* Pak ya, ke provinsi dan kabupaten/kota. Jadi saya kira data yang Bapak sampaikan itu diverifikasi karena saya meragukan kabupaten/kota dan provinsi itu bisa merealisasikan apa yang di data-data sampaikan tadi *gitu*. Kalau Bapak saja di Kementerian susah apalagi kabupaten dan provinsi *gitu*. Pak Ketua ini menyangkut oleh data Pak Ono tadi ya. Jadi, dan mungkin minta juga nantinya kalau memang datanya Bapak yakin nanti sampaikan ke kami Pak data kabupatennya *gitu* dan nanti kita *check* karena dana DAK itu dana pusat, kami anggota DPR berhak untuk mengawasi *gitu*. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

ya tolong nanti Pak Ono minta data segera disiapkan. Kalau memang datanya ada setelah *break* ishoma nanti kan bisa diserahkan. Jadi jangan

datanya besok, lusa, saya gak mau. Kalau data itu ada di *file gitu* kan gampang. Pak Sekjen dilanjutkan kembali Eselon I mana?

F-PKB (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Klarifikasi dulu sebentar Pak Ketua.

Masih Dirjen KKP tadi penjelasan yang disampaikan bahwa produksi perikanan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Dirjen yang dimaksud Dirjen bukan Dirjen KKP. Ibu mau bicara dengan siapa?.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Tadi yang menjelaskan tadi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Dirjen Tangkap.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Oh Dirjen Tangkap. Mohon maaf.

Pak Dirjen Tangkap tadi menjelaskan menjawab pertanyaan Pak Ketua. Kaitan dengan produksi perikanan triwulan III 2019 bahkan target di 2020 itu akan mengalami peningkatan ya kurang lebih 8 juta ton. Saya melihat di halaman 28 yang Bapak sampaikan disini tertera bahwa bentuk fluktuatif peningkatannya tiap tahun itu meningkat, akan tetapi ada penurunan di 2019. Mohon penjelasannya. Tadi yang disampaikan secara lisan berbeda dengan penyampaian data yang disuguhkan kepada kami.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke dilanjut dulu, nanti jawabannya *gapapa* ya?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, Pak Ketua dari saya sedikit saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau saya bisa bilang gak boleh nanti ya tahu sendiri lah Pak Edhy ya?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya minta klarifikasi saja Pak Dirjen masalah bantuan kapal yang bentuk *fiber*. Kalau di Aceh tuh gak bisa Pak. Waktu kita rapat dulu selalu dikatakan Bu Susi, kita Menteri-Menteri sudah beda Pak kalau dulu memang patuh Bapak patuh Pak. Bapak dengan Bapak Susi itu kan? Eh Bu Susi, *sorry*. Kalau untuk di Aceh Pak kalau Bapak Ketua kalau harus *fiber* di Aceh gak laku Pak Ketua, gak jalan Pak Ketua. Makanya dibuat klasifikasinya Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi maksudnya Bapak ini dibuatlah sesuai kearifan lokal.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Iya itu saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Setuju? Masalahnya Pak Menteri dapat bantuan kapal di wilayah pesisir barat 5 GT dari *fiber*. Jangankan 5 GT, kapal semen pun terdampar di laut lepas itu, apalagi 5 GT. Makanya kan saya bilang, saya Lampung tidak pernah mengusulkan karena gak ada manfaatnya. Jadi itu pertimbangannya nanti harus ada kearifan lokal, cukup Pak?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Cukup Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup? Ya matikan dulu *mic* nya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bapak jangan marah-marah.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik terima kasih Bapak Ketua, terima kasih Pak Zulfikar.

Ibu Bapak sekalian yang saya hormati.

Selanjutnya sekarang adalah Bapak Slamet Soebjakto Direktur Jenderal Perikanan Budidaya kami persilakan Pak Soebjakto. Mohon izin Pak Ketua dan Ibu Bapak sekalian sekaligus menginformasikan bahwa nanti khusus yang penjelasan yang terkait dengan masalah temuan atau masalah hukum mohon izin Pak Yusuf yang akan menjelaskan kepada kita semuanya. Terima kasih.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA (Dr. IR SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.):

Baik mohon izin Pak Menteri.

Yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi IV DPR RI.

Beberapa pertanyaan terkait dengan perikanan budidaya yaitu diantaranya pertama dari Pak Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si yaitu terkait dengan pertanyaan di bendungan Jatigede yang belum ada kegiatan. Jadi pertama kami menyampaikan terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin pada kesempatan ini kami perlu menjelaskan bahwa di waduk Jatigede selama ini sebetulnya sudah ada berupa kegiatan-kegiatan penebaran benih ataupun *restocking* dimana kami bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat telah di *restocking* sebesar atau sebanyak 19.650 ekor. Dan di tahun 2019 belum lama ini telah ditebar 1.200.000 ekor benih dan benih-benih yang ditebarkan adalah benih-benih baik dari ikan-ikan endemik seperti nilam, dan juga beberapa jenis ikan yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah: nila, patin, mas, dan benih-benih ikan yang lain. Dan ke depan saya kira kami terus akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya di daerah Jawa Barat.

Yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Ir. H.T.A. Khalid, M.A. saya kira ini pertanyaan berupa saran kepada kami dimana kami tentu saya mengapresiasi atas saran dari Bapak Khalid terkait dengan pengembangan bibit rumput laut yang perlu diperbaiki baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan kami perlu menyampaikan bahwa kami di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui UPT UPT Balai Perikanan Penelitian Laut maupun payau itu telah mengembangkan laboratorium kultur jaringan dan telah mendistribusikannya kebun bibit kepada masyarakat diantaranya adalah di daerah Lampung, Banten, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulsel dan Bali. Namun demikian di tahun 2020 kami

juga mempersilahkan seandainya ada masukan-masukan terkait dengan pengembangan bibit rumput laut kami siap untuk membantunya.

Yang berikutnya adalah dari Bapak Dr Suhardi Duka terkait dengan pernyataan bahwa di Sulbar itu belum ada bantuan khususnya perikanan budidaya. Terima kasih dari pertanyaannya dan kami perlu menjelaskan bahwa sebetulnya KKP atau Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah cukup banyak bantuan-bantuan yang mengalir ke Provinsi Sulawesi Barat. Diantaranya adalah ekskavator, asuransi usaha untuk perikanan budidaya, benih, begitu juga untuk bantuan paket pakan mandiri dan juga rehabilitasi saluran sarana prasarana untuk tambak. Namun demikian juga kami menerima masukan-masukan ya apapun usulan-usulannya untuk di tahun 2020 terkait dengan pembangunan perikanan budidaya di Sulawesi Barat

Dan untuk pertanyaan dari KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy, S.Sy terkait dengan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen yang bersangkutan belum datang, jadi nanti saja jawabnya jangan nanti dia datang nanya lagi, Bapak jawab lagi.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA (Dr. IR SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.):

Baik Pak Ketua, sehingga kami cukup saya kira Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup? Lanjutkan Eselon I yang lain.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Slamet Soebjakto. Selanjutnya kami persilakan Pak Brahmantya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Kami persilakan Pak Tio.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat siang

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, anggota Komisi IV yang kami hormati.

Menindaklanjuti beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Utamanya terbagi 2 di kami di yang di dalam kelolaan pengelolaan ruang laut

yaitu garam dan terkait tata niaga koral, dapat kami sampaikan sebagai berikut: untuk garam dimana Pak Andi Akmal dan juga Pak H. Slamet menanyakannya pada rapat sebelumnya. kami dapat sampaikan bahwa apa yang ada saat ini permasalahan tidak tertatanya pendataan garam kami sudah saat ini sudah diskusikan dengan melalui Kemenko Perekonomian dimana kami harapkan Kementerian Perindustrian, karena garam ini adalah masalah *supply* dan *demand* KKP dari mulai tahun 2015 sampai sekarang sudah menggunakan BPS sebagai basis pendataan statistiknya kami harapkan perindustrian, Kementerian Perindustrian menggunakan lembaga yang sama karena itu merupakan aturan arahan Presiden dalam satu data. Sebagai informasi juga, fakta bahwa saat ini terdapat luas lahan garam sejumlah 22.592 hektar dan juga terdapat 19.503 petambak garam yang ada di Indonesia. Fakta juga memiliki Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta saat ini fakta bahwa terjadinya harga garam yang turun kami harapkan, kami harapkan bantuan juga dari Komisi IV agar tata kelola, tata laksana dari perdagangan garam ini kami bisa didukung. Koordinasi lanjut terkait rencana, rencana penyediaan garam di tahun 2020 akan dilakukan oleh Kementerian melalui koordinasi Kementerian koordinator perekonomian pada tanggal 28.

Dalam hal ini kami juga mohon dukungan untuk Komisi IV untuk mendukung program Pugar yang sat ini kita lakukan untuk menambah kualitas. Program Usaha Garam Rakyat, Ibu. Saat ini kami sudah membantu sekitar 7.206 hektar geomembran dan juga integrasi lahan. Kita membantu 23 gudang garam dengan kapasitas total 49 ribu. Dengan program Pugar ini kualitas bisa ditingkatkan, kuantitas bisa ditingkatkan dari 1 hektar pada masa panen itu biasa 80 ton bisa sampai ditingkatkan 130 ton. Dan juga secara kualitas tingkat *purity* dari NaCl nya bisa ditingkatkan. Kami juga berharap dukungan dari Komisi IV untuk ke depan kami akan juga dalam Rapat Koordinasi meminta Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan kepada industri-industri penyerap, pengguna garam untuk bisa menyerap lebih banyak garam rakyat sehingga *affirmative policy* terkait untuk memberdayakan garam atau petambak rakyat ini dapat dijalankan.

Yang selanjutnya tentang koral.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Pimpinan, mohon izin Pimpinan. Bisa sedikit? Karena terkait dengan pertanyaan saya tadi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke silakan Pak.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Sedikit saja, ingin mempertajam. Apakah terkait dengan tadi masalah garam impor dan itu. Apakah memang ada neraca garam? Artinya di Kementerian Kelautan ada neraca garam?

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Bapak kami sampaikan, neraca garam itu diatur dalam Rapat Koordinasi pengelolaan garam yang dikelola dari tahun ke tahun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapak. Neraca garam dari *supply* nya kami menggunakan pencatatan melalui data BPS sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dalam rapat terakhir pada 4 November yang dihadiri oleh Pak Menteri, kami juga mendukung bahwa data ini, penggunaan BPS ini dari sisi *demandnya*, dari sisi kebutuhannya juga dari sisi Kementerian Perindustrian harus menggunakan data yang sama untuk mengecek stok Pak yang ada saat ini disisi industri atau yang membutuhkan garam. Terima kasih Pak.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Pimpinan sebentar sedikit. Karena terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa dari Kemenko kita tidak.... Oleh karena itu minta data neraca, neraca garam itu untuk dilampirkan nanti di itu. Itu saja Pimpinan. Terima kasih.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Baik Bapak datanya ada, nanti kami lampirkan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Pimpinan sedikit saja.

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Interupsi , Pimpinan? Kiri Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke, Pak Panggah dulu baru Pak Rudi ya.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terkait dengan data Pak. Dari dulu kalau kita pakai data BPS itu data itu terlalu umum dan juga kebenarannya juga kadang kita masih meragukan meskipun itu secara Undang-Undang memang data BPS itu yang diakui ya.

Sekarang KKP kan menangani hal ini secara lebih menyeluruh ya sehingga sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan data lapangan sebenarnya yang diperlukan itu, bukan data BPS. BPS hanya sebagai apa..data awal ya. Tapi kita perlukan itu adalah data lapangan, sehingga kalau dikatakan produksi katakanlah 1,5 juta itu produksi ada dimana? Apa di ladang? Apa di petani? Apa di pedagang? Apa di gudang? Nah kalau kita dari industri ngomongnya harus di gudang Pak yang siap untuk dikonsumsi. Nah kalau masih di ladang itu belum menjadi catatan kita di perindustrian. Nah oleh karena itu pembangunan gudang ini sudah salah satu upaya tapi ternyata realisasinya masih sangat kecil 49 ribu itu sangat tidak memadai, gudang sebesar itu. Jadi kita ngomongnya produksi ada di gudang. Nah baru kita ngomong “oke kebutuhan industri makanan sekian, industri untuk CAV atau chlor-alkali itu sekian” itu kalau di industri itu mudah *ngitungnya*. Tapi kalau begitu *ngitung* produksi di ladang itu agak sulit. Saya kira permintaannya itu adalah data akurat dalam hal ini adalah data akurat ada di gudang. Sehingga itu siap untuk di konsumsi. Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Langsung dijawab saja biar jelas.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Oke Pak Panggah, terima kasih masukannya.

Terkait BPS kami menggunakan data BPS bukan data sekunder, Bapak. Dari tahun 2015 sampai sekarang kami mengadakan kontrak kerja sama dengan BPS untuk di 23 kabupaten pengolah garam sehingga data mingguan dapat saya dapatkan Pak. Informasi terakhir yang saya dapatkan terkait data garam, *on farm* ya Pak ya? Karena kan kita petambak garam. Dari yang air laut ditambak jadi garam, masuk gudang itu tanggung jawab kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Data produksi

per 13 November 2019, garam rakyat itu sudah di produksi mulai awal tahun sampai dengan tanggal 13 November 2.085.509,41 ton dan PT Garam, karena PT Garam juga sama itu memiliki.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Itu ada posisi ada dimana? Garam segitu.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Ada, kita bisa memberikan *detail* nya Bapak. Ada di 23 kabupaten garam. Saya akan siapkan, begitu. Nah untuk di perindustrian, kami dalam rapat terakhir meminta tata kelola yang sama, neraca ini masalah *supply demand* saja Pak yang *gathuk* seperti apa? Harusnya yang gak bisa digunakan garam rakyat misalkan *chloralkali plant* atau farmasi, berapa? Kalau garam aneka pangan seperti yang disampaikan waktu rapat kemarin bersama Pak Menteri usahakan serap garam rakyat dulu. Komitmen penyerapan garam oleh perindustrian kami apresiasi dalam rapat terakhir kita ingin ditingkatkan dari 1 juta menjadi 1,5 juta untuk penyerapan garam rakyat, itu Pak. Kami siap datanya Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi *gini* Pak Tio, harusnya kan dibikin tabelnya. Produksi berapa? kebutuhan rakyat berapa? kebutuhan industri berapa? Jangan seperti yang lalu. Bicara garamnya ada, garamnya ada kemudian orang impor gak boleh akibatnya beberapa pabrik *complaint* mau tutup. Kalau itu perusahaan Indonesia masih mending, kalau itu perusahaan luar *gimana*? Kok bahan bakunya impor? Dan selalu Kementerian menjawabnya “terjadi kebocoran garam impor ke pasar” gampang kok. Berapa produksi anda, berapa anda membayar pajak, itu kebutuhan garam industrinya. Bukan *gitu* Pak Panggah? Gampang dilihat dari proses produksinya saja bisa kok. Itu paling gampang. Jadi jangan alasan garam rakyat *blablabla*, jangan. Tingkatkan dulu mutunya. Karena ada juga garam impor untuk Indomie, untuk yang lain-lain. Ya kalau butuhnya bagus, garamnya bersih, tidak perlu dicuci lagi, tidak perlu di oven lagi, ya kan gampang masuknya. Kalau perlu PT Garam suruh kontrak sama perusahaan Indomie. Ini loh jalan keluarnya, jadi jangan yang gampang tadi dipersulit. Jelas Pak?

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Siap, jelas Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ada lagi Pak Sekjen?.

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Pak Ketua tadi saya mau *nambahin* sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oh iya Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi. Lanjut.

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Pak Dirjen, tadi saya minta data bantuan Pemerintah untuk seluruh Indonesia berapa hektar atau berapa tadi tuh. Nanti tolong saya dikasih ya. Mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat ada jangan sampai tidak ada. Terima kasih Pak.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Insyallah, siap Bapak.

Yang terkait koral, Bapak. Saat ini atas azas kehati-hatian kami melihat beberapa hal yang nantinya akan kami perbaiki di akhir bulan Desember. Kenyataan yang ada saat ini menurut data LIPI 2018 tutupan karang hidup yang kualitasnya 50%, di bawah 50% itu mencapai 70,20% dari total kawan koral yang jumlahnya 2,5 juta hektar. Kami di KKP memiliki mandat juga konservasi, namun kami juga sesuai dengan undang-undang Bapak, Undang-Undang 27 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2014, undang-undang terkait perikanan juga PP-nya, kami memang menjadi salah satu *management authority* untuk ikan dan koral. Jalan keluar yang kami lihat adalah saat ini kami sedang melakukan monev (*monitoring evaluasi*) juga data yang juga sudah kami sampaikan yang kami temukan terdapat pengambilan alokasi lokasi pengambilan di titik-titik yang menjadi kawasan konservasi Bapak. Di minggu depan kami juga diundang oleh Komisi IV untuk RDP. Kami siapkan data-datanya Bapak. Dan di antar Kementerian dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Maritim.

Kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menko bersama Pak Menteri juga untuk segera memutuskan mandat *situs* terkait wewenang perikanan, karena kami siap Bapak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, Ketua, di sini Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya lanjut.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya, saya bisa pahami kalau itu diambil dari area konservasi. Tapi koral ini kan tidak semua diambil dari area konservasi. Di Sulawesi Barat itu *ndak* ada area konservasi, itu. Yang kedua ekspornya jalan terus tapi yang menderita adalah petaninya karena menjadi *down* harganya, *costnya* tetap naik ya sogok-sogoknya yang sehingga membesar kan sehingga terjadi begitu. Olehnya itu saya minta supaya tidak melakukan generalisasi secara menyeluruh ya. Dilarang di titik-titik konservasi tapi yang di luar konservasi itu bisa dilakukan ekspor. Saya minta begitu Pak Dirjen ya? Terima kasih.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Bapak menyampaikan menurut Undang-Undang Pesisir Pulau-Pulau Kecil pasal 35. Ini undang-undang juga yang sudah dibahas bersama tahun 2007 yang telah diubah tahun 2014 Bapak. Ini memang kami sampaikan dalam forum yang baik ini kita harus benar-benar menyatukan visi. Di Kementerian Lingkungan Hidup ada Undang-Undang 5, kami punya Undang-Undang Pesisir Pulau-Pulau Kecil di pasal 35-nya, mengambil saja Bapak mohon izin, itu tidak diperbolehkan undang-undang juga. Lah kami paham, kami paham terkait dengan kebutuhan ini Pak. Kami tanggal 7 yang lalu bersama Pak Menteri sudah menerima Asosiasi Koral dan Ikan Hias dan selanjutnya ada juga permintaan audiensi dari pembudidaya Bapak. Izinkan kami melakukan monev sampai akhir bulan untuk kemudian ditentukan kesepakatannya seperti apa kalau tidak boleh di kawasan konservasi ya jangan. Yang memberikan kuota harus melakukan monev. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan kuota ya harus melakukan monev, jangan sampai masuk ke situ. Sepakat kan Pak? begitu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua, intinya saya minta supaya jangan di *stop* secara keseluruhan ya. Untuk area konservasi oke saya setuju. Tapi yang apa namanya, Sulawesi Barat itu panjang pantainya Pak 700 kilometer, tidak semuanya konservasi. Ya mungkin saja kalau di pulau-pulau kecil oke, tapi kalau yang bebas saya kira *ndak* ada masalah. Sisi yang lain juga dilarang tidak dilarang tetap jalan, artinya penyelundupan tetap jalan. Terima kasih.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Baik Bapak akan kami kaji, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Tio ini kan sebetulnya hal yang sangat mudah sekali. Di KKP tuh ada S1, S2, S3 mungkin gak lama lagi ada yang S7. Kan gampang, yang budi budidaya paling lama 1 tahun itu boleh ekspor. Tapi kalau yang alam yang pertumbuhannya bisa 50 tahun baru bisa diambil, itu gak boleh. Kan gampang *toh*, gak usah pakai bicara *monitoring*, evaluasi, gak perlu. Tinggal bikin kebijakan apabila di budidaya 1 tahun bisa diekspor yang berarti itu dari budidaya. Kalau pertumbuhannya mencapai 30 tahun 40 tahun jangan dikasih, tinggal di klasifikasi saja, ini boleh ini tidak kan *gitu*. Kan tidak mungkin orang budidaya sampai 30 tahun baru dipanen gak mungkin. Dan saya juga mau tanya kepada Kepala Badan Karantina waktu itu infonya dari eksportir koral di Bali distop nya mendadak tanpa surat dari Badan Karantina, betul gak? Hanya WA saja.

Ah, Pak Menteri besok-besok saya bicara kalau Pak Menteri mau melarang sesuatu gak usah pakai surat cukup pakai WA saja. Ini kan, coba kepikir gak, suatu keputusan yang mengakibatkan puluhan pekerja tidak bekerja hanya lewat WA saja. Janganlah, buatlah peraturan yang tertib, buatlah yang rapi. Dan saya yakin Presiden Republik Indonesia juga gak mengetahui masalah cukup pakai WA saja *stop* semuanya. Ya Pak Menteri? Pak Menteri santai saja Pak Menteri. Ada lagi Eselon I. Pak Irjen ada yang disampaikan?.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Sebelum Pak Irjen Bapak.

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Tio. Selanjutnya mohon Pak Agus Suherman, Dirjen Penguatan Daya Saing sekaligus Pak Ketua, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kami Persilakan Pak Agus.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING (Dr. AGUS SUHERMAN, S.Pi., M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Masih siang, belum sore. Nanti sebutnya malam.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING (Dr. AGUS SUHERMAN, S.Pi, M.Si):

Siap.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV

Anggota Komisi IV

Bapak Menteri dan para Eselon I yang kami hormati.

Terima kasih berkenan atas, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana tanggapan tertulis yang sudah kami sampaikan dari Bapak Sudin kami terima kasih, Pak Darori, Bapak Ono Surono, dan Ibu Luluk Nurhamidah, Ibu Ema, dan Bapak Sumail Abdullah.

Yang pertama itu terkait dengan impor ekspor. Jadi sebagaimana tertulis kami sampaikan bahwa komoditas ekspor kita di tahun 2019, Januari dan September 2019 itu mengalami *surplus* sebagaimana sumber data BPS yang diolah oleh KKP dari 480 kode HS 8 digit 2017. Yang tertinggi itu ada di komoditas udang 1,21 miliar, kemudian ada di tuna. Kemudian untuk impor itu ada di 0,35 miliar, yang tertinggi itu ada di tepung pelet, rajungan, makarel, ada salmon, dan minyak ikan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2018 kami tahun 2018 sudah ada peraturan Menteri bahwa rekomendasi KKP hanya menerbitkan rekomendasi impor sedangkan persetujuan impor ada di Kementerian Perdagangan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa volume dan nilai ekspor hasil perikanan berdasarkan negara utama untuk tahun 2019 itu tertinggi itu di US, kemudian baru di Cina, dan diikuti oleh Jepang.

PIMPINAN RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pak Agus boleh ditampilkan gak di sini ya? Enggak, justru data itu kita butuh yang *detail* terdiri dari apa saja.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING (Dr. AGUS SUHERMAN, S.Pi., M.Si.):

Sembari nunggu data kami sampaikan juga terkait dengan pertanyaan dari Bu Ema tentang gemar ikan untuk menurunkan *stunting* di Jawa Timur sebesar 26% dan meminta agar KKP memperhatikan di pihak Jombang. Pada prinsipnya bahwa kami merasa berterima kasih atas dukungan program tersebut dan kami akan perluas kepada semua anggota DPR Komisi IV khususnya yang berkenan untuk ikut melaksanakan program gemar ikan ini. Kemudian jadi kami mohon nanti berkoordinasi dengan tenaga ahli Ibu untuk berkoordinasi detailnya terkait dengan titik lokasi yang bisa kami laksanakan baik itu dimungkinkan di akhir tahun ini maupun di 2020.

Kemudian saya kira itu kalau untuk PDS, terkait ekspor impor sudah Mas? Kalau boleh lanjut yang ke PSDKP sambil menunggu data ekspor.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Pak Ketua, Pimpinan selagi tim Direktorat Jenderal PDS menyiapkan data ekspor impor sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Daniel Johan. Mohon diberi kesempatan Pak Dirjen PSDKP masuk ke wilayah PSDKP terlebih dahulu

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang silakan yang penting nanti kita rencananya jam 13.00 kita *break* dulu, Ishoma. Nanti kita lanjutkan kembali.

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik terima kasih Bapak. Silakan Pak Agus.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING (Dr. AGUS SUHERMAN, S.Pi., M.Si.):

Dari Bapak Darori terkait pembangunan, gak ada.

Kemudian Ibu Luluk Nurhamidah terkait dengan keamanan laut adanya tumpang tindih. Kami sampaikan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai mandat regulasi internasional FAO, PBB antara lain *code of conduct for responsible fisheries*. FAO

mengamanatkan setiap negara melaksanakan *monitoring control surveillance* dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan *monitoring control surveillance* dilakukan melalui pengamatan pemantauan untuk menilai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai pertimbangan penyusunan strategi perencanaan sumber daya ikan. Selain itu dilakukan juga melalui mekanisme pengaturan, pengendalian wilayah dan waktu penangkapan ikan, pemberlakuan regulasi dan perizinan di wilayah perikanan. Selanjutnya dilaksanakan operasional pengawasan dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa sumber daya ikan tidak dieksploitasi berlebih, penangkapan ikan ilegal diminimalkan, dan pengaturan manajemen dilaksanakan.

Pelaksanaan pengawasan di lapangan dilakukan secara sinergi dengan Kementerian Lembaga lain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. KKP melaksanakan pengawasan dari laut teritorial sampai ZEE, Polri melalui pol air melaksanakan pengawasan di wilayah teritorial. Sementara TNI AL melaksanakan pengawasan di ZEE I. Dalam penanganan kasus-kasus di bidang perikanan maka dikedepankan proses penyidikan oleh PPNS Perikanan.

Kemudian dari Bapak Sumail Abdullah tentang perlunya ketegasan terhadap IUU, terima kasih. Berarti sudah selesai tinggal data ekspor.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Saudara Dirjen saya mau tanya, saat ini kapal asing atau kapal yang ditangkap yang belum ditenggelamkan tolong dilaporkan juga karena kalau main tenggelam, tenggelam, tenggelam apa manfaatnya? Saya setuju dengan *statement* kemarin Pak Menteri kenapa tidak diserahkan ke nelayan? Tetapi tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Ditenggelamkan apa sih hebatnya? Ya kan? Kalau masalah hanya untuk opini publik ya silakan, tapi manfaatnya apa? Yang terjadi adalah pencemaran lingkungan laut. Sekarang masalah data impor ada atau enggak ini? Harus jelas ini. Kalau memang datanya gak ada bilang gak ada, jangan nyari-nyari tetap juga gak ada alias *ketinggal*.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Boleh menyampaikan data kapal tadi Bapak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Untuk sampai September 2019 bahwa kapal yang sudah berproses hukum maupun sudah inkrah itu terdapat 72 kapal Bapak, yang sudah inkrah itu ada 72 kapal dan 72 kapal 45 itu dirampas untuk negara. Dan 45 dirampas untuk negara ini dimungkinkan untuk diproses dari Kementerian Keuangan untuk diserahkan kepada Kementerian Kelautan atau kepada koperasi atau badan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sedang kami upayakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kapal tersebut bisa digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan ataupun badan, Lembaga-lembaga pelatihan, pendidikan yang membutuhkan.

WAKIL KETUA/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Nanti diminta data lengkapnya ya Pak ya. Kita tahu butuh ukurannya karena ukuran itu hal yang menentukan. Dia ketepatannya untuk apa juga nanti jangan juga diberikan dia juga gak bisa jalanin.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Siap Pak. *Makasih* Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

72 kapal itu semua kapal asing?.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Iya Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kapal asing?.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Iya. Masih ada 20 Pak yang bermasalah. Masih ada 20 kapal Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Di luar 72?.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Di luar 72 itu kan masih ada 20 yang berproses hukum.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Iya ada 44 yang sedang berproses hukum

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Gimana mekanismenya? Ini kan kalau keputusan pengadilan sudah menjadi milik negara kan Pak?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Kalau proses hukum itu maksudnya Bapak, izin Bapak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan yang 72 kan sudah inkraht, berarti sudah menjadi barang milik negara. Gimana model pemberiannya ke nelayan?

IRJEN KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.):

Izin menjawab Bapak. Pak Ketua yang kami hormati.

Mekanismenya begini Pak. Karena eksekutornya adalah Jaksa maka Menteri Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung. Tembusan kepada Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab badan milik negara. Akan lebih baik Pak, pada saat kita mengajukan surat kepada Jaksa Agung sudah ada alokasi kemana ini Pak, sehingga lebih cepat, itu satu. Ini sudah inkrah Pak ya. Tapi ada lebih cepat lagi Pak Ketua, pada saat proses persidangan menjelang tuntutan pidana kita sudah tentukan kemana ini barang ini? Kelompok mana yang akan menerima Pak. Ini akan terjadi efektif kalau ini terjadi, pada saat itu terjadi, inkrah, tidak melalui Menteri Keuangan lagi, langsung ke depan. Jadi mungkin ke depan kalau memang mungkin ada kesepakatan untuk dimanfaatkan dari awal kita tentukan pihak mana yang akan menerima Pak. sehingga tidak perlu kepada Menteri Keuangan lagi Pak. tapi sekarang yang sudah inkrah, 45 yang sudah bagus tadi itu bisa dengan cara Menteri kami membuat surat kepada Jaksa

Agung izin pemanfaatan ke pusat Kemenkeu. Nanti setuju Kemenkeu kita hibahkan Pak. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

ini saran saya. Saya sangat setuju sekali sama Pak Irjen supaya semua pihak jangan ada yang melanggar hukum. Yang kedua, yang anda harus pikirkan Kementerian adalah kalau kapal itu 200 GT diberikan kepada nelayan, mampukah untuk operasionalnya? Jangan-jangan nanti sama nelayannya, mohon maaf disewakan kepada pihak ketiga. Kalau koperasi, koperasinya dinilai dulu. Apakah koperasinya sehat? Apakah koperasinya punya uang untuk operasional atau tidak? Kalau enggak kan sama juga bohong Pak. Nanti rusak mesin sedikit, mangkrak akhirnya ujung-ujungnya digantung juga.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, Pak Ketua izin Pak Ketua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Silakan Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya terima kasih kebaikan Pak Ketua.

Ini air laut masih asin, garamnya juga masih asin. Belum berubah

Jadi terkait dengan kapal ini Pak, ada Pak Menterinya mana nih? Mentang-mentang Menteri dari Komisi IV jadi begini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan *gitu* Pak Hermanto, ini kan sesi yang menjawab kan Eselon I juga, kalau Bapak mau *nanya* Pak Menteri, nanti diruang makan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya siap.

Jadi begini Pak Dirjen, semuanya. Untuk kapal-kapal yang dialokasikan untuk nelayan saya pikir memang harus bersifat kapal itu bisa dipakai *gitu* ya, bisa digunakan oleh nelayan. Nah selama ini, ya tentu kami berterima kasih kepada Dirjen yang mengalokasikannya, tentu ini prinsip. Cuma supaya kapal ini berdaya guna, manfaatnya besar, maka sebaiknya

bantuan-bantuan kapal untuk nelayan ini, itu sesuai dengan design yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Profil dari kapal.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Hermanto menanyakan kapal sitaan atau menanyakan kapal sitaan atau kapal bantuan yang diberikan oleh KKP.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya supaya gak di sita, ini kan begini persoalannya. Kita ini kan kapal ini banyak dikasih tapi gak dipakai sehingga disita gitu loh. Gitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya oke Pak Manto, iya iya iya.

Tadi Paak Hermanto sudah nanya, sudah jelas. Masih ada yang mau dijelaskan? Sambil nanti nunggu data? Termasuk juga nunggu data kapal. Dana in apa tadi? Data impor hasil laut sama data kapal nanti setelah *break* saya minta disiapkan. Ada lagi Pak Sekjen?

SEKJEN KKP (Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Mohon izin Pak Ketua.

Pak seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, waktu tinggal 5 menit menjelang jam 1 kita akan Ishoma mohon izin bila diperkenankan Pak Irjen akan menjelaskan ada 2 hal Pak. sesuatu yang substantif saya pikir menurut hemat kami, Ibu Bapak sekalian berkenan untuk mengikuti hal ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Silakan Pak Irjen.

IRJEN KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF. S.H., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua dan anggota yang kami hormati. Kami panjatkan, pertama terima kasih banyak Pak sudah memberikan dukungan teman anggaran bagi Irjen sejalan dengan kebijakan Pak Menteri dan buat Irjen Pak.

Yang kedua izinkan kami bicara tentang menjawab pertanyaan Ono Surono. KJA ini merupakan implementasi dari arahan Pak Presiden, Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Irjen nanti masalah Pak Ono jawabnya nanti saja. Bapak jangan 2 kali jawab Pak karena Pak Ono nya lagi tidak ada. Takutnya nanti dia balik lagi, dia nanya lagi, Bapak jawab lagi, buang-buang waktu Pak.

Oke, kita *break* ishoma pukul 13.00.

ANGGOTA KOMISI IV:

Pak, mohon maaf saya belum dijawab karena yang ditulis disini adalah hanya sebagian contoh padahal ada yang lebih penting lagi. Makasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu, hal yang penting apa tolong dijelaskan? Boleh, Ibu anggota boleh.

ANGGOTA KOMISI IV:

Terima kasih.

Jadi Pak sebetulnya yang dijawab di sini hanya salah satu contoh tentang Balitkanwar tapi pada prinsipnya saya ingin sekali.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Belum Bu, nanti ya Bu. Oke? Kita kembali keruangan ini insyallah 13.30 apabila anggota dan Kementerian *on time*. Saya skors

(KETUK PALU 1 KALI: RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Skors saya cabut.

(KETUK PALU 1 KALI: SKORS DICABUT)

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Ibu anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapannya, tapi sesuai dengan pasal 257 peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa setiap anggota diberi waktu bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit. Terkecuali juru bicara boleh 5 menit, tapi jangan anggota mengaku sebagai juru bicara. Kami persilakan yang pertama Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri dan para Dirjen yang saya hormati dan saya banggakan.

Ada beberapa apa namanya *unek-unek* yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jawaban yang ada di buku jawaban ini tidak sesuai dengan aspirasi saya. Karena yang saya maksudkan Balitkanwar ini adalah salah satu contoh sebetulnya saya ingin menyampaikan mumpung ada Pak Menteri di sini. Bahwa di perikanan ini banyak sekali profesor-profesor riset yang belum dioptimalkan, kenapa? Karena Badan Litbang perikanan ini bersatu dengan Badan SDM yang program-program di Badan SDM ini tidak mensosialisasikan hasil-hasil penelitian yang dikeluarkan oleh profesor-profesor riset yang ada di Badan Litbang perikanan. Saya mengerti betul karena, Pak Menteri dulu saya pernah menjadi Direktur Agrikultur *research* manajemen yang mengelola dan menyekolahkan, disini ada saksinya Pak, Gellwynn sebetulnya. Karena dulu tidak melalui DPR tapi melalui Bappenas yang menyekolahkan teman-teman Peneliti. Tapi akhirnya setelah masuk ke Kementerian KKP, kurang dimanfaatkan. Jadi saya banyak sekali keluhan-keluhan dari para Peneliti profesor riset yang sudah yang profesor riset mengeluh karena ilmunya tidak dimanfaatkan dan tidak disosialisasikan dengan baik. Untuk itu mohon pengertiannya supaya pak Menteri bisa meninjau ulang tentang hasil-hasil penelitian yang ada di Kementerian Perikanan.

Yang kedua tentang peran perempuan. Tadi bagus sekali Pak Menteri sudah secara informal sudah akan menggiatkan peran perempuan yang ada di daerah-daerah karena kita prihatin juga banyak sekali para TKW kita yang nasibnya kurang beruntung sehingga menjadikan kesejahteraannya makin terpuruk bukan makin membaik.

Yang ketiga tentang subsidi BBM. Nah mohon praktek-praktek yang tadi kemukakan teman-teman harus ditinjau kembali apakah sudah tepat sasaran atau belum. Nah kemudian, permodalan. Perikanan ini bagus sekali di KKP karena BLU yang kami rancang sebetulnya dulu bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, di perikanan sudah jalan. Tapi sayangnya tadi rentenir-rentenir masih bergentayangan di sektor di nelayan-nelayan. Nah ini perlu ada penertiban yang khusus apalagi di sana nelayan-nelayan ini kan perempuannya, Ibu-ibunya banyak ditinggal untuk mencari ikan. Nah di sini peran BLU tidak kuat akhirnya, padahal kelembagaan BLU yang ada di KKP ini dulu dijadikan contoh. Nah mohon embrio yang sudah bagus ini perlu di budi daya, diperkuat lagi.

Nah yang ketiga koperasi Pak, apalagi Pak Menteri ini kan sebetulnya pendiri koperasi dimana-mana. Nah mohon koperasi dengan BLU ini sebenarnya bisa dikaitkan karena perbankan itu sebetulnya hanya jadi pendamping saja. Karena kalau melalui regulasi perbankan pasti nelayan-nelayan kita tidak sanggup karena harus memenuhi unsur 5C. Nah kemudian pelatihan dan pendampingan. Jadi pelatihan dan pendampingan ini penting sekali karena tadi, rentenir-rentenir kita ini sudah menyatu dengan para nelayan sehingga tidak disadari bahwa itu rentenir. Yang diperlukan oleh nelayan itu kan sebetulnya kemudahan akses. Jadi mereka tidak menyadari bahwa suku bunganya terlalu tinggi menjerit. Yang penting mudah diakses.

Nah kemudian berikutnya adalah hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan itu sering sekali tidak dicatat dengan baik, karena tadi tidak adanya pendampingan sehingga nelayan-nelayan kita ini selalu dibohongi oleh para tengkulak-tengkulak. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah unit pengelolaan ikan. Nah ini kaitannya juga dengan teknologi. Jadi peneliti kita sebetulnya sudah banyak menemukan teknologi-teknologi tapi tidak ada sosialisasi atau sinergitas antara pengguna dengan hasil penelitian.

Kemudian berikutnya adalah karena terkait dengan hasil penelitian, institusi pendidikan. Jadi kita tahu bersama bahwa banyak sekali sekolah-sekolah perikanan yang ada di Indonesia tapi tadi setelah selesai itu tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga mereka juga cari pekerjaan ke tempat lain. Nah ini juga merupakan *problem* kita bersama. Jadi mohon Pak Menteri dan jajarannya mengevaluasi kembali program-program yang sudah bagus itu supaya tepat sasaran untuk menyejahterakan para nelayan kita. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Mba Luluk silakan. Singkat jelas.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ya terima kasih Pimpinan, Pak Menteri, dan semua jajaran yang saya hormati berbahagia.

Ada beberapa hal juga yang ingin saya kemukakan. Yang pertama saya mengapresiasi respon Pak Menteri yang terkait dengan nelayan perempuan yang waktu itu saya sampaikan dan tentu yang kita harapkan adalah langkah-langkah serius dan intervensi kebijakan yang memungkinkan bahwa harkat martabat nelayan perempuan. Nah kalau di Kementerian lain saya juga bilang nanti petani perempuan itu bisa ditingkatkan termasuk juga

perempuan keluarga nelayan. Karena ini mata rantai yang menurut saya perlu untuk benar-benar diperhatikan kalau ingin memutus garis kemiskinan yang sementara ini masih menjadi *problem* utama bagi nelayan-nelayan kita di nusantara.

Yang pertama antara lain yang ingin saya sampaikan tadi merespon juga tadi ada laporan tentang garam. Pertanyaannya ini kan saya membaca buku kecil ini Pak Menteri, Di sini ada persoalan terkait dengan kartel, kalau sudah ada pengakuannya secara terbuka adanya kartel sebagai salah satu persoalan garam di Indonesia nah kira-kira langkah strategi dan intervensi kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Menteri untuk bisa mengatasi persoalan kartel ini seperti apa?

Kemudian yang kedua masih terkait juga dengan garam bahwa garis pantai Indonesia ini kan terpanjang di dunia kalau gak salah ya. Tetapi mengapa sih kemudian kita ini masih mengimpor garam? Ini memang seperti pertanyaan yang diulang, tapi ini tetap saja susah untuk kemudian dicerna oleh akal sehat orang biasa, orang awam, termasuk juga saya dalam hal ini. Bagaimana bisa menjelaskan bahwa garis pantai yang sangat besar, lautan yang 2/3 luasnya dari daratan tapi untuk produksi garam saja kita tidak mampu untuk memenuhi hajat hidup kita sendiri dan harus impor yang mana nilai impor kita itu gak sebanyak jumlahnya. Nah hambatannya apa sih *policy* ini gitu, Ini kan masih terkait dengan *policy*. Ataukah ini persoalan regulasi ataukah ini ada *problem* kelembagaan dimana ada apa namanya tata kelola impor yang itu melibatkan Kementerian yang lain yang itu kemudian membuat katakanlah BUMN nya negara ini gak berdaya. Kalau ini misalnya yang menjadi masalah, sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian KKP untuk bisa menyelesaikan persoalan ini yang itu lintas sektoral ya dengan Kementerian yang lain. Tetapi kita tidak ingin bahwa nanti pertemuan yang akan datang kita gak ketemu jawaban. Jadi kita butuh jawabannya itu sekaligus ini juga memberikan jawaban kepada daerah-daerah yang hari ini sedang menunggu Pak kaya di Madura, kemudian juga di Pantura dan juga daerah provinsi-provinsi yang lain.

Nah kemudian yang terkait dengan produksi perikanan di Indonesia. produksi perikanan di tanah air tadi laporannya juga terus meningkat ya sampai di tahun 2018 tapi juga di 2019 mulai ada penurunan. Nah yang menjadi persoalan bahwa perikanan yang tangkap ini justru pergerakannya lebih stagnan dibandingkan dengan perikanan yang budidaya. Nah *problem* yang perikanan tangkap itu kenapa bisa lebih stagnan daripada yang budidaya? Terus kemudian di kaitkan dengan semangat yang kemarin itu untuk memerangi *illegal fishing*. Kemudian ada klaim keberhasilan di satu sisi

yang dilakukan oleh Pemerintah tetapi mengapa kemudian produksi perikanan ini justru menurun dari sisi yang tangkap itu Pak? nah kalau perlu mohon diinfomasikan data kalau ada nanti bisa diinfokan. Jadi potensi *lost* atau kehilangan kita dari sektor perikanan yang tangkap atau laut itu secara ekonomi itu berapa? Dulu konon katanya ada sekian miliar dolar gitu ya per tahun akibat *illegal fishing* tetapi kemudian dengan intervensi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk perang terhadap ilegal termasuk penenggelaman itu sudah memberikan sumbangan berapa banyak secara ekonomi itu kalau itu dirupiahkan. Jadi biar, biar selaras gitu antara potensi kehilangan dan kemudian potensi yang terkait dengan keuntungan atau *benefit* dari upaya kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk bisa lebih fokus apa yang ditanyakan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ya itu, itu pertanyaan. Saya harap di Kementerian juga paham ya kita hanya ingin bahwa untuk menilai apakah penenggelaman kapal itu efektif atau tidak, terus yang kedua apakah *illegal fishing* itu memang kalau dianggap potensi kerugian dari kecurian laut itu besar itu berapa potensinya itu berapa? Dan kemudian intervensi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk misalnya penenggelaman kapal itu dan menyumbangkan berapa dari yang kerugian? Jadi ini kira-kira masih rugi atau kita sebenarnya sudah bisa menutupi kerugian? Kira-kira seperti itu.

Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir sekali Pak. Kasih waktu 1 menit. Bahwa produktivitas perikanan menurut saya dan juga hasil tangkap bukankah itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi laut kita, semakin laut itu sehat maka sebenarnya produktivitas itu juga akan semakin baik. saya memang belum mendengar penjelasan dari Pemerintah, saya gak tahu apakah ini dianggap kewenangan dari Kementerian yang lain tetapi karena ini masih bicara tentang laut maka mohon diperhatikan betul bahwa ada ancaman yang sangat serius yang ini pasti nanti akan juga mengancam produktivitas hasil laut yaitu sampah laut Pak. Indonesia sudah jadi produsen terbesar yang kedua di dunia yang terkait dengan sampah dan ini bukan hanya apa ya, sampah-sampah biasa. Mulai dari yang sampah rumah tangga sampai sampah yang berbahaya mulai dari limbah industri juga dari bekas BBM, *oil*, semuanya yang pencemaran itu bisa menyumbangkan nilai kerugian yang dialami dari sektor perikanan laut. Jadi kalau bicara kerugian

banyak faktornya tapi yang justru sumbangan dari limbah ini tidak dijelaskan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Ono Surono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

ya, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran yang pertama terkait dengan BPK. Tentunya kita semua tahu bahwa 2 tahun berturut-turut KKP di ganjar *disclaimer* walaupun setelah itu Wajar Tanpa Pengecualian. Ini tentunya proses yang harus dialami. Nah sehingga saya perlu bertanya dan perlu dijawab oleh Dirjen. Karena Pak Menteri saya yakin belum tahu juga permasalahannya. Yang pertama terkait dengan KJA (Kerambah Jaring Apung) yang saat ini sedang proses hukum di Aceh. Lalu ada 2 kasus lagi di Jawa Tengah di Karimun Jawa dan di Jawa Barat di Pangandaran. Yang saya tidak tahu prosesnya berjalan atau tidak tapi nyatanya sekarang sudah tidak beroperasi. 133 miliar yak an anggaran negara yang dipergunakan untuk itu. Dirjen pun yang kapasitasnya sebagai Komisaris Utama saya dengar juga sudah dipanggil sama kejaksaan. Nah sehingga seperti apa sih duduk persoalannya sehingga ini menjadi kasus hukum karena kalau saya dengar dari mantan Direktur Utama PT Perinus bahwa kegagalan itu karena kesalahan KKP dalam melakukan kajian menentukan lokasi. Lokasinya tidak tepat sehingga teknologi walaupun dari Norwegia akhirnya rusak. Tentunya dalam hal ini, Pak Zulficar ya, sebagai Komisaris Utama tentunya kan harus bertanggung jawab juga. Saya pikir ini dikaitkanlah dengan kapasitas seseorang. Kalau teman-teman di bawah, saya dengar “kok Pak Zulficar dalam memberikan izin mengeluarkan izin kapal kok sulit sekali tapi pada saat Perinus melakukan tender, melakukan pelaksanaan proyek KJA yang berpotensi korupsi kok mudah sekali” nah mohon nanti dijawab.

Yang kedua terkait dengan impor ikan. Saya ingin jawaban terkait apa sih perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan KKP dan Perindustrian? Yang terkait dengan izin impor yang berujung kasus hukum OTT KPK, Direktur Utama PT Perindo ditangkap. ini izinnya dari mana? Apa dikeluarkan dari KKP atau dari Perindustrian? Dan definisi terkait dengan bahan baku industri terus terkait dengan non bahan baku ya mohon dijelaskan juga. Nah tentunya ini pun sangat erat kaitannya dengan tugas selaku Dirjen karena kan

Komisaris Utamanya juga dari KKP juga. Nah sehingga ya mohon dijawablah terkait dengan masalah-maslah yang berujung pada kasus korupsi itu.

Yang kedua terkait dengan perizinan kapal. Pak Menteri, Pak Zulficar, Presiden memberikan arahan sebelum Pilpres, semua nelayan diundang ke istana. Presiden saat itu dipanggil, memanggil Pak Zulficar lah, ditanya pada saat itu “perlu berapa hari? Aturannya 14 hari, bisa gak 4 hari, bisa nggak 2 hari?” lalu kemarin pun saya dengar Pak Menteri pun mengatakan yang saat pertemuan dengan nelayan “kalau bisa 1 hari kenapa harus berhari-hari?” memang setelah saya bicara terkait dengan izin-izin kapal yang 400, yang 100, yang sebelum rapat ini dilaksanakan. Sekarang sudah keluar beberapa. Tapi masih ada Pak Menteri, terutama permohonan-permohonan perubahan SIUP. Permohonan kapal-kapal baru yang saat ini masih belum diproses. Ada yang sampai 2 tahun. Lalu misalnya ada kapal yang dibangun di atas 150 GT, banyak ini, di Muara Baru, Muara Angke, di Indramayu, di Pati, di Tegal yang pada akhirnya kapal pun mangkrak karena tidak ada yang berani, nah ini akan diapakan?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Ono 1 menit lagi ya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya, tapi nanti setelah 1 menit selesai, saya nanti diujung saya tanya lagi Pak, karena masih banyak Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Boleh.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Boleh kan? Siap. Siap Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

10 kali juga boleh. Tapi tatib tetap kita jalankan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Nah sehingga ini perlu didalami lagi Pak Menteri, dibukalah semua hal yang menyangkut perizinan. Nah sehingga pada saat Pak Menteri turun ke lokasi-lokasi nelayan mereka akan sama bicaranya, izin-izin izin. Dan pada

saat Pak Menteri ngomong oke ke nelayan, faktanya juga kan sulit juga. Kalau kemarin ada beberapa teman-teman pelaku usaha ketemu Pak Menteri tidak ngomong langsung ke Pak Menteri mungkin sekarang gak akan keluar tuh beberapa dari mereka. Nah sehingga perlu sistem dibenahi betul terkait dengan masalah perizinan.

Selanjutnya terkait program prioritas. Dengan anggaran yang sangat kecil saya usulkan Pak Menteri untuk bisa memilih program prioritas itu yang berkaitan dengan nelayan kecil, pembudidaya kecil, petambak garam kecil. Untuk yang besar-besar, pengusaha besar mereka agaknya tidak perlu fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh negara. Kapal-kapal besar, pengusaha-pengusaha besar yang kapal 100 GT, 150 GT butuh cuman perizinan yang cepat. Nah contoh misalnya di Indramayu, di Indramayu ada 1 lokasi meminta 1000 ton, disitu isinya pengusaha besar semua. Kelompok nelayannya berjumlah sekitar 60 orang, kapalnya besar semua, di samping tempat itu masih banyak nelayan kecil. Nah sehingga daripada membangun *cold storage* 1000 ton untuk mereka pengusaha yang memanfaatkan hanya pengusaha. 10 miliar, 20 miliar anggarannya lebih baik diperuntukkan untuk nelayan kecil Pak. jadi mohon di realokasi terkait dengan pembangunan *cold storage* yang 1000 ton. Saya sudah ngomong dengan Pak Agus Suherman. Walaupun saya dari Indramayu, saya lebih mementingkan nelayan kecil daripada untuk dimanfaatkan pengusaha-pengusaha besar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah 1 menit Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Pak Sudin nanti saya lanjut Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semuanya

**Yang saya hormati Pak Menteri beserta dengan jajaran
Pimpinan, anggota Komisi IV**

Yang pertama saya juga memberikan masukan karena ini kan sifatnya kita memberikan masukan kepada Menteri baru. Jadi kalau saya tidak bertanya, yang pertama Pak Menteri mengenai masalah di Dirjen apa namanya Dirjen PDS apa namanya tuh Dirjen Daya Saing, Penguatan Daya Saing. Jadi ini kebetulan Dirjenya baru kita ingin ke depannya sebenarnya PDS ini betul-betul bisa mendorong tekad dan niat dari Pemerintah agar kita menjadi eksportir perikanan dan itu harus dimulai dari penguatan daya saing kita sebagai produk perikanan *gitu*. Selama ini 5 tahun saya di Komisi IV ini melihat Dirjen PDS Penguatan Daya Saing ini memang kalau dilihat anggarannya itu kebanyakan hanya bentuk pengadaan-pengadaan. Yang menurut kami tuh pengadaan banyak juga dari laporan di daerah-daerah kurang tepat sasaran, bukan yang dibutuhkan oleh nelayan kita *gitu*.

Nah saya kira ini menjadi catatan saja Pak ke depannya agar betul-betul yang diadakan itu yang bisa menunjang atau yang bisa digunakan oleh nelayan kita. Misalnya contohnya *flake ice* ya, ini saya dapat laporan bahwa apa namanya *flake ice* ini kan apa bubuk ini ya air tawar ini air laut menjadi bubuk es. Ini banyak yang susah dioperasikan oleh nelayan karena dia tidak punya listrik yang cukup di kapalnya *gitu*. Ah ini kan maksudnya perlu menjadi catatan ke depannya ya kan? Ada gak pembanding yang lain kira-kira yang lebih murah dan produksi dalam negeri. Ini kan impor semua ini barang-barangnya ini. Ya Pak Dirjen ya? Jadi ini menjadi catatan dan kita ingin juga mendapatkan informasi kelompok-kelompok mana saja yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sehingga kita ada fungsi pengawasan. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, kita ingin ke depannya, Badan SDM dan apa namanya, Litbang itu betul-betul bisa berfungsi di daerah-daerah ya, ada UPT nya ada sekolahnya ada kampusnya sebagai mitranya nelayan ya untuk program-program bagaimana supaya nelayan itu untuk bisa lebih baik itu dalam pendidikan. Oleh karena itu berharap ke depannya, kita tidak ingin mendengar lagi masalah bantuan-bantuan diusulkan oleh anggota Komisi IV bermasalah karena apa namanya, tidak ada verifikasi atau usulan dari Dinas ini yang tidak lengkap. Kita berharap Badan Litbang dan SDM ini lah sebenarnya bisa berfungsi nanti memverifikasi calon-calon penerima bantuan agar betul sesuai dengan aturan yang ada *gitu*.

Yang ketiga yang terakhir Pak Ketua, saya ingin ke depannya Pak Menteri baru ini bisa memetakan daerah-daerah mana di Indonesia ini berdasarkan potensi perikanan kelautannya. Misalnya Bone itu daerah saya Kabupaten Bone itu, itu daerahnya tuna yak an, daerah rumput laut. Tapi sayang kemarin Pak Menteri, 3 tahun yang lalu ada bantuan pengolahan

rumput laut 17 miliar sekarang mangkrak, kesal, hanya sebenarnya setelah saya selidiki memang kesalahannya di kabupaten Pak. Jadi bantuan-bantuan besar ini banyak kesalahan di kabupaten, di bupati yang tidak menyiapkan saran prasarannya gitu. Ada juga bantuan apa namanya *cold storage* di Kabupaten Bone ini tidak berfungsi karena tidak ada air. Ini kan jadi masalah bupatinya gitu. Artinya Kementerian jangan memberikan bantuan alat apapun kepada kabupaten kalau syarat-syarat disebutkan tidak dipenuhi gitu. Karena tidak akan menjadi besi tua. Nah sekarang bagaimana itu 17 miliar di Bone ini yang rumput laut ini, ini tidak berfungsi gitu. Ini kan sayang sekali uang negara yang apa yang terbatas ini tidak menjadi sesuatu yang produktif bagi nelayan kita. Saya kira demikian Pak Menteri hanya masukan saja supaya Bapak kalau ke depannya bisa lebih baik daripada yang kemarin. *Demikian. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Mba Nue'Aeni silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

**Ketua dan para Wakil Ketua Komisi
Pak Menteri, para Dirjen beserta jajarannya.**

Pertama saya ingin menanggapi ini terkait dengan LHP ya yang disampaikan. Ya tentunya kalau menurut saya ini sangat sederhana sekali, kita sulit melakukan perbedaan perbandingan antaran rencana kerja yang 2019 dengan rencana kerja yang akan datang 2020, kita susah mengukurnya. Terus berikutnya bahwa persoalan yang disampaikan ini hasil LHP sesuai dokumen ini tidak sesederhana apa yang kita hadapi persoalan saat ini dan solusinya tidak sesederhana itu. Maka dari itu mohon ke depannya ini lebih detail lagi lebih rigid baik itu dari sisi prioritas maupun sisi rencana kerja dan alokasi-alokasi yang akan digulirkan. Saya setuju tadi yang disampaikan Pak Ono bahwa 5,5 t ini yang cukup minim anggaran di Kementerian Kelautan mohon untuk diprioritaskan kepada nelayan kita yang kecil bukan nelayan-nelayan yang besar yang modalnya juga cukup besar, itu yang pertama.

Kedua, terhadap rencana kerja saya kira Pemerintah juga sudah menetapkan ya tema ataupun prioritas, program prioritas Kementerian

Kelautan ini yang disampaikan di dokumen yang disampaikan dan dipelajari oleh kami bahwa prioritas yang disampaikan belum mengarah menukik kepada apa, tidak menangkap terhadap daya saing nelayan itu sendiri. Daya saing ekonomi. Padahal ini sangat penting sekali, bagaimana meningkatkan ekspor ikan kita keluar negeri dan lain sebagainya. Ini malah lebih kepada ada yang disampaikan prioritas ini kaitan dengan penanggulangan teroris, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut. Yang ingin saya tanyakan, ini apa benar atau memang salah cetak ya yang garis arsir-arsir ini, ini yang dibaca oleh kami bahwa ada salah satunya yaitu penanganan teroris ini maksudnya seperti apa? Arah kebijakan yang mau diambil ini mau seperti apa sih? Kenapa tidak menukik kepada persoalan peningkatan kualitas nelayan terus harga peningkatan harga nelayan, terus juga kaitan dengan daya saing nelayan dan lain sebagainya.

Berikutnya bahwa saya juga masih melihat PDB kita ini setiap 3 triwulan ketiga ini meningkat ya, apresiasi 5,85% secara pertumbuhan PDB baik pertumbuhan dan nilai PDB mengalami peningkatan. Kalau dilihat dari sepanjang tahun 2014 sampai 2018 ini kurang lebih 0,30% naiknya. Ini tidak cukup signifikan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa ditingkatkan kembali akan tetapi ini harus berimbang, dengan apa? Dengan signifikannya PDB terus juga dengan nilai ekspor kita yang cukup tinggi 4,72%. Berapa sih kontribusi terhadap nilai nelayan kita yang kecil itu. Menurut saya gini, kalau nilai ekspornya tinggi akan tetapi tidak berdampak pada penghasilan nelayan yang kecil ini juga kan juga butuh strategi, harus butuh juga intervensi kepada nelayan-nelayan yang besar agar ada *cost sharing* terhadap nelayan kita yang kecil jangan kita memikirkan saja nelayan-nelayan yang besar. Kalau nelayan-nelayan yang besar, Bapak, pengusaha-pengusaha itu gak harus diberikan *push* dari Pemerintah juga sudah jalan sendiri. Tapi nelayan kita yang kecil-kecil ini, kita yang harus pikirkan itu, dari sisi permodalan, asuransinya, pembinaannya, dana lain sebagainya.

Yang berikutnya bahwa saya juga masih terhadap pertanyaan saya yang tempo hari kaitan dengan rencana zonasi sepertinya belum bisa menjawab apa yang saya pikirkan. Begini, rencana zonasi ini kan merupakan tata ruang laut yang memang harus dimiliki. Rencana Pemerintah yang diusulkan dalam proglenas kemarin kaitan dengan RUU tentang perubahan RUU ya pemberdayaan dan perlindungan nelayan ini kan tidak berbanding lurus dengan apa yang akan disampaikan. Ini kan butuh regulasi. Regulasi rencana zonasi ditetapkan akan tetapi masih ada saja ruang, ruang untuk adanya tambang pasir laut disana. Ini kan butuh ketegasan nih sebetulnya dari Pemerintah. Kalaupun memang kita akan melakukan perubahan regulasi

untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan tentu jangan ada *slot dong* untuk apa namanya tambang pasir yang ada di wilayah-wilayah kepulauan di pantai-pantai tersebut. Jadi tidak seimbang. Gimana mau kita melakukan perlindungan sama nelayan *wong* adanya pantai, apa tambang pasir di setiap wilayah laut saja dibolehkan kok. Nah ini saya ingin ada ketegasan izin-izin yang kaitan dengan penambangan pasir laut ini juga bisa di evaluasi ya supaya tidak merugikan nelayan kita.

Terus berikutnya bahwa masyarakat nelayan yang ada di pulau-pulau terpencil ini juga butuh perhatian, baik dari sisi konektivitas seperti jaringan arus listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya ini masih minim Pak, kenapa gak mengarah kesana gitu Pemerintah kita itu untuk memikirkan bagaimana nelayan yang hidup di kepulauan-kepulauan terpencil juga ini juga jangan sampai terlewatkan, butuh perhatian lebih dari kita dari sisi infrastrukturnya, konektivitas jaringan, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, terima kasih.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Ya terima kasih Bu Nur'Aeni. Selanjutnya Pak Made Urip, Ketua. Pak Haerudin selanjutnya Riezky Aprilia. Silakan Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan .
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Sampurasun

Pimpinan, anggota yang terhormat.

Bapak Menteri KKP beserta seluruh jajarannya yang hadir dan stakeholder perikanan juga yang hadir hari ini yang kami hormati.

Kami ingin sampaikan bahwa Pak Menteri, bahasa di Indonesia hari ini banyak para pengkaji bahwa kemiskinan nelayan itu struktural. Kira-kira tafsir sederhananya kalau kemiskinan itu struktural adalah proses kemiskinan baik disengaja maupun tidak disengaja akibat sebuah kebijakan. Kalau kita mau jujur sampai hari ini apa mereka hari ini naik dari sisi daya beli kemampuan daya beli atau tidak, walaupun tadi saya ingin Interupsi masalah nilai tukar nelayan yang tadi. Apakah itu sebuah kenyataan atau itu hanya sebuah laporan yang ilusif yang sejatinya di lapangan, nelayan kita susah. Nelayan itu bisa jual pintu rumah masa musim sengsaranya. Mungkin Bapak Menteri jauh lebih tahu daripada saya yang fokus 5 tahun memperhatikan tentang nasib nelayan ini.

Yang kedua, tentu kita ingin sampaikan sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai 45 pasal 33 ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pak Menteri kami titip tentunya apa yang disampaikan tadi teman-teman dari tadi, laut kita itu lebih banyak menguntungkan yang punya uang daripada menguntungkan para nelayan. Tentu hal ini adalah alamiah dimana yang kuat mengalahkan yang lemah. Makanya wajib negara hadir biar rakyat kita bisa terbela. Negara wajib hadir ada di tengah-tengah nelayan kita.

Yang kedua ingin kami sampaikan. Ini yang terakhir mungkin, tentang pembangunan nelayan Jabar Selatan. Di Jabar Selatan itu yang terbaik itu hanya 2 titik kira-kira. Yang pertama Pangandaran, yang kedua pelabuhan ratu. Yang kapal 5 GT bisa masuk 3 GT bisa masuk. Selain yang kedua itu, 3 tidak masuk sampai 5 juga tidak masuk. Jadi percuma ada ribuan kapal yang untuk diperbantukan untuk nelayan 3 GT, 5 GT untuk di Jabar Selatan karena di sana tidak masuk karena tidak ada pelabuhan menjadi tempat pendaratannya.

Yang kedua, skema pembangunan Jawa Barat ini, di Selatan itu jauh lebih tertinggal daripada Utara. Nah tentu kami.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Pimpinan, mengulangi maksudnya kapal yang diharapkan disana seperti apa Pak?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Kalau dari sisi kapal, agar bisa terakses masyarakat disana sesuai dengan sarana prasarana yang ada. Kalau sarana prasarannya hanya bisa kapal ketingting kata almarhum Pak siapa itu Pakdhe Nawir cukup Pak tingting saja. Tapi mereka bisa nelayan. Walaupun mereka itu kapalnya hanya tidak bisa lepas dari sisi apa, pencarian ikannya tapi mereka tetap bisa hidup. Yang paling pertama itu kita bela itu adalah rakyatnya, mereka bisa hidup, yang kedua, mereka bisa sejahtera. Skema besar tentang nelayan mandiri, nelayan sejahtera adalah harapan kita. Dan ini juga harapan saya dan saya sampaikan pada sore hari ini kepada Pak Menteri menitipkan Jabar Selatan baik dari infrastruktur pelabuhan kita maupun sampai nelayan kita. Mungkin kedepan dalam rapat-rapat selanjutnya kami sampaikan secara lebih detil. Tapi cukup hari ini kami cuman bisa sampaikan tentang gambaran abstraksi

nya tentang kondisi Jabar Selatan itu. Terima kasih. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Ya terima kasih, kami persilakan Bu Riezky Aprilia.
Pak Johan

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

**Pimpinan yang saya hormati
Pak Menteri beserta seluruh jajaran**

Yang pertama saya ingin membaca catatan saya bahwa kita punya Perpres nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Itu mengamanatkan agar terjadi kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk industrialisasi perikanan kita. Produksi pertanian kita itu lebih banyak 1,5 dibanding dengan Vietnam tetapi eksportnya lebih banyak Vietnam dibanding kita. Ini apa artinya? Bahwa hasil perikanan kita itu belum memiliki daya saing yang tinggi. Itukah penyebabnya dalam realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 per 18 November 2019, realisasi Dirjen PDS itu paling kecil dibanding dengan Dirjen-Dirjen yang lain. Apakah Dirjen ini tidak bisa menggunakan uangnya secara baik sehingga daya saing perikanan kita menjadi turun, nah mohon penjelasannya Pak Menteri

yang kedua soal garam ya. Persoalan garam rakyat kita itu kan tidak bisa diserap oleh industri Pak karena apa? Karena *spec* garam kita ini tidak masuk padahal apa namanya itu, industri lah yang menjadi pasar utama dari garam rakyat kita. Di dapil saya ada 2 gudang garam Pak, bukan rokok, gudang garam, gudangnya garam di Bima dan Labuan Bontong, Sumbawa. Itu kalau kita lihat Pak, kalau kita lewat situ, kasihan kita lihat rakyat itu Pak, produksi garamnya melimpah tetapi mereka untuk akses garam di ladang garam saja mereka tidak punya akhirnya malahan lebih mahal ongkos angkutnya dibandingkan dengan harga garam. Saya ingin bertanya saja gimana langkah-langkah dari Kementerian ini untuk meningkatkan kualitas garam kita, garam rakyat kita itu agar bisa diserap dengan industri. Beri jaminan mereka, gunakan teknologi-teknologi yang semakin berkembang ini agar *spec* garam rakyat kita itu bisa diserap oleh pasar terutama oleh industri. Itu yang kedua.

Yang ketiga saya belum melihat konsen dari Kementerian, konsesnya masih soal laut dan ikan padahal kalau kira bicara tentang areal kita disitu terutama di dapil saya pulau Sumbawa dan juga Lombok, karena saya NTB Pak. Itu kan sudah banyak pulau-pulau kecil itu menjadi tempat wisata. Di Lombok ada Gili Trawangan, di tempat, di Sumbawa ada Pulau Moyo namanya. Ada gili-gili kecil yang kemudian disitu tapi konsen Kementerian belum saya lihat pada pengoptimalisasikan jasa-jasa lingkungan sebagai pendapatan negara padahal pulau-pulau kecil itu sekarang baik di NTB, NTT itu banyak menggunakan pulau-pulau kecil. Nah ini kan masih dalam lingkup kerja kita karena yang membentuk zonasi kita, yang memberikan izin tentang penggunaan pulau-pulau kecil kita, tetapi itu belum bisa kita lihat secara optimal dalam pengembangan industri pariwisata.

Yang berikutnya adalah mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh apa tentang Pak Haerudin tentang kemiskinan yang struktural itu. Ibaratnya kalau kita melihat masyarakat miskin dan lingkungan kumuh, pergilah ke pesisir. Padahal banyak lekuk-lekuk pantai kita itu yang bisa kalau di NTB Pak kita sudah menetapkan beberapa daerah pesisir itu sebagai Dewi namanya, Desa wisata ya. Di kampung saya ada satu titik namanya desa Labuan apa Labuan Jambu. Kita punya hiu spesifik disitu Pak. Kami menyebutnya tuh apa pakek torok atau hiu paus ya. Itu setiap hari bisa dilihat kalau misalnya apa dengan lampu dengan apa itu bisa menjadi objek wisata. Kalau kita misalnya pergi ke Belanda misalnya belum lengkap kita ke Belanda kalau belum ke Volendam misalnya. Kenapa pesisir-pesisir kita ini tidak bisa kita *create*, kita rubah, kita tata secara baik agar dia menjadi desa-desa wisata.

Nah saya membayangkan seandainya misalnya dibuka ruang, saya ingin mengajukan misalnya desa Labuan Jambu ini sebagai desa wisata yang bisa menjadi pilot projek penataan kawasan pesisir kita. Nah karena di depannya itu Pak ada biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO itu teluk Saleh. Teluk Saleh itu adalah surganya apa surganya kerapu. Ada 9 atau 13 jenis kerapu disitu dan itu juga perlintasan dari perpindahan *dolphin* itu. Itu indah sekali dan ditetapkan sebagai biosfer dunia. Saya ingin meminta penjelasan dari Pak Menteri ada tidak misalnya sentuhan atau apa dari Kementerian tentang pengembangan kawasan teluk Saleh agar dia kemudian tidak hanya menjadi judul biosfer dunia tetapi kemudian disitu juga ada ubur-ubur, disitu apa ya sebenarnya tidak cocok lah untuk itu tetapi karena sudah ditetapkan sebagai biosfer dunia bersamaan dengan Tambora diatasnya sebagai apa yang punya UNESCO itu, itu agar bisa ditata secara baik sehingga laut kita bukan hanya bicara tentang ikan, bukan hanya bicara tentang garam, tapi

kita juga bicara tentang destinasi wisata yang kemudian menarik, apa, menambah penghasilan negara. Terima kasih, *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Ya terima kasih. Pak Slamet selanjutnya habis Pak Slamet nanti siap-siap Pak Budhy.

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri, dan beserta jajaran yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Jadi ini programnya ya cukup besar lah angkanya kira-kira tertulis 785 miliar. Ini berupa banyak bantuan sehingga saya mengusulkan kepada Pimpinan kita untuk sebagai fungsi pengawasan kita ingin memastikan bahwa seluruh bantuan-bantuan yang sudah diberikan di 2018 itu barangnya ada dan kita ingin mendengarkan langsung penerima bantuan itu, apakah memang memberi manfaat atau tidak. Oleh karena itu mungkin ini Pimpinan mengusulkan saya untuk ke depan dilakukan kunjungan spesifik kepada penerima-penerima ini. Tentunya turunan dari kegiatan ini adalah kita minta data dari seluruh penerima bantuan sehingga kita dalam fungsi pengawasan kita ingin memastikan bahwa ini diterima dan memberi manfaat. Itu yang pertama

Yang kedua, terkait dengan rancangan kegiatan di tahun depan mungkin kita-kita yang baru di Komisi IV itu ada program asuransi nelayan, bantuan premi, kalau asuransi nelayan untuk 20 ribu nelayan, bantuan premi 150 ribu nelayan. Pertanyaannya kita tentunya apakah namanya SOP atau aturan atau apapun yang kira-kira untuk menentukan 20 ribu, 150 ribu tuh ukurannya apa? Sehingga kita dalam bicara dapil mungkin dapat mempertimbangkan terutama dapil-dapil yang memang mempunyai daerah nelayan sehingga perlu kita sebagai fungsi pengawasan sekaligus juga mewakili dapil perlu mendapatkan gambaran, kriterianya apa saja untuk mendapatkan ini, apakah seluruh nelayan pasti itu, atau ada pilihan-pilihan tertentu, itu.

Dan berikutnya terkait dengan apa, saya ingin menanyakan terkait dengan program atau penguatan fungsi BPBAT. Di dapil saya, Sukabumi ada BPBAT tetapi pengamatan saya justru tidak memberikan. Akhir-akhir ini tidak memberikan penguatan yang signifikan. Kalau dulu ceritanya pasar ikan di Cisaat, di Sukabumi itu cukup terkenal dan ramai tapi sekarang sangat sepi padahal disitu ada BPBAT. Saya ingin mendapatkan gambaran penguatan-penguatan apa, program yang dilakukan Kementerian ini terkait dengan BPBAT yang ada di Sukabumi.

Dan yang terakhir, tadi dipaparkan dari temuan BPK. Mohon maaf, temuan BPK itu hampir semuanya MKP sudah memberikan sanksi kepada pengguna anggaran dan juga BPK. Dalam fungsi pengawasan sekali lagi, saya ingin mendapatkan data pejabat mana saja yang sudah diberikan sanksi, kita kan hanya mendapatkan gelondongan sudah diberikan sanksi, kita ingin mendapatkan data pejabat mana yang sudah mendapatkan sanksi dan sanksinya apa. Nanti kata, ini kan temuan yang kemarin nanti akan kita lihat di pengawasan di tahun-tahun berikutnya. Itu saja Pimpinan catatan dari saya dan juga permintaan data. Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih. Pak Budhy silakan.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Ya terima kasih Pimpinan.

Dalam paparan Pak Menteri tadi menyangkut nilai tukar nelayan. Memang kalau data BPS terjadi peningkatan nilai tukar nelayan kita terutama nilai tukar nelayan ini 3 tahun belakang memang terjadi peningkatan. Hanya memang seperti yang tadi disampaikan, ironis dengan adanya kemiskinan struktural, artinya memang nilai tukar nelayan ini bukan tolak ukur kesejahteraan tetapi arah menuju kesejahteraan nelayan ya *road map* nya mengarah kesanya. Tapi kalau peningkatan nilai tukar nelayan ini kita bandingkan dengan subsidi yang diterima oleh nelayan seperti subsidi solar, nampaknya ini gak naik juga Pak. Kalau kita bandingkan dengan subsidi yang diterima ini kan karena faktor subsidi juga ikut mempengaruhi nilai tukar nelayan. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa anggaran yang diberikan oleh APBN untuk Kementerian Bapak ini boleh dibilang terlalu kecil untuk kawasan perikanan yang Bapak kelola. Contoh di perikanan tangkap 30 unit kapal ukuran 5 GT, kalau setahun kita bisa kasih seperti itu mungkin agak

lama Pak kita apa namanya bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan ini.

Oleh karena itu lebih lanjutnya saya ingin tahu, langkah-langkah Kementerian Kelautan Perikanan dalam rangka menggalang *domestic direct investment*. Karena anggaran Pemerintah sebesar apapun dengan potensi kita yang sedemikian luar rasanya berat untuk mengejar itu. Apalagi di tengah sekarang ini kita memasuki masa bonus demografi dimana produktivitas sangat dituntut, Angkatan kerja kita lagi banyak-banyaknya. Puncaknya 2008 sampai 2030, hanya 2 tahun saja puncak kita menikmati bonus demografi. Artinya kalau kita mau genjot laju pertumbuhan perekonomian dari sektor nelayan maka harus ada langkah-langkah yang Bapak harus lakukan untuk menggalakkan *domestic direct investment*. Saya ingin tahu langkah-langkah itu seperti apa, upaya untuk menggairahkan *direct investment* di domestik tersebut. Mungkin ke depan Pak, ada baiknya kalau Rapat Kerja, Bapak bisa tampilkan juga *slide* mengenai investasi tersebut. Jadi kita bisa tahu berapa sih kontribusi *domestic direct investment* kita di dalam laju pertumbuhan perikanan kita. Demikian. Terima kasih.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Ya Makasih Pak Budhy. Pak Firman? Keluar? Pak Muslim, ya silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Menteri beserta jajarannya

Pertama tadi saya ingin memberikan apresiasi Pak Menteri yang begitu semangat ya berkaitan izin ya. Saya tertarik karena terus terang ini menjadi *problem* yang luar biasa. Tadi saya lihat Pak Dirjen tangkap sudah memberikan gambaran ada sekitar 2183 kapal yang belum memperpanjang izin ya. Saya pikir ini juga seperti apa nanti ya kita harus dorong sehingga ada manfaat buat pendapatan negara. Yang kedua, ada sekitar 1000 kapal yang belum mendapatkan rekom dari KKP. Ini juga bisa digambarkan apa sih persoalannya sehingga sampai hari ini belum dapat rekom. Dan saya yakin masih banyak yang lain-lainnya.

Yang kedua saya masuk kepada Dirjen Budidaya ini. Terus terang yang ingin saya sampaikan misalnya di daerah saya Pak, di Aceh ya khususnya di beberapa kabupaten. Itu di tahun 2018 itu ada sekitar 100 ribu

ton Pak hasil daripada udang Vaname. Selama ini terus terang kita terkendala itu menyangkut pakan. Disini saya lihat disini ada juga program daripada mesin pakan dan lain-lain ya. Selama ini kita tergantung dari Sumatera Utara, bahkan yang sangat dominan adalah perusahaan yang itu PT. Charun Bhopal dan mereka menguasai. Saya berharap nih kita berharap KKP juga punya peran disitu, kenapa? Karena kasihan ini masyarakat nelayan. Dan saya baru pulang minggu lalu dari Aceh Pak, itu produksi vaname luar biasa Pak tapi mereka sangat sulit mendapatkan khususnya pupuk dan segala macam. Mereka harus tergantung Sumatera Utara bahkan harus tergantung perusahaan tertentu. Ini kita harap nanti dari pihak KKP bisa mencari solusi apakah membangun sentra-sentra pakan, Pak Menteri. Ini saya pikir ini solusi yang terbaik buat KKP jadi sehingga masyarakat nih terus terbantu sehingga mereka juga bisa meningkatkan pendapatannya. Kalau gak akhirnya petani tidak akan pernah bangkit dari kondisi yang ada.

Yang kedua, saya ingin masuk kepada Dirjen berkaitan dengan konservasi, saya lihat tadi di Dirjen PRL. Disini tadi saya lihat ada penetapan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini ada sekitar 700 ribu hektar, ini seperti apa? Nanti bisa dijabarkan oleh Pak Dirjen ya. Saya ingin memberi contoh Pak Menteri, saya waktu itu ke Banyuwangi, kebetulan sahabat kita disana yang jadi Bupati itu ada kawasan konservasi laut yang dikelola oleh karang taruna, ada sekitar 25 hektar itu mereka tidak boleh mengambil apapun disitu. Itu mereka bikin objek pariwisata. Disitu mereka bikin *snorkeling*, bikin *diving* itu pendapatan luar biasa dikaitkan dengan pariwisata, Pak Menteri. Itu boleh dilihat, jadi kawasan konservasi yang 25 hektar itu mereka kalau ada ikan hiu pun yang kejar-kejaran mereka ambil, mereka masukkan ke konservasi lagi. Itu yang datang ribuan orang. Misalkan KKP punya peran disini saya yakin itu juga memberi solusi. Nanti dibuatkan di Aceh mungkin, dibuatkan di Jawa. Jadi juga memberikan solusi dan bisa diberikan modal buat mereka. Itu padahal mereka perannya dari anak-anak muda semua khususnya anak-anak milenial yang ada di Banyuwangi itu saja. Saya sudah lihat sendiri Pak. itu sebagai contoh.

Kemudian berkaitan tadi Dirjen bidang persaingan usaha ya? PDS ya? Saya melihat disini sebenarnya harus punya peran strategis ya. Saya lihat disini banyak poin-poin termasuk juga pengadaan segala macam, *cold storage*, ada juga *freezer*. Ini kita berharap yang telah disiapkan oleh Dirjen PDS ini bagaimana (suara tidak jelas) dimaksimalkan. Jadi sehingga pemanfaatan-pemanfaatan yang ada ini betul-betul kepentingan daripada nelayan, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentu kita akan dorong semaksimal mungkin ya kita berharap mumpung Pak Menteri masih baru ini,

Pak Menteri masih semangat tentu kita akan dukung semaksimal mungkin sehingga yang selama ini belum maksimal, yang mangkrak-mangkrak ini harus dijalankan kedepan. Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Duka, mana Pak Duka? Pak Suhardi ya? Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri bersama seluruh jajaran.

Setelah mencermati hasil audit 2019 saya berpandangan bahwa ini calon *disclaimer* kalau tidak diperbaiki betul-betul. Dan saya kira ini kerja pertama Menteri secara internal untuk mengendalikan keuangan dan pengelolaan keuangan dan aset di KKP. Dan pengalaman sudah *disclaimer* beberapa tahun. Saya kira untuk 2020 nanti kita berusaha untuk Wajar Tanpa Pengecualian.

Kemudian yang kedua, rencana 2020 juga saya melihat kurang mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat. 6 triliun KKP, 60% habis di KKP sendiri, hanya 40 yang dalam bentuk bantuan, dalam bentuk berbagai macam yang langsung ke masyarakat. Saya kira rakyat itu yang dibutuhkan adalah fasilitas. Fasilitas yang membantu katakanlah seperti pelabuhan, *cold storage* tadi kemudian dalam bentuk bantuan itu yang dibutuhkan rakyat. Kemudian juga aturan, regulasi yang memihak kepada mereka sehingga memungkinkan untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk bisa menyejahterakan mereka. Kita ketahui bahwa di akhir-akhir ini masyarakat yang banyak miskin itu adalah nelayan. Jadi tugas ini adalah tugas kemanusiaan untuk bisa mengentaskan kemiskinan mereka, maka kerja di KKP ini sangat penting.

Saya kembali kepada koral tadi. Saya akan kembali ke dapil sekitar tanggal 15. Dan ini pasti saya ditanyakan, bagaimana ini. Olehnya itu saya butuh jawaban Pak Menteri terhadap kebijakan yang SMS tadi itu atau yang WA tadi itu ya. Kita ketahui bahwa mereka-mereka ini dulu sejahtera, naik motor. Karena pergi di laut ambil 1 biji, dihargai dengan 50 ribu, sekarang dihargai hanya 10 ribu ya. Diantara koral yang ada di laut ini ada 50 mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa dia ambil dalam 1 hari. Karena yang dicari itu hanya yang indah saja karena itu tidak bisa dikonsumsi, hanya untuk dipajang di dalam akuarium. Olehnya itu Pak Menteri saya kembali ingin ada

jawaban yang tegas terhadap kebijakan ini. Saya minta supaya yang di dalam kawasan konservasi kita sama-sama hormat dan sama-sama jaga. Tapi diluar konservasi atau kawasan budidaya itu kita bisa untuk berikan kebijakan ekspor untuk bisa dimanfaatkan oleh para nelayan kita. Terima kasih. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh* .

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih. Sekarang ganti supir cadangan yang ketiga. Biar gak ngantuk. Yang berikutnya Pak Krisantus.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi IV

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.

Ya Komisi IV sudah mulai familiar dengan salam itu Pak.

Saya menanggapi pertanyaan saya pada RDP yang lalu, jadi saya agak *slow* sedikit Pak, santai saja Pak, tenang. Saya bersyukur Pak Ketua tidak ada. Nanti saya sampaikan loh, dia harus ada kalau gitu. Biasa ditegur kalau saya keras dikit. Jadi ini lembut lah. Jadi memang gaya bicaranya sebenarnya bukan marah, bukan apa. Jadi saya menanggapi jawaban minggu lalu Pak tentang danau Lait dan danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya mohon maaf kepada kawan-kawan saya agak sering bicara sektoral. Tetapi saya pikir kalau masing-masing kita Komisi IV bicara sektoral digabungkan menjadi nasional.

Jadi di jawab tadi, ada program pendaratan ikan dengan anggaran 2,3 miliar di Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu saya sampaikan bahwa dengan anggaran 2,3 miliar dengan luasan Kalimantan Barat, dengan dialiri oleh sungai terpanjang di Republik Indonesia ini tentu tidak berarti apa-apa Pak Menteri. Dan tadi saya tanya teman-teman Pak Menteri nih mantan Ketua Komisi IV. Saya pikir tentu pemikirannya masih Komisi IV.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Benar Pak, masih anggota Komisi IV.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Masih anggota Komisi IV? Ah kalau anggota Komisi IV saya pikir lebih afdol lagi dan tentu rapat kita juga tidak berkepanjangan karena apa yang kami pikirkan tentu sudah dipikirkan oleh Pak Menteri, itu harapan kami. Sehingga kalau pola pemikiran Pak Menteri dan pola pemikiran teman-teman saya di Komisi IV ini sama dengan pemikiran Pak Menteri, saya pikir sejahteralah nelayan. Kan begitu. Oleh sebab itu kami di Provinsi Kalimantan Barat Pak, profesi sebagai nelayan tuh adalah sebuah profesi yang tidak bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan profesi sebagai nelayan apalagi di daerah perhuluan, yang tidak ada laut saya yakin akan menjadi kelaparan. Dan saya mempertanyakan tentang jawaban ini. Jadi untuk danau Sentarum saya perlu informasikan kalau sistem be, pakai beje sistem Pak, danau Sentarum itu luas seluruh kawasannya 1 juta hektar. Kemudian danau sendiri yang dalam 4.0 sampai 4,5 meter. Itu seluas 127.393 hektar, itu luasnya. Kalau mau pake beje mau seluas apa bejenya? Beje sistem. Jawabannya pakai beje sistem ya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak beje sistem apa Pak?

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Saya juga gak ngerti beje sistem ini. Jadi dibikin kolam kayaknya untuk nampung ketika kemarau air mengalir air mengalir ke tempat yang lebih rendah, begitulah kira-kira.

Jadi saya tanya pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan ini Pak. Berapa luas mau bangun beje sistemnya dengan luasan danau seperti itu? Nah kira prihatin disini disebutkan bahwa ikan mati, ikan sepat, ikan gabus, ikan botok, itu ikan yang *ndak* hitung kalau disana. Pak Ketua Komisi, pada waktu rapat RDP yang lalu mengatakan bahwa Bapak kan tahu ikan semah, ikan kalau di Jakarta ini sekitar 8 juta per kilo, ikan semah itu. Kemudian disana juga ada ikan red arwana, tentu kita semua mengetahui, dan itu adalah ikan-ikan yang saya pikir perlu diselamatkan. Itu baru luasan danau Sentarum. Kemudian danau Lait, Kabupaten Sanggau. Luasnya 80 eh..700 hektar, luasnya 700 hektar, kedalamannya 4,5 meter. Itu juga terjadi hal yang sama.

Oleh sebab itu harapan saya tentu Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa kepemimpinan Pak Menteri yang mantan Ketua Komisi IV

bias menjamah sampai kesana. Saya yakin dan percaya kalau seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan program yang betul-betul menyentuh dan sesuai dengan karakteristik daerah tentu Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri bisa menjadi lebih baik kedepan. Tentu dengan pengalaman Bapak sebagai legislatif dan sekarang sebagai eksekutif tentu akan menjadi modal yang tangguh dalam memimpin Kementerian yang Bapak pimpin. Jadi itu saja yang saya tanyakan, bagaimana bikin beje sistem itu dengan luasan danau yang sangat luas. Saya pikir itu. Terima kasih Pimpinan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.*

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Saya *ngebayangin* danau luasnya 700 hektar. Baik yang berikutnya Pak Ansi Lema, tidak ada? Pak Abdullah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya.

Ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab dan untuk salah satunya adalah soal lumbung ikan nasional. Saya kira juga hari ini juga tidak perlu dijawab, kapan saja baru bisa dijawab. Karena apapun juga setiap kali ada pertemuan, ada rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu pasti ditanyakan oleh masyarakat seperti apa keputusannya. Ini kan namanya masalah data, masalah surat-menyurat itu maka ada surat-menyurat yang saya harapkan agar Kementerian dapat mencatatnya apa benar apa atau tidak. Saya kira ini yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Maluku, salah satunya itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Maluku nomor 19 tahun 2014, tanggal 4 September 2014 tentang pembentukan badan pengelola lumbung ikan nasional provinsi Maluku.

Tanggal 2 Desember 2014 dikeluarkannya surat Menteri Sekretariat Kabinet RI nomor: B, data 556/SesAB/12/2014 sebagai izin prinsip untuk menyusun PerPres oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Satu lagi dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 34 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang panitia antar Kementerian penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang lumbung ikan nasional provinsi Maluku. Satu lagi, Rancangan Peraturan Presiden M-link telah

disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor B.621/Men-KP/IX/2015 tanggal 29 September 2015. Dan menurut informasi suratnya sudah di paraf dan ada di Kementerian pada saat Ibu Susi. Ah ini cuman informasi saja, minta dikoreksi kapan saja, gak ada informasi untuk kita.

Yang kedua, saya kira semuanya ini untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di Provinsi Maluku seperti apa yang saya katakan, sampaikan bahwa potensi sumber ikan nasional itu sekitar 12 juta ton per tahun, diantaranya 4 juta ton per tahun ada di Maluku. Ini belum digarap secara maksimal *toh* digarap saja mungkin saya kira data ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan saya kira data itu ada silakan saja di cek tapi kita harapkan bahwa potensi ikan ini ada di Maluku. Kegiatan-kegiatan terkait dengan potensi tuna, ikan layang, maupun potensi ikan lainnya pada saat musim ikan ini bahkan dibuang oleh masyarakat sampai puluhan tahun. Diharapkan agar mungkin bisa difasilitasi lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu ada industri-industri ya termasuk offshore mungkin pabrik ikan kaleng dan lain-lain silakan tapi ini diangkat di program pandanglah kegiatan-kegiatan akan datang.

Yang kedua, salah satu titipan lagi, soal moratorium. Ini ada Peraturan Menteri nomor tahun 2015 tentang larangan terhadap masyarakat ya dalam arsiran yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri dilarang menangkap ikan tuna yang sirip kuning padahal Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, itu kegiatan sehari-hari masyarakat disana salah satunya adalah penangkapan ikan tuna sirip kuning. Tapi kalau *toh* aturan itu tetapi berlaku maka diharapkan ada perkecualian. Karena dilarang sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Kalau *toh* masih tetap dipakai Peraturan Menteri nya itu maka perkecualian untuk masyarakat yang ada disana. Kalau tetap berlaku maka pendapatan masyarakat khusus untuk pencari tuna selama 3 bulan itu tidak, tidak bisa melaut. Ah itu harus ada jalan keluar dari Kementerian, kira-kira dalam 3 bulan ini seperti apa? Itu yang mungkin harapan dari masyarakat karena apapun juga potensi tuna yang ada disana sangat cukup besar. Ada moratorium tapi kapal-kapal penampung yang dari Bali dimana-mana itu masih tetap membawa, mengangkut, ya ikan tuna yang sirip kuning. Ya kalau dilarang, ya dilarang benar. Kalau dibiarkan ya kasihan masyarakat. Masyarakat nangkap dilarang penimbangan pada kapal-kapal itu. Dan itu ada pada aparat perikanan ada di Kabupaten maupun ada di Provinsi. Mungkin diharap ada kejelasan biar semuanya jalan dengan baik, dia tidak menjadi kondisi stabilitas satwa tuh ada di daerah. Saya kira itu, demikian Pak Menteri. Terima kasih.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Makasih. Memang *problem* kita itu secara umum hari ini kan seluruh masalah itu bermuara ke laut. Sungai pencemarannya disadari tidak disadari bermuara pada problematika laut. Tradisi masyarakat hari ini yang serba-serba plastik dan semuanya rata-rata membuang sampah ke sungai bermuara ke laut. Pembalakan liar bermuara ke laut, penambangan bermuara ke laut. Dan kira hari ini dari sisi kesehatan hampir hari ini ada kecemasan bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi mengkonsumsi ikan. Karena ikan di danau air tawar pun sudah tercemar merkuri, kemudian pakannya terlalu berlebihan, ikan di sungai sudah tercemar, ikan di laut mungkin saja juga tercemar.

Nah kemudian juga menurut saya yang harus menjadi fokus kita hari ini adalah menurunnya keinginan orang untuk menekuni profesi orang tuanya dianggap tidak menjanjikan. Menurut saya Pak Menteri, itu *problem* nya satu, pendidikan di Indonesia itu gak pernah menghargai aspek yang bersifat lingkungan yang membesarkan orang tuanya dan membesarkan dirinya. Kalau dia anak petani, pendidikan Indonesia menjauhkan anak-anak menjadi petani. Karena ilmu biologinya tidak ada relevansi dengan pertumbuhan ikannya, pertumbuhan padinya, pertumbuhan tanaman karetinya. Tidak ada biologinya hanya saja di ujian dan tidak bermanfaat. Begitu juga ilmu kelautan nyaris anak-anak nelayan itu tidak memiliki, tidak dihormati di sekolahnya karena pelajar sekolah di pinggir pantai dengan pelajaran sekolah di gunung sama. Nah barangkali ke depan mari kita bersama-sama nanti buat diskusi kecil bagaimana menjadi anak nelayan sejak 1 SD pendidikan utamanya adalah mengenal laut, mencintai biota laut, kenalkan teknologi perkapalan, kemudian diperkenalkan dengan teknologi nelayan termasuk *marketing* nya. Dan sekolahnya diarahkan pada membangun *entrepreneurship* kelautan, buka kaya sekarang ini. Mungkin sekarang karena Menterinya dari ahli-ahli yang sudah menciptakan Go-Jek, jangan sampai orang lain menciptakan lagi pengen jadi Go-Jek semua. Lah ini barangkali hal yang harus menjadi bahan pertimbangan kita semua karena saya punya kecemasan, Indonesia ini semuanya ber *problem*. Dan selanjutnya..

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A):

Pak Ketua, saya izin sebentar ke belakang.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

oh, *mangga* Pak. Selanjutnya Pak Ono gak ada? Pak Ono gak ada, dan setelah Pak Ono gak ada, ah dari Pak Ono ke Pak Sutrisno. Mau nunggu Pak Menteri ke belakang, istirahat dulu, mau Bapak langsung ngomong? Mau langsung? Boleh, langsung saja Pak. Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Kan ada Sekretaris Jenderal.

Terima kasih Pak Pimpinan

Para pejabat Eselon I KKP

Saya akan fokus langsung pada materi fungsi pengawasan. Bicara pengawasan akan berhasil dengan baik Pak Sekjen apabila tersaji dokumen ya, dokumen yang valid tentunya dan yang akurat. Nih Pak Pimpinan, sAya kok buka-buka dokumen? Judulnya evaluasi hasil pemeriksaan BPK 2019 isinya adalah LHP 2018. Semua cerita tidak diceritakan dimana terjadi padahal tujuan amanat konstitusi wajib dewan itu menindaklanjuti LHP BPK. Temen saya katanya suruh berhenti dulu Pak Pimpinan. Saya skors dulu deh. Senior mau ada dibicarakan. Tunggu dulu Pak Menteri.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Mau teruskan? .

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saran senior suruh tunggu Pak Menteri aturan.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Oh tunggu Pak Menteri, atau gak ada Pak Menteri Pak Ono mau ngomong, silakan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan, kalau Raker ya harus ada Pak Menteri. Kalau Pak Menteri izin kencing, merokok, apa segala macam, di skors dulu.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Tadi sudah saya tawarkan, Bapak pengen langsung ada Sekjen gitu. Nanti nunggu Pak Ono kalau Pak di luar, di skors dulu rapatnya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Baik Pak Menteri, tadi saya sudah.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Sebentar dulu, skors nya belum dicabut. Silakan meneruskan kembali.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya sudah membuka tadi dan saya fokus pada materi rapat hari ini yaitu tentang fungsi pengawasan dewan. Bahwa pengawasan akan berhasil dengan baik manakala kita tersaji dokumen yang akurat dan valid. Nah persoalannya adalah dokumen yang disajikan pada kita yaitu bicaranya judulnya adalah evaluasi hasil temuan BPK 2019, di dalamnya adalah LHP tahun 2018. Memang harusnya itu LHP 2018 dulu. Sangat disayangkan tidak maksimal juga materinya, terjadinya dimana, persoalannya apa, padahal pengawasan ini adalah bagaimana supaya kejadian itu tidak terulang kembali pada periode yang kedepan sehingga sangat wajar manakala Pak Suhardi Duka mengatakan ini calon-calon *disclaimer* nih, itu. Karena persoalannya kita juga tidak bisa memproteksi bagaimana kebijakan yang harus dilakukan, gitu. Mohon disikapi ke depan karena mitra yang lain sudah benar tuh. LHP 2018 dulu, kemudian apa namanya evaluasi tahun berjalan, dan bagaimana rencana tahun 2020.

Kurang validnya, kurang lengkapnya laporan yang juga tercermin, Pak Menteri. Ini pada realisasi APBN tahun 2019. Ini hanya 1 lembar ya, menginformasikan jumlah anggaran saja yang direalisasikan. 70 koma sekian persen ya. Kita tidak tahu anggaran yang 70 koma sekian persen itu apakah berorientasi untuk publik? Jangan-jangan untuk bayar pegawai, tapi juga honor untuk penyuluh pun juga apa namanya, terlambat dibayarkan. Mestinya kita tahu karena berapa pun uang yang diluncurkan kepada apa Lembaga Pemerintah, orientasi tujuan akhirnya adalah bagaimana merubah kehidupan rakyat lebih baik lagi. Dan oleh karena itu di tahun 2020 saya juga ingin menyampaikan, Pak Menteri, ini sangat luar biasa nih ya. 2020 nih Bapak kasih pagu lebih daripada yang memang tahun berjalan. Saya

mencatat ini kenaikan luar biasa, ini perikanan tangkap into naiknya 47%, perikanan budidaya naiknya 39%, dan pengelolaan ruang laut juga 59%, yang paling besar di pengawasan 100%. Pertanyaannya adalah adakah korelasinya ini dengan peningkatan produk perikanan? Adakah korelasinya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi? Adakah korelasinya dalam mana apa, mencegah tidak terjadinya defisit neraca perdagangan? Dan apakah ada korelasinya dengan tidak melakukan penekanan pada devisa negara?

Saya akan buka target capaian. Ini target capaiannya dengan penambahan anggaran yang luar biasa itu, perikanan tangkap sampai sekarang 18 November hanya 5,56 juta ton, saya tidak tahu sampai akhir Desember berapa. Diprediksikan tahun depan 2020 8,02 dengan penambahan anggaran yang hampir 50% dari anggaran yang tahun 2019. Kemudian pembudidayaan itu, itu diprediksikan 12,99 mohon maaf, diprediksikan 7,45. Kemudian total produksi perikanan 26,46. Sedangkan 2019 hanya mampu di realisasikan dari tabel ini hanya 18,56, 2018 24,49 dan ternyata KKP dari 2015 sampai 2019 melakukan impor ikan. Nah oleh karena itu pernyataannya adalah karena terjadi peningkatan anggaran untuk KKP ini dan tentu harapannya adalah manakala yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu menjadi catatan untuk Kementerian KKP untuk merubah anggaran agar berorientasi pada peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan rakyat, mestinya kami mohon ada jaminan bahwa 2020 tidak akan terjadi impor ikan. Mohon ada jaminan bahwa target-target capaian ini kalau dari data-data ini mestinya tidak harus terjadi impor ikan. Itu terkait masalah perikanan.

Terakhir Pak Menteri, saya malu jadi orang Indonesia, negara maritim tapi masih harus impor garam. Nah ini saya dapat data, garam rakyat ini 2.350.000 ton, garam dan PT Garam 450 ribu ton. Tadi bicara efisiensi nih, ternyata rakyat lebih efisien dalam memproduksi garam. Itu per hektar nya 94 ton, sedangkan PT Garam hanya 75 ton. Oleh karena itu dalam konteks daerah otonomi daerah, peran Pemerintah, peran Pemerintah sudah berubah, bukan lagi penggerak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sutrisno

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ya sedikit lagi Pak Sudin, hanya ini saja Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sedikit lagi ya, karena ini masih ada 17 penanya karena saya harapkan sebelum magrib semuanya selesai.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Setengah menit tanggung Pak, masalah garam Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya lanjut.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Kebutuhan dasar masyarakat. Jadi rakyat 94 per hektar, PT Garam hanya 75. Karena peran Pemerintah Daerah Otonom berubah bukan lagi penggerak tapi juga memfasilitasi, KKP agar memberi dorongan kepada apa namanya..rakyat untuk memproduksi garam dan supaya mengurangi impor garam. Kita negara maritim, malu, masa hanya garam saja di era teknologi gak bisa membuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan beserta seluruh rekan-rekan anggota dan Pak Mentei beserta seluruh jajaran yang saya muliakan.

Sedikit saja, saya hanya ingin memperkuat saja atau mendukung apa yang Pak Ketua sampaikan tadi menyangkut dengan tenggelam kapal, penenggelaman kapal yang seolah-olah selama ini di KKP yang begitu heboh dengan kehebatan penenggelaman kapal. Sehingga kemarin saya baca di media begitu ada dari KKP ada rencana tidak menenggelamkan kapal malah menjadi *bully-an* di serang publik. Maka izin pada kesempatan ini, sebagaimana yang didukung oleh Pak Ketua Komisi tadi di awal, agar itu menjadi masuk dalam rekomendasi kita hari ini Pak Ketua, bahwa kita sepakat untuk tidak menenggelamkan kapal lagi tetapi kecuali hal-hal case-case tertentu sehingga bisa kita manfaatkan kapal-kapal yang ada.

Karena dari data yang kami dapat hampir 488 kapal sepanjang tahun ini yang ditenggelamkan. Hanya 45 yang bisa kita sita, berarti 400 an lebih tenggelam menjadi bangkai di tengah lautan kita. Apa gak kita manfaatkan agar mungkin bisa kita manfaatkan kita serahkan seperti yang pernah yang kita diskusi tadi? Jadi kesimpulan, harapan saya agar menjadi rekomendasi kita juga pada rapat ini atau pada kesimpulan rapat kita nanti bahwa kita sepakat untuk tidak menenggelamkan kapal lagi kecuali dengan hal-hal tertentu sehingga masyarakat merasa disaat ada KKP menyampaikan tidak tenggelam kapal sehingga menjadi *bully an*, seolah-olah membiarkan kapal asing masuk, padahal selama ini saya orang baru di Komisi IV, saya terkejut juga. Selama ini saya dari Aceh, melihat hebatnya KKP bisa menenggelamkan kapal. Tapi 2 tahun berturut-turut *disclaimer* kami publik gak tahu. Jadi sudah cukup lah kita bangun negeri ini dengan pencitraan. Ini kesempatan kita untuk bekerja.

Jadi saya pikir, saya sependapat sekali saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ketua dan saya harap ini masuk dalam kesimpulan kita nanti Pak Ketua, sehingga KKP juga bukan sendiri yang ingin, yang tidak ingin menenggelamkan kapal. Tapi kita Komisi IV juga tidak ingin menenggelamkan kapal algi tetapi bagaimana memaksimalkan kapal-kapal itu kita sita untuk kepentingan negara.

Kemudian dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya yang telah dijawab. Perlu kami perjelas, selidiki lagi Pak Menteri dan seluruh jajaran yang sama-sama kita paham bahwa garis pantai di Aceh itu 2.042.422 kilometer. Dari jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan yang dia jawab menyangkut dengan pembangunan pelabuhan PPI atau pelabuhan ikan yang dibangun dengan APBD. Untuk kita sadari bersama, luas pantai atau panjang pantai 2.422 kilo tidak cukup kita mengandalkan pelabuhan-pelabuhan yang ada dan yang mengandalkan dengan uang APBD daerah saja. Maka mohon dukungan karena panjang pantai yang begitu panjang, perlu ada terminal-terminal ikan, terminal-terminal lainnya di muara-muara yang selama ini sudah tertimbun atau sudah apa namanya, sudah dangkal akibat berubahnya mata angin. Ini perlu dukungan pusat, karena kalau kita andalkan APBD saja tidak memadai. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan mengingat waktu. Terima kasih Pak Ketua yang bijaksana, saya akhiri.
WabillahiTaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Panggah, silakan. setelah itu Pak Kanjeng dari partainya Pak Menteri.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan, rekan-rekan anggota, dan Pak Menteri serta jajarannya.

Kami mencermati disini mengenai rendahnya penyerapan sampai bulan November ini masih ada yang baru 58%. Nah pengalaman, ini umumnya disebabkan karena perencanaan yang kurang matang sehingga kita dikejar selain juga hal-hal teknis. Masalah waktu ya, kita ada batas anggaran sampai Desember. Nah khususnya hal-hal yang terkait pekerjaan fisik seperti bangun gudang, bangun dermaga ya kemudian bangun kapal ya itu juga termasuk pekerjaan-pekerjaan yang waktunya itu sudah tidak kadang-kadang tidak bisa dikejar karena nih pekerjaan yang sangat fisik gitu. Nah kami ingin tahu terkait dengan perencanaannya.

Saya kadang dulu membayangkan ini perencanaannya seperti apa setelah kapal ditenggelamkan, cantrang dilarang, *transshipment* dilarang, dan sebagainya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Perencanaannya seperti apa ya? Karena kemudian ada kritik, memang ikan banyak dilaut tapi kalau gak tertangkap percuma kita ada ikan banyak di laut. Nah ini disini kan saya lihat ada pembangunan kapal, kemudian ada *cold storage*, ada *ice flake machine*, kemudian ada *mobile refrigerator*, pembangunan pasar ikan bersih dan lain-lain. Ini tentu saya bayangkan menjawab daripada kritik-kritik tersebut. Tapi apakah pekerjaan-pekerjaan ini sudah betul-betul menjawab itu? Terkait dengan perencanaannya. Apakah jumlah-jumlahnya juga sudah sesuai ya antara kapal katakanlah 50 apa, 5 GT ya. Kemudian pembangunan *ice flake machine* di dalam kapal tentunya kan, *cold storage* dan lain-lain. Nah ini mohon kami diberikan penjelasan soal perencanaannya ini sehingga kritik-kritik itu juga dijawab.

Yang kedua masih soal perencanaan khususnya di perikanan budidaya ini. Kan banyak potensi usaha budidaya ikan air tawar nih juga belum tergambar disini padahal kita tahu banyak potensi nih apakah bendungan, waduk, danau, sungai-sungai gitu kan di air tawar kemudian juga mungkin tambak-tambak udang. Lah ini kan juga potensi yang sama pentingnya untuk digarap ya. Karena menyangkut juga gizi masyarakat dan kehidupan masyarakat di sekitar danau-danau, waduk-waduk, dan sungai-

sungai tersebut . nah ini disini sih sepintas ada anggarannya ya, tapi disana sini kami belum melihat adanya cerminan perencanaan yang menyeluruh dari potensi ini akan digarap seperti apa. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Kami ingin mendapat gambaran meskipun ada di dalam jawaban pertanyaan terkait dengan kebijakan kedepan ini masih akan dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Ini saya kira bagus nih, jadi mohon ditelinganya dipasang ya jangan sampai hanya mendengarkan pendapatnya sendiri. Ini betul-betul masa lalu yang tidak baik. Saya pikir ini suatu langkah yang baik ya untuk didengarkan semuanya itu ya. Lah nanti seperti apa nih kebijakan *transshipment*, kemudian cantrang pelarangan cantrang dan lain-lain, ini mau seperti apa selanjutnya? Karena banyak pendapat juga ini bukan hal yang buruk, ada baiknya juga. Hanya semuanya adalah masalah pengawasan. Pada intinya adalah masalah pengawasan karena ini di lepas laut kan. Lah ini tidak mudah dalam hal pengawasan. Nah kedepannya seperti apa kalau katakanlah itu bukan barang yang haram sebenarnya tapi masalah pengawasan. Karena saya dapat keluhan setelah *transshipment* ini dilarang terus hanya dilarang saja tidak ada tindaklanjutnya akibatnya nelayan-nelayan kesusahan ini, gitu. Seperti itu Pak, jadi ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Panggah, masih?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ya, jadi kami ingin dapat gambaran meskipun nanti dikonsultasikan paling enggak ide dasarnya seperti apa setelah hiruk pikuk dan heboh itu berlalu. Demikian saya kira, terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Panggah, kalau masalah telinga tadi, selalu terpasang. Cuman persoalannya digunakan atau tidak. Pak Darori silakan.

F-PG (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, teman-teman sekalian.

Saya belum mendapatkan penjelasan tadi yang ditanyakan juga oleh Pak Ono ini masalah lupa Menteri. Berkaitan dengan informasi yang kami terima dari Aliansi Anti Korupsi Nelayan Indonesia, yang tadi disampaikan

oleh Pak Ono, jaring sudah apa ya adanya pengadaan kapal yang tidak selesai terus pengawasan, ada 5 kalau gak salah itu waktu saya tanyakan. Nah ini jangan sampai ini jadi masalah yang akan datang. Dan saya juga tidak membaca Pak Irjen, pemeriksaan BPK yang lalu itu yang belum selesai apa? Jangan sampai nunggak dibiarin apalagi berganti pimpinan. Tahu-tahu suatu saat dipanggil orangnya sudah pensiun semuanya gitu.

Dan saya ingatkan Pak Menteri, Bapak dapat anggaran 2019 2 bulan tapi tanggung jawabnya 1 tahun nanti, maka saya sarankan kepada Pak Irjen, 1 bulan ini tolong Satkernya diperiksa Pak. Jangan sampai BPK masuk duluan, Bapak ketinggalan. Satker-Satker yang bermasalah misalkan segera diarahkan untuk memperbaiki jangan sampai kebobolan. Karena pengalaman kita kalau BPK sudah meriksa 2 bulan, anda tidak menjawab itu hasil itu akan dilimpahkan ke polisi, Jaksa, dan KPK itu. Jadi ini saya mengingatkan ini diujung ini jangan jadi masalah baru nanti dikemudian hari. Ini pengalaman karena sudah 2 kali *disclaimer* itu artinya (suara tidak jelas) Itu gak bener. Perencanaannya salah, barangnya salah, uangnya salah. Ya ini Pak Irjen ya, mungkin 1 bulan ini perlu mungkin dengan staf-staf nya, Satker yang mungkin sudah dipandang yang harus diperiksa diingatkan sehingga bisa diperbaiki jangan sampai ketemu orang lain.

Terus yang kedua Pak Menteri ini, saya ini dari Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Kebumen ini daerah nomor satu kota termiskin di Jawa Tengah Pak. Lautnya terpanjang, saya baru-baru ini kaget, kami mengadakan pertemuan dengan 200 nelayan ternyata nelayan kita dibodohi, selama ini gak pernah diajari. Saya sudah telepon Pak Syarif, tolonglah nelayan Kebumen ini, mencari ikannya di pinggir pantai Pak. nelayannya kebanyakan dari Cilacap sama Pangandaran yang mengambil ikan di Kebumen itu. Ya ini Kebumen sudah miskin, tolong diperhatikan Pak Syarif. Kapan di didik ini 200 orang yang ada di sana yang saya kumpulkan nelayan-nelayan. Jangan, baca GPS saja belum tahu Pak. saya kaget itu. Jadi staf Bapak mengadakan pertemuan dengan kami, tolong ditindaklanjuti.

Yang kedua, garam. Ternyata hasil Pak Rifky ini, tim nya. Garam di Kebumen terbaik. Pak Tio, keliru. Ya Pak Tio, itu garamnya bagus, ini tolong dikembangkan Pak, jangan hanya di demonstrasi saja tapi tindaklanjutnya belum ada ya ini Pak Menteri.

Selanjutnya juga nih koral Pak Menteri, nih koral kan antara Kehutanan dan kelautan. Koral ini Undang-Undang 590 Menteri Kehutanan, di *delete* tidak direvisi, artinya ada undang-undang yang mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk mengatur. Maka saran saya Pak Menteri ketemu Menteri KLHK mana yang terbaik lah. Kalau saran saya, kalau soal

ikan, ikan yang bisa dimakan urusan Bapak, yang tidak bisa dimakan urusan LHK gitu, itu gampang membedakannya. Dan ini koral, saya kira saran saya Pak, koral yang budidaya saja yang mungkin dilepas, kalau yang alam itu hati-hati. Karena orang koral bolak-balik ke saya saja, saya menyampaikan ke Bapak, saya bukan eksekutornya gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Saya mohon ini menjadi perhatian. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Kanjeng terima kasih wejangannya kata Pak Menteri. Sepertinya kalau sudah bosan di Komisi IV tinggal ngomong. Selanjutnya Mba Alien Mus, silakan.

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih Pimpinan.
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi IV
Dan Kementerian KKP beserta jajarannya.**

Pak Menteri, pertama-sama saya ingin menyampaikan tadi sudah disinggung beberapa anggota bahwa realisasi APBN KKP tahun 2019 itu mencapai dengan realisasi *plus outstanding* 78% mungkin di Desember nanti. Terus di pagu anggaran alokasi anggaran KKP tahun 2020, hanya Sekjen saja yang menurun pagu anggarannya, yang lain naik dan adapun di DJS..Dirjen PSDKP itu naik dari 646 miliar jadi 1.000.062.000.000. Ini kenaikan yang cukup signifikan. Dan juga saya melihat di rancangan kegiatan Dirjen PSDKP ini banyak kegiatan yang betul-betul *insyallah* kalau memang terealisasi ini sampai ke nelayan-nelayan yang di daerah-daerah yang ini saya melihat ada beberapa operasional kapal pengawas 150 hari itu di 355 juta. Mudah-mudahan benar-benar melakukan tugas dan poksinya yang kemarin RDP.

Sebelumnya saya menyampaikan bahwa daerah Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara adalah daerah yang berbatasan dengan Filipina yang mana sering terjadinya *illegal fishing* di daerah-daerah tersebut. Terus juga saya pernah sampaikan soal nelayan yang tadinya dengan 900 gross ton setiap kali penangkapan ikan dilakukan oleh kapal atau yang dikeluarkan izinnya melalui Kementerian, dilakukan dengan organisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar

bisa secepatnya dilakukan Pak. ini juga kita bisa melihat daerah-daerah tersebut, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah bahwa kita penghasil tuna tertinggi di daerah tersebut, di 4 provinsi. Bahkan kami tahun 2017 kemarin telah melakukan mancing mania ataupun itupun didatangi oleh negara-negara tetangga tapi kita juga kekurangan kapal-kapal untuk yang 100 GT keatas. Ini juga kan harus perlu diperhatikan. Terus, ini langsung ke Pak Menteri saja.

Terus Pak Menteri kami juga kebetulan tahun 2018, saya menghadiri langsung bahwa kami dapat bantuan dari pusat soal pembantuan *cold storage* yang masuk ke daerah kami. *Alhamdulillah cold storage* nya saja sampai tapi tidak bisa digunakan karena daerah kami tak ada listrik Pak. Diesel ada tapi solar mahal Pak. jadi ini juga perlu diperhatikan Pak.

Juga saya ingin menyampaikan, kami penghasil ikan, daerah kemaritiman, tapi setiap kali 3 bulan atau 4 bulan sekali pada musim ombak, ikan susah juga, harganya mahal Pak. tapi kalau di musim yang baik, itu ikan kerapu saja per kilo saja itu bisa harganya 15 ribu sampai 20 ribu. Ikan kerapu yang kita makan di restoran Pak Ketua, yang 1 juta itu per 500 gram, disana itu cuman 20 ribu per kilo Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau gitu kita makan disana saja.

F-PG (ALIEN MUS):

Oh mari.

Jadi ini juga perlu diperhatikan. Mudah-mudahan dengan tambahan anggaran ini, tapi saya pikir Komisi IV juga harus membuat 1 kesimpulan bahwa untuk kegiatan anggaran di KKP ini juga perlu ditambahkan Pak Ketua, harus. Karena melihat dari *background* dari rakyat kita ini petani dan nelayan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup?

F-PG (ALIEN MUS):

Ada 1 lagi Pak. 1 saja Pak.

Pak Menteri, saya ingin menyampaikan juga bahwa sampah plastik ini memang sangat menjadi apa namanya, ancaman juga bagi kita semua Pak.

ini harus juga kita perhatikan karena memang laut kita ini sudah sangat aduh polusinya sudah enggak, gak bisa dikatakanlah. Tadi sudah dibilang nomor 2 di dunia, kalau saya bilang daerah Maluku Utara paling kotor se Indonesia kayanya, lautnya Pak.

Terus *destructive fishing* juga maupun penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan perlu di atensi khusus Pak. Kemarin saya tahun 2019 ini bulan April kemarin sebelum kampanye, saya turun ada yang melakukan penangkapan ikan pakai pukat harimau Pak. Itu benar-benar sangat, ini sangat mengganggu dengan para nelayan-nelayan kita. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kami bias melakukan lagi bakar ikan terpanjang seluruh Provinsi Maluku Utara seperti yang Bapak turun kemarin tahun 2015, *insyallah* tahun ini kita bisa siapkan karena Bapak pasti memerhatikan nelayan kita. Itu saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah?

F-PG (ALIEN MUS):

Sudah Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Karena gini Mba Alien, dikasih 10 miliar bilangannya kebanyakan, dikasih 9, harus dihemat uang negara. Maka sampailah angkanya 6 koma sekian. Kalau bicara akan dinaikkan, ayo kan di Komisi IV banyak anggota Banggar. Nanti kita minta Pak Menteri untuk menyiapkan kalau ada APBN-P. kan gitu Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A):

Ya ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Bambang Purwanto. Pak Bambang 2 menit cukup?

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan yang saya hormati, dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Kalau melihat peran dari KKP nih sebenarnya merupakan Kementerian yang sangat strategis. Mempunyai wilayah yang cukup luas, darat dan laut, luar biasa. Namun tentunya perlu perencanaan yang tepat dan melalui evaluasi dan terkait dengan karakteristik wilayahnya sehingga tidak terjadi kesalahan. Menurut saya yang tadi disampaikan Pak Ono dan ini sudah menjadi isu di media sosial karena kesalahan penerapan teknologi. Sedangkan bangsa kita sebenarnya sudah membuat teknologi terkait dengan kerambah apung yang tentunya lebih murah dan lebih efisien. Ini perlu menjadi perhatian Pak Menteri sehingga tidak mendapat (suara tidak jelas) dari Pemeriksa.

Kemudian nelayan ini sebenarnya sudah cukup banyak mendapat bantuan dari KKP, hampir tiap tahun tetapi kalau kita lihat tidak beranjak pertumbuhan ekonomi para nelayan ini. Ini tentu ada masalah, apakah tidak pernah dilakukan evaluasi dan pendampingan? Dan kita tidak bisa menyerahkan ke Bupati karena kewenangannya sudah ditarik ke Provinsi, ini juga persoalan. Sehingga Pak Menteri bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan sosial yang ada.

Kemudian di Kotawaringin Barat itu ada pabrik tepung yang dipegang oleh KKP tetapi ketika dioperasikan proteinnya di bawah standar. Setelah kami tanyakan kepada ahli ternyata ada persoalan di *blower* dan *dryer* nya. Mohon ini menjadi perhatian Pak Menteri karena tepung ikan ini juga membantu para nelayan kemudian juga ini terkait juga dengan budidaya ikan yang selama ini kesulitan karena pakan terlalu mahal. Kemudian bantuan mesin pakan sudah cukup banyak tetapi tidak bisa dioperasikan karena salah satu bahan bakunya itu adalah tepung ikan. Kalau tepung ikannya ada disana, pabrik tepung ini bisa diperbaiki ini bisa memberikan nilai tambah kepada budidaya ikan di darat sehingga mesin yang sudah dibagikan bisa dioperasikan.

Kemudian ada keluhan juga. Kemarin saya sempatkan mampir pada saat kunjungan kerja spesifik. Para PPL ini yang tentunya tangan kanan dari Kementerian perlu dioptimalkan perlu ditambah biaya operasional menurut saya. Kemudian juga ada kesulitan yang budidaya ini. Prasarana uji lapang yang mereka tidak punya. Tentunya ini juga perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian. Kalau Pak Menteri bisa memanfaatkan keberadaan PPL, saya yakin akan meningkatkan nilai tambah kepada nelayan maupun budidaya ikan di Kotawaringin Barat dan di wilayah yang lainnya. Saya pikir

persoalannya pasti akan sama karena wewenang daerah ini sudah tidak ada, ditarik ke Provinsi. Terima kasih. *Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Sumail, silakan.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik terima kasih

**Pimpinan dan anggota yang saya hormati
Pak Menteri beserta jajaran juga seluruh hadirin yang saya muliakan.**

Saya lagi-lagi memberikan apresiasi terhadap Pak Menteri. Pada 30 hari ini saya melihat bahwa banyak turun ke bawah dalam rangka mendapatkan masukan-masukan kaitannya untuk *me-review* PerMen PerMen yang dianggap kurang produktif dan merugikan petani, maksud saya nelayan. Namun demikian saya berharap bahwa kajian ini telah telaahan ini untuk lebih mendalam lebih *prudent* karena isu menyangkut kemaritiman di laut ini tidak hanya bagaimana produksi ikan tangkap kita tentu melimpah.

Berikutnya adalah tentang isu-isu lingkungan. Hal lain lagi Pak Menteri kaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil kita yang terluar juga batas laut karena menyangkut kedaulatan negara kita Pak. ini juga mohon nanti menjadi apa namanya, perhatian juga. Terus saya melihat dari kontribusi terhadap PDB Pak Menteri, ini kebanyakan adalah ikan segar yang diekspor. Namun di beberapa tempat ataupun tadi ada juga disampaikan bahwa ada *cold storage* tetapi tidak bisa digunakan. Saya kira nanti dalam memberikan bantuan kebutuhan terhadap nelayan ini juga diperhatikan kemampuan atau daya dukung listriknya Pak di tempat tertentu ya.

Kontribusi terhadap PDB saya melihat ini banyak ikan segar. Ada beberapa di tempat-tempat penghasil ikan ketika panennya banyak, tapi kemudian akhirnya menjadi membusuk juga ini kan sayang juga. Di Jawa misalnya kebutuhannya 500 sekian tapi yang tersedia hanya 118, sehingga mohon diperhatikan, kami juga membawa pesan dari dapil Pak, kebetulan di tempat saya itu ada pelabuhan pendaratan ikan namanya Muncar. Di 2018 itu hasil tangkapnya kurang lebih 27 ribu ton mendekati 28 ton, terus mengalami penurunan sampai di 2018 kemarin ini hanya 54 ton Pak. luar biasa penurunannya, dan ini menyebabkan tentu petani kehilangan pendapatannya. Dan banyak disitu apa namanya pabrik pengalengan-

pengalengan ikan yang kemudian kekurangan bahan pasokan. Dan di saat seperti ini saya kira ini perlu ada sebuah penanganan Pak, yang apa namanya atau jalan keluar. Mohon dicarikan jalan keluarlah untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti yang terjadi di daerah Muncar. Demikian kira-kira Pak Menteri, dan Pak Ketua. Terima kasih. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Rudi tadi dipanggil tapi Bapak lagi, oh iya itu penting Pak. Lanjutkan Pak.

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua Pak Sudin dan para wakilnya.

Pak Menteri dan jajarannya.

Saya mungkin mengawali dari untuk di Dirjen PRL untuk khusus untuk wisata bahari ya. Di kampung halaman saya itu ada namanya pantai Pink ya, di bawah KKP, itu jaraknya jauh sekali Pak Menteri, lumayan gitu. Jadi pasirnya tuh *pink*. Warna *pink* gitu. Ada di Lombok dan ada di Bima. Bagus sekali, bagus sekali dan hanya saja transportasi kesana tuh tidak ada, baik Pemda tingkat II maupun tingkat I tidak ada yang perhatikan. Saya berharap karena ada namanya pantai Lariti yang menghubungkan 2 pulau tapi kalau diatas jam 2 itu kita bisa berjalan menuju pulau yang satunya dengan bernaik sepeda. Jadi kalau sudah malam atau magrib airnya naik dia tidak bisa lagi. Itu sudah saya melihat disitu ada logo KKP. Mudah-mudahan di daerah-daerah yang wisata bahari yang lain bisa mendapatkan sentuhan KKP.

Saya mendukung dari teman saya Johan menyampaikan untuk di Labuan Jambu karena kami satu dapil. Mudah-mudahan KKP bisa memberikan perhatian sehingga khususnya di daerah pemilihan kami di Nusa Tenggara Barat I yang kecil dengan daerah pemilihan yang kursinya cuman 3 orang bisa dapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Pak Menteri KKP.

Juga masalah garam tadi, memang benar disana tuh ada gudang tetapi akses *road* yang menuju gudang tersebut tidak ada, tidak bagus disitu. Sehingga menyulitkan daripada petani garam kita untuk mengantar atau membawa hasil panennya itu. Nah ini tolong bisa menjadi perhatian Pak Menteri dan jajarannya. Jangan sampai dibangun justru tidak berfungsi gitu. Dan disana tuh melimpah sekali, hampir mungkin sama dengan Madura

kalau di kampung saya di Bima tuh. Garam banyak sekali, saking banyak tuh orang dagang di piggir-pinggir jalan dan yang beli orang-orang kampung juga. Sekilonya gak ada lah harganya itu , kasihan sekali. Ya mungkin bisa diteliti supaya bisa di *upgrade* sehingga garam yang akan diimpor tuh mungkin bisa sama dengan yang dikampung halaman.

Mungkin kalau orang-orang di Jawa ribut garam, disana tuh gak ada nilainya malah gak ada harganya itu. Bandeng itu mungkin paling bagus di kampung saja. Juga yang makan orang kampung juga, jualnya di pinggir jalan juga. Nah saya gak tahu Pemerintah tapi mudah-mudahan *insyaallah* dengan mantan Ketua Komisi IV yang menjadi Pak Menteri ada sentuhan-sentuhan yang baguslah, *insyaallah* gitu kan . saya kira itu saja masukkannya Pak Menteri dan Pak Dirjen yang mungkin yang menangani ini supaya memberikan nuansa baru lah dengan Kementerian baru. Makasih Pak Ketua, Pak Menteri, dan jajaran.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh .

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi Pak Ono minta tambah waktu. 3 menit cukup Pak? yang nentukan saya loh bukannya anggota.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah dikasih waktu, pakai nawar lagi.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

ya terima kasih Pak Menteri dan jajarannya.

Episode kedua, melanjutkan Pak. Terkait dengan undang-undang dan produk hukum langsung di bawah Pak Menteri. Nah kemarin Pak Menteri bicara ke *stakeholder* perikanan akan menghadiahkan tahun baru dengan hadiah PerMen-PerMen yang baru. Saya mohon tanggapan terkait dengan PerMen yang mengatur terkait dengan lobster, kepiting rajungan akan seperti apa? Yang kedua terkait dengan alat tangkap yang dilarang, yang ketiga terkait dengan *transshipment*, yang keempat terkait dengan hasil analisis dan evaluasi terhadap kapal-kapal yang dianggap asing. Yang mungkin kemarin juga ada pengusaha yang menyampaikan bahwa mereka tidak ada modal

asing murni dan informasinya juga mereka sudah dilakukan anev dan *clear*, nah apa sekarang tindaklanjutnya?

Lalu terkait dengan PerDirjen yang mengatur terkait batasan kapal 150 GT untuk kapal tangkap dan 200 GT untuk kapal angkut. Lalu PerDirjen *Transshipment* terkait dengan kapal penyangga dan kapal penangkap ya. Nah mohon seperti apa rencananya ke depan dimana nelayan pun berharap hadiah itu ya benar-benar hadiah yang menyenangkan mereka.

Kemudian terkait pemberantasan *illegal fishing* dan penenggelaman kapal. Saya yakin ini satu hal yang positif yang sudah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan yang lalu. Nah sehingga *statement* Pak Menteri tidak akan menenggelamkan kapal dan akan memberikan kapal itu kepada nelayan, ini juga harus hati-hati. Karena kalau saya evaluasi Pak pada saat bicara bantuan kapal dari tahun 2010 yang namanya program Inkamina ternyata pemanfaatnya pengusaha-pengusaha bukan nelayan. Jadi sekarang boleh di cek oleh Pak Menteri, boleh di cek oleh Dirjen, Inkamina-Inkamina yang saat ini beroperasi atau bantuan-bantuan kapal yang 30 GT ke atas, nyatanya nelayan itu bukan penikmat utama karena yang jalan-jalan itu mereka melakukan kerja sama dengan pengusaha dengan pola bagi hasil. Ada yang 60 40, 70 30. Nah sehingga pada saat kapal asing ini akan diberikan ke nelayan, nelayan yang mana? Apakah nelayan pengusaha? Apakah nelayan yang 1, 2 GT yang nyatanya mereka tidak akan bisa mengoperasikan itu dari sisi biaya operasionalnya. Nah sehingga harus hati-hati betul.

Selanjutnya terkait dengan, saya mendengar juga ada beberapa *stakeholder* menyampaikan bahwa kapal modal asing ini bisa masuk lagi, saya terus terang tidak setuju. Kita harus benar-benar jaga PP 44 terkait dengan daftar investasi dimana modal asing 0% untuk perikanan tangkap. Tolong Pak Menteri jaga betul jangan sampai asing masuk lagi, terkait dengan perikanan tangkap.

Selanjutnya terkait dengan penyuluh. Tadi juga ada perwakilan dari penyuluh perikanan bantu, mungkin ada di atas ya? Tadi ada, saya lihat perwakilannya. Pada saat bicara penyuluh, ini sama dengan penyuluh pertanian, penyuluh yang lainnya. Yang sebenarnya mereka berharap untuk diangkat menjadi ASN. Kalau dari sisi penghasilan, penyuluh perikanan bantu itu jauh lebih besar penghasilannya daripada misalnya THL penyuluh pertanian. Tapi tetap mereka menuntut untuk bisa juga diangkat menjadi ASN. Nah kalau kemarin pertanian sudah ada 12 ribu yang diangkat, perikanan kan belum ada karena kemarin juga, Pak Nilanto kalau tidak salah pada saat kita rapat gabungan tidak memberikan usulan pada saat Menteri

Pertanian langsung dihadiri oleh Pak Amran, ya kan? Menteri-Menteri lain langsung dihadiri. Dari KKP nih tidak hadir dan tidak memberikan usulan terkait dengan format terkait dengan tenaga penyuluh bantu yang saat ini ada juga yang diangkat menjadi P3K. Nah sehingga mohon ini juga, saya rasa Pak Edhy ngerti lah, karena 5 tahun terus mendapatkan aspirasi dari mereka. Nah harus menjadi gerakan juga untuk bisa mengusulkan kepada Pemerintah tenaga penyuluh perikanan bantu diangkat menjadi ASN

Selanjutnya saya minta tanggapan terkait dengan Satgas 115. Apakah ini nanti tetap akan ada? Atau Pak Menteri akan menguatkan PSDKP. Karena kalau Satgas 115 ini, masyarakatlah identik dengan Bu Susi. Tapi Pak Menteri gaya juga dong pakai baret bintang 4.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

1 menit lagi.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Siap Pak.

Baret bintang 4 mantap juga sih, ya kan? Dan ini yang dulu diprotes Bu Susi oleh Komisi I. kok bisa Menteri pakai baret bintang 4.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Itu bintang laut Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Oh bintang laut. Ya jadi mohon tanggapannya akan seperti apa?

Nah terus yang tadi disampaikan oleh Pak Zulficar, Pak. Terkait dengan kapal perikanan yang belum ada izin tapi bisa beroperasi. Saya pernah menyampaikan kan sebelumnya. karena memang sulitnya perizinan kapal-kapal mereka itu pinjam meminjam SIPI. Ini terjadi, dalam hal ini saya tidak membela pengusaha. Jadi SIPI kapal yang mangkrak yang sudah tidak beroperasi diperjualbelikan, dipinjamkan dengan bayaran-bayaran tertentu. Ini terjadi. Karena apa? Karena sulitnya mengurus perizinan. Bapak boleh cek di tempat saya di Karangsong terjadi misalnya boleh memang benar faktanya seperti itu. Lalu apakah mau ditangkapi semua? pada saat mereka pun kesulitan untuk mendapatkan izin.

Terkait dengan SIUP-SIUP kapal-kapal baru itu yang sulit sekali. Nah kalau mau diberantas silakan cek turun langsung ke lapangan. PSDKP Pak

Agus Suherman berani gak nangkepin kapal di Karangsong? Gak berani Pak. karena tetap nantinya larinya ke Pak Menteri juga karena orang-orangnya juga sudah ketemu Pak Menteri.

Nah terkait dengan yang terakhir, ada permohonan dari kapal-kapal Jawa yang beroperasi ke Papua. Mereka itu kan, 1 *trip* itu kan bisa 6 bulan padahal mereka itu 2 minggu saja sudah dapat ikan. Nah sehingga di Bau-Bau di Merauke, mereka ini menjual ikan atau mengangkut ikan dari Merauke dari Bau-bau ke Jakarta dengan biaya yang sangat tinggi karena menggunakan kapal-kapal biasa dengan tarif 4 ribu per kilogram. Nah bisa gak ke depan diusulkan dalam program Pak Jokowi, tol laut misalnya. Karena dari Cina ke Indonesia saja Pak, tarifnya hanya 1.200 per kilo. Kalau bisa tarifnya 2000 per kilo yang diangkut dari Papua ke Jakarta ini sangat membantu mereka sehingga tolong dipikirkan, disinkronkan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan tol laut untuk mengangkut ikan-ikan yang dari Papua ke Jakarta atau ke Jawa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih. *Wasssalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Mba Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya mencermati dari kemarin rapat pertama sampai hari ini di beberapa Kementerian, saya agak-agak bingung sebenarnya, ini kayanya semua Kementerian tidak terkecuali tuh masalahnya tuh di data. Saya agak-agak bingungnya disitu gitu. Dari tadi yang saya dengar, contoh terakhir lah contoh terakhir masalah izin. Disaat kita mau meningkatkan investasi berarti izin-izin ini terhambat gitu loh Pak, ya kan? Saya kebetulan *background* saya juga usaha walaupun kecil-kecilan ya Pak ya tapi kalau izin ditahan-tahan kita mau ya nge gaji orang gimana gitu loh kan gak jalan berarti, benar gak?

Saya ingin bertanya dan tolong dijawab gitu ini masalah izin alat tangkap lah, kapal ikan, dan lain-lain kok berlarut-larut kaya gini tuh permasalahannya dimana sih gitu loh, apa gitu? Saya kebetulan *background* saya hukum Pak, jadi kalau memang ada aturan yang gak benar, yang mana? Ayo sama-sama kita cari gitu loh, iya kan? Ini daritadi data gak ada, aturan gak jelas, izinnya nyangkut dimana, ini sama saja kita bahas gak kelar-kelar juga, mau sampai jam 1 malam¹⁰, gak kelar Pak Ketua gitu loh.

Ya jadi saya mohon kejelasan kalau orang mau usaha pasti mau untung. Masyarakat juga mau nelayan mau, saya tuh jujur ya Pak ya ada Ibu dari temannya anak saya, gara-gara Menteri kemarin itu terus saya maju, dimusuhin saya padahal kita temenan baik, gara-gara apa? Izin Pak. ini kisah nyata Pak, tetangga kita, anak kita sekolah sama-sama. Gara-gara ini dimusuhi. Identik yang kemarin itu dengan rumah saya, rumah saya berpartai ini. Lah kan capek kita, karena kan orang gak ngerti. Jadi saya mohon penjelasannya Pak terkait ya ini kan banyak yang bermohon, memohonkan perubahan alat tangkap dan lain-lain. Ini kendalanya dimana? Gitu loh. Saya mohon jawaban jelas karena dari 3 Kementerian, rapat, buntut-buntutnya data gak ada, aturannya yang mana kita gak ngerti, dan segala macam. Pegel gitu. Jujur saja Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya kalau pegel pulang ke rumah, istirahat. Kok gitu saja repot. Pak Daniel Johan silakan.

WAKIL KETUA/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

ya, *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*

Pimpinan, segenap sahabat anggota, Pak Menteri, dan seluruh jajaran.

Pak saya mau *flashback* Pak, Pak Menteri. 5 tahun kenangan indah kita nih karena satu-satunya Menteri yang punya kenangan indah cuma Pak Menteri yang namanya Edhy Prabowo. Kenangan 5 tahun berjuang untuk nelayan ya. Nah yang pertama saya ingin menegaskan kembali mengenai data ya Pak, sudah ada atau belum dan segera disiapkan untuk kita sesegera mungkin. Data impor secara detil, data bahan baku ya, karena kita ingin lihat, jangan sampai kita melimpah tetapi karena manajemen tidak benar yang melimpah itu kita impor untuk industri ya, itu segera.

Yang kedua saya ingin menyampaikan Pak Menteri, nanti setelah ini aspirasi dari 2.100 yang selama dari 2015 sudah kita perjuangkan bersama sehingga bisa diangkat menjadi ASN yang sampai sekarang masih terkatung-

katung. Mudah-mudahan di era Pak Menteri ini 2.100 selesai, tuntas. Ya penyuluh, penyuluh ya.

Lalu yang ketiga, data kapal segera Pak ya, 72 45 dengan se detail mungkin. Lalu nanti kita simulasikan itu paling tepat itu kita rumuskan, formulasikan, tindakan apa yang bisa kita lakukan ya, yang bisa mendukung peningkatan produktivitas ekspor perikanan, dunia perikanan ya.

Keempat Pak Menteri, kita berharap di seluruh dapil bisa dibangun kampung pesisir ya. Karena masyarakat yang paling miskin sebenarnya masyarakat nelayan yang di pesisir ya, mudah-mudahan itu ada beberapa titik menjadi percontohan yang baik. Kita mengangkat kehidupan mereka dengan kampung pesisir yang mungkin bisa menjadi turis atau sumber kuliner yang mudah-mudahan itu menjadi prestasi tersendiri bagi Kementerian KKP.

Terakhir Pak Menteri, masalah tol laut termasuk tol udara nih. Terakhir akan ada kebijakan Garuda itu akan entah apa istilahnya menghibahkan atau meng apakan kepada Merpati 5 pesawat Merpati yang tugasnya khusus untuk logistik perikanan ya. Nah tetapi sejauh ini kebijakan itu hanya untuk logistik lokal, domestik. Saya rasa sangat penting untuk dibuka langsung internasional Pak dalam rangka mendorong peningkatan ekspor. Nah kalau misalkan, Pimpinan Pak Ketua, apakah untuk mendukung ini kita perlu juga mengundang juga Menteri Perhubungan atau Menteri terkait? Sehingga nanti dari pusat-pusat industri atau penangkapan ikan entah di Bitung entah dimana bisa langsung ke Shanghai. Dalam rangka ini, harga yang bersaing. Karena kalau harus ke Jakarta lagi baru kesana. Itu pesawat, ada 5 pesawat khusus katanya. And kalau itu bisa kita rintis terwujud saya rasa itu juga terobosan. Saya yakin ekspor dalam setahun gak usah lama-lama meningkat. Tetapi juga, yang terakhir ini menyangkut seluruh 7 kebijakan itu bagian dari menghambat nanti. Pesawatnya ada ya karena peraturan kebijakan masih menghambat akan *transshipment*, gak bisa. Ikan kalau gak *fresh* apa yang mau di ekspor? Ikan asin.

Itu saja Pak Menteri. Berarti kita bersyukur nih jam 5 sudah bisa kita akhiri ya. Ini hadiah bonus buat Pak Menteri nih. Saya serahkan aspirasi dari.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Maksudnya apa ini jam 5?

Terima kasih Pak Daniel, saya sangat tertarik sekali tadi dengan pernyataan Pak Daniel. Apalagi saat ini penerbangan dari Cina ke Cina. Itu Cina itu ada yang dari Guangzhou ada yang dari mana. Ke Manado kalau

gak salah ada 4 kali atau 5 kali. Itu kalau ekspor hasil lautnya langsung disiapkan karantina nya yang bagus kan akan lebih menguntungkan bagi nelayan.

Pak Menteri saran saya, tadi Pak Ono kompli masalah perizinan yang susah dipersulit. Zaman sekarang kan sudah modern. Tinggal bawa 1 laptop, bawa modem, jemput bola perizinannya. Misalnya perizinannya tuh ada di Maluku. Di Maluku kan ada Dinas Perhubungan. Kalau pengukuhan sudah selesai, penomorannya kan tinggal gampang, tinggal di *print* di tempat. Persoalannya mau atau tidak. Jemput bola itu sudah paling gampang loh Pak Menteri. Semua instansi sudah begitu, saya gak mau Pak Menteri kalah dengan Kementerian yang lain karena Pak Menteri adalah Menteri di Komisi IV. Dan Pak Menteri duduk disitu karena saya pindahkan dari sini.

Pak Menteri sesuai kesepakatan kami biasanya, kita kan ada mengundang Perinus, ada ngundang Garam, ada ngundang Pelindo. Jadi saya minta bicara sebentar kendalanya dimana secara singkat 2 menit kemudian kita atur lagi pendalaman khusus. Karena selama ini kalau Pak Edhy Prabowo yang disini semua mitra BUMN datang cuman duduk diam, melamun, melongo, diam, main *handphone*. Sekarang saya kasih kesempatan.

Untuk yang pertama mungkin Garam dulu. Silakan. Pak, saya ingatkan Bapak. Zaman Pak Fadel Menteri Kelautan disini, PT Garam salah satu penyelundup garam dari India. Harus *clear* ini Pak. saya tidak mau itu terjadi lagi karena waktu itu yang meninjau kesana membuka gudang secara paksa, saya sama Pak Firman Soebagyo. Karena waktu itu alasan “yang jaga gudang gak ada, yang pegang kunci lagi pergi” itu dibongkar ternyata isinya garam dari India. Silakan Pak Dirut.

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Mohon izin Pak Sudin,

Ketua yang terhormat

Bapak Menteri mohon izin dan anggota yang mulia

Kami luruskan Pak Sudin. Zaman Pak Fadel itu 2. Boediono sama Garindo, tapi bukan PT Garam Pak, bukan. Saya sendiri sebagai pendamping dari HMPK. Memang garamnya tuh di Madura, kebetulan namanya PT Garam Indonesia, ada Indonesianya, mohon maaf, kami justru memberikan masukan ke Pak Menteri kala itu dengan undang-undang kala itu, PT Garam kan tidak mendapat IT Pak, izin importir tidak ada. Sehingga pada saat itu PT Garam mempunyai stok hampir 200 ribu ton tapi masih

impor. Lah persoalan sekarang lebih parah lagi Pak Sudin. Kami sudah memberikan surat kepada Pak Menteri juga kami menghadap bersama Pak Dirjen PRL dan juga kami teruskan kepada Bapak Presiden bahwasanya mungkin sekarang ini bagi pengusaha garam termasuk PT Garam, terburuk sepanjang sejarah, terpuruk Pak. kenapa? Sekarang di titik nadir harga garam itu di Jawa Timur hanya 400 di bawah itu Pak, Per kilo di sentra produksi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak, biaya produksinya berapa? supaya saya siap ancer-ancer.

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Untuk rakyat untuk saat ini kami kemarin juga melakukan *sharing session* Pak Sudin, itu sekitar 538 sampai 400 HPP petani. Tentunya kalau PT Garam itu di bawah. Dan kami mohon izin Pak Kyai, guru kita ini. PT Garam sebenarnya lahan kita tuh 4800 bukan 6000, yang 1200 itu adalah untuk sarana produksi gudang, kantor, *stockpile* dan sebagainya. Sehingga saat ini PT Garam saat ini sudah 100 ton per hektar. Dan tahun ini *insyallah* kita bisa memproduksi 450 ribu ton dan terbesar sepanjang sejarah, kenapa? Karena 2 tahun terakhir ini, kami dari lahan yang dulu ini 5800 pada tahun ini dapat kami pastikan 1200 sudah kami revitalisasi. Pak Sudin, *monggo pinarak* ke Madura Pak biar periksa juga.

Dan kedua, harga yang sekarang ini terpuruk Pak dengan laporan dari Pak Dirjen PRL yang sekarang tuh sudah mendekati 2.100.000 ton untuk rakyat dan PT Garam sudah per hari nya adalah hampir 400 ribu ton. Itu kami memberikan solusi Pak Sudin. Kasihan Petani Pak, dan kami Pak. kami 2 bulan tidak jualan, gimana mau jualan, mereka sudah semuanya sudah diimpor Pak. tadi ada pertanyaan dari teman-teman dari Bu Luluk juga bagus sekali, memberikan masukan-masukan. model sampel atau dilakukan yang dinamakan stok itu dimana? Stok di produksi sentral kah? Termasuk milik pengusaha, produsen atau prosesor kah? Termasuk pada PT Garam? Ini harus di dudukkan. Karena kalau nanti terhitung dengan stok produsen atau prosesor lebih dari itu Pak. Gimana petani mau menikmati keuntungan, jangankan menikmati keuntungan, tidak terserap ini 2 bulan.

PT Garam mendapatkan PNM tahun 2015 sebesar kurang lebih 205 miliar. Tahun 2019 sisa 20 miliar yang sekarang kami lakukan untuk operasi pasar supaya petani ini menikmati Pak. karena swasta rata-rata membelinya

di bawah 600, PT Garam masih 800 Pak. tetapi dana kami tinggal 16 miliar Pak per hari ini. Apa solusi darurat, mohon izin, para anggota.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirut, jelas singkat, nanti pendalamannya khusus BUMN.

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Siap. Tapi *dalem nuwun sewu* Pak Sudin, serap lah Pak. importir mulai dari industri kimia, petro, sampai aneka pangan wajib menyerap untuk garam dalam negeri Pak. kalau tidak Pak, nangis kita Pak. yang menghadapi rakyat adalah PT Garam. PT Garam tidak pernah impor Pak. Siapa memberikan masukan bahwa PT Garam pernah memberikan dibuka oleh Pak Fadel, terakhir kami rapat dimana-mana menjadi mafia katanya PT Garam. Siapa yang memberikan masukan seperti itu? PT Garam visinya adalah hulu hilir ini adalah melindungi petani dan melindungi konsumen. Jangan sampai harga garam, Ibu-Ibu beli Bu Luluk, tahu-tahu per 250 gram 10 ribu, pasti marah kita. Apa yang disebut Bu Luluk, Kartel itu perlu kita selidiki Bapak Menteri. Terima kasih Pak Sudin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Budi, waktu itu saya sama Pak Firman dan Pak Fadel itu sudah jelas. Pak Fadel sampai marah-marah langsung mensegel. Saya bukan mengada-ada, saya pelaku Pak.

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Iya tapi itu Garam Indonesia, PT Garam Indonesia, PT Garam..PT Garindo singkatannya Pak. Bukan PT Garam Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Coba nanti kita cek lagi. Saya waktu itu sama Mas (suara tidak jelas).

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Ya, dan itu Boediono di (suara tidak jelas) kami tahun Pak persis Pak. Firman waktu itu datang dengan kami 2 3 kali dengan Pak Fadel. Kita mulutan bareng saat itu di pinggir papas Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke, cukup. Selanjutnya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan, sebelum ke yang lain, mau tanya Ke Pak Dirut. Pak Dirut coba jelaskan gini Pak, secara tegas penugasan dari Pemerintah itu apa sih ke PT Garam?

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Mas Ono, Bapak juga berjuang dengan kami bersama sudah 5 tahun 10 tahun. Tidak ada PS untuk PT Garam Pak. Petani harganya pun juga *ndak* ada. Zaman Bu Susi sudah menunjuk Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, jelas di pasal 23 sampai 25 yang berperan adalah Badan Usaha Negara yang bergerak dalam bidang garam. Tetapi *ndak* berlaku sampai sekarang itu undang-undang. Tidak ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah ada PP nya belum?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Nah makanya. Berarti dasarnya itu dulu. Minta penugasan. Karena walaupun Pak Budi sampai muncrat kemana-mana ngomongnya. Indramayu itu tidak tahu Pak PT Garam. Indramayu itu kan terbesar di Jawa Barat nih penghasil garam. Tidak ada rakyat tahu petani garam kehadiran PT Garam disana. Jadi itu dulu tuh penugasan. Minta penugasan pada Pemerintah seperti Bulog diberi penugasan untuk menyerap, diberi penugasan untuk distribusi. Tanpa penugasan tidak mungkin akan bisa kuat PT Garam. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Ono, cukup Pak Budi. Nanti dalam RDP selanjutnya kita dalam.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua saya mau kasih info ke Pak Dirut . Di Bima itu ada gudangnya garam Pak. harganya hari ini itu Rp 100 sampai Rp120 per kilogram Pak. Jadi jangan bicara 800. Terima kasih.

DIRUT PT GARAM (BUDI SASONGKO):

Kami kemarin dengan Pak Zulkiefli Pak Gubernur, Bapak Sudin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Budi nanti saja penjelasannya ke RDP karena di RDP tersebut Bapak boleh ngomong apa saja asal 3 menit. Selanjutnya Bu Dirut Perino. Singkat jelas Bu.

DIRUT PERINDO (FARIDA MOKODOMPIT):

Bismillahirrahmanirrahim

Mohon izin Bapak Pimpinan, para anggota dewan.

Mohon izin Pak Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baik kami dari Perindo, Bapak. Menyampaikan sesuai penugasan untuk Perindo sesuai PP Nomor 9 Tahun 2019 penugasan Perindo adalah perusahaan untuk jasa pengolahan pelabuhan perikanan kemudian ada di segmen perusahaan perdagangan, budidaya, dan *processing*, Bapak. Kinerja tahun 2018 omset perusahaan atau *revenue* perusahaan 1 triliun dengan laba 25 miliar, Bapak. Prognosa di 2019 kami mencapai kurang lebih 800 miliar dengan laba 40 miliar.

Sejauh ini hambatan yang sangat berarti belum ada Bapak. Kami sedikit ingin memberikan klarifikasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Dirut tadi aset nya berapa, aset?

DIRUT PERUM PERINDO (FARIDA MOKODOMPIT):

2019 aset 900 miliar, Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Keuntungannya 1 tahun?

DIRUT PERUM PERINDO (FARIDA MOKODOMPIT):

Di 2018 25 miliar Pak.

Kami sedikit melakukan klarifikasi Bapak, terhadap dengan adanya tadi yang disampaikan Pak Ono, kasus hukum yang menimpa mantan Dirut, Bapak. Bahwa kami perlu menjelaskan bahwa OTT terjadi itu tidak pada saat kami rapat Pak. Jadi OTT terjadi pada tempat yang berbeda. Ini yang perlu selalu kami klarifikasi karena jujur saja ini kemudian ikut memberikan citra yang kurang bagus untuk perusahaan kami Pak dan itu sudah kami jelaskan kepada seluruh *stakeholder* termasuk juga termasuk juga para wartawan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup ya Bu? Nanti pendalamannya RDP yang akan datang. Terakhir Pak Menteri, dari Perinus. Dirut Perinus ya, Perikanan Nusantara.

DIRUT PT PERINUS:

Baik terima kasih.

Pak Ketua, Bapak Menteri, Bapak anggota dewan yang terhormat.

Kami dari PT Perikanan Nusantara menyampaikan bahwa PT Perikanan Nusantara ini adalah hasil dari merger 4 perusahaan perikanan yang ada di Indonesia. Pertama berasal dari Perikanan Samudera Besar, PT Perikani, PT Tirta Raya Mina dan PT Usaha Mina. Hampir 70% operasinya pada waktu itu ada di Indonesia Timur. Oleh sebab itu saat ini PT Perikanan Nusantara itu mengoperasikan *cold storage* 4.420 ton di seluruh Indonesia. kemudian ada kapal sekitar 18 unit, pabrik es 110 ton tersebar di seluruh Indonesia, kemudian ada *docking* 5 unit, ada pengolahan ikan 11 unit tersebar di seluruh Indonesia, dan ada dermaga 5 unit.

Kami berkonsentrasi dimana? Kami berkonsentrasi di penangkapan ikan. Oleh sebab itu salah satu komponen utama dalam peningkatan pendapatan ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan infrastruktur atau fasilitas penangkapan ikan yang memadai.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi dikatakan jumlah kapalnya berapa tadi?

DIRUT PT PERINUS:

18 Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Itu kapal besar semua atau kapal kecil?

DIRUT PT PERINUS:

Kapal gabungan Bapak, jadi kapal yang saat ini beroperasi sebenarnya hanya sekitar 10 Pak. Jadi yang 18 kami miliki ada 3 kapal yang tidak bisa kami operasikan karena tidak ada terkena peraturan dari Menteri KKP, kapal itu 512 GT Bapak ada di 3 tempat.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kapal itu atas nama PT?

DIRUT PT PERINUS:

Betul Pak PT Perikanan Nusantara Persero. Iya Pak? iya begitu Pak kan gitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Maksudnya tunggakan apa?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Nanti gini saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Biar nanti saja waktu RDP saja di dalam nih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Jadi saya mohon Pak Ketua, nih 3 BUMN siapin data yang lengkap termasuk PNM yang diberikan negara pada tahun 2015. Perinus 200 miliar, Perindo 300 kalau tidak salah, nah kita minta tuh data yang lengkap. Dan memang Perinus ini masalahnya besar lah. Karena Direktur, mantan Direktornya sombong banget itu, maka jadi tersangka sekarang.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Ono, masalah sombong gak sombong itu hak asasi manusia. Ya boleh Pak. Jadi apa yang dilakukan amal perbuatannya kan ketahuan. Pak

Dirut saya kasih 1 menit dijawab tolong disampaikan secara singkat saja permasalahannya, tujuannya kita nanti cari jalan keluar yang terbaik agar kalau BUMN Perikanan nih hebat, yang dapat nama namanya Edhy Prabowo Pak. bahwa di bawah Pak Edhy Prabowo binaannya, jadi lebih baik. Silakan.

DIRUT PT PERINUS:

Terima kasih Pak.

Jadi kami ada 3 permasalahan utama. Pertama adalah tadi mengenai kapal, jadi ada kapal-kapal yang memang kami tuh GT nya besar tidak bisa melaut sebenarnya kalau kapal ini bisa melaut, kami bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, tentu barangkali hampir sama dengan keluhan *stakeholder* yang lain, perizinan kapal. Perizinan kapal kami memang mengalami masalah yang cukup lama hampir mendekati 3 sampai 6 bulan. Dan ini sampai hari ini ada juga yang belum selesai. Mungkin barangkali ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

BUMN saja sampai 6 bulan?

DIRUT PT PERINUS:

Ya, kira-kira begitu Pak.

Kemudian yang berikutnya, kami ini kan membina nelayan juga Pak, kami membina nelayan hampir mungkin barangkali sekitar di seluruh Indonesia hampir sekitar 2000 orang tersebar di Indonesia Timur. Nah kami mengharapkan ada sinergi juga dari program-program pembinaan yang bisa dikembangkan bersama dengan kami. Oleh sebab itu nelayan juga bisa berkembang dan bisa juga nanti mengembangkan bisnis Perinus. Sebagai gambaran, bulan yang lalu Pak, kami sudah ekspor di Maluku Utara Pak. jadi di Pulau Bacan kita ekspor 50 ton cakalang ke Jepang. Itu adalah sebenarnya hasil dari nelayan Pak, hampir 50% dari nelayan. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita bisa ditingkatkan sinergi seperti ini akan berguna bagi kita semua. demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirut mengatakan tadi ada ekspor tuna dari Maluku.

DIRUT PT PERINUS:

Dari Pulau Bacan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pulau Bacan seberat 50 ton?

DIRUT PT PERINUS:

Iya Pak, 50 ton.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya minta, bukan, minta surat keterangannya dari bea cukai bahwa itu sudah di ekspor karena ada juga yang bicara sudah mengekspor komoditi ini sebanyak 20 ribu ton nyatanya cuman 1 kontainer. Itu ada, ya, jadi tolong nanti diberikan info seluas luasnya .Pak Menteri saran saya, yang nama BUMN diberikanlah kemudahan. Bulog saja bisa impor daging kerbau dari India kok. Kalau BUMN saja dipersulit apalagi swasta.

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan jawabannya. Jangan bertele-tele, kalau bertele-tele nanti kita kepotong ishoma. Singkat jelas.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik Pak Ketua dan Pimpinan yang lainnya.
Bapak Ibu anggota Komisi IV yang saya hormati
Terima kasih atau masukannya

Komentor terakhir BUMN memang komitmen kami sekarang kita akan melibatkan BUMN dapat porsi yang besar. Bagaimanapun juga tidak ada artinya kalau mengaku BUMN di sektor perikanan kalau Menteri KKP dan seluruh jajarannya tidak memberikan prioritas. Tapi Pak Pimpinan, kami juga butuh komitmen dari mereka. Jangan juga setelah diberi kesempatan, mereka juga tidak *delivery* terhadap semua tugas-tugas yang kita berikan. Banyak ruang yang kami lihat bisa kami kerja sama kan. Memang belum semua kami temui, baru secara informal. Perindo dan PT Garam sudah ketemu , tinggal Perinus. Dengan Perinus kita ada beberapa kendala tentang keranda jaring apung yang tadi jelaskan oleh teman-teman. Tapi ini sudah ada jalan keluarnya, tinggal nanti secara detil dikomunikasikan dengan

Menteri BUMN. Dengan Menteri BUMN sudah bicara secara umum tapi belum bicara detil. Dengan Wakil Menteri-Menternya sudah kami jelaskan, mereka tinggal butuh pendalaman tentang kerambah jaring apung di Sabang, kerambah jaring apung di Karimun Jawa, Kerambah jaring apung di Pangandaran.

Total uang yang sudah dikeluarkan oleh KKP senilai Rp 114.000.000.000. Sehingga dalam perjalanannya, ini terjadi *dispute* kemudian terjadilah tuntutan menuntut salah satunya di Sabang. Dari awal kita sudah ada jalan keluar waktu itu namun dari Menteri BUMN belum menyetujui di periode yang lama. Ini melalui Irjen dengan dengan pendalaman yang disampaikan, kita sebenarnya ada jalan keluar Pak Ketua. Dari kita, sebenarnya kita mengajukan tuntutan. Kalau kita saling menuntut 135 miliar. Tapi ada jalan keluarnya, yaitu yang pertama, seandainya saja BUMN mau mengakui apa namanya, surat pengakuan hutang sebesar 114 miliar itu, baru kemudian karena ini semua yang rusak, semua kerambah, 3 kerambah jaring apung semua barangnya masih ada Pak Ketua. Adanya di pantai. Cuma setelah ada perjanjian dan kesepakatan dengan pengakuan utang ini, kita akan melaksanakan *pre-conditioning* tentunya pemilihan tempat yang tepat.

Ada beberapa tempat yang kami sedang galang. Di Sabang kemungkinan akan kita tarik ke laut yang lebih teduh, lebih tenang di sekitar Simeulue, ini sedang kita garap. Kemudian yang di Pangandaran kita akan arahkan kalau tidak ada di sekitar laut Jawa atau di laut Jawa Barat kita akan bawa ke daerah Lampung. Sudah ada arah target sasaran kita di Lampung. Kemudian kalau di Karimun Jawa akan kita carikan apakah nanti ujungnya akan kita bawa ke Bali karena kita sudah pernah ada melakukan pelatihan budidaya ikan di Bali. Itu sebenarnya tinggal meneruskan Pak Ketua.

Nah intinya kalau nanti terjadi pengakuan utang, kita minta Perinus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tinggal paling harus ada investasi sedikit untuk menarik barang-barang itu untuk menarik ke lokasi-lokasi barunya. Setelah nanti jadi, karena ini bukan teknologi yang luar biasa susah Pak Ketua, tinggal pelaksanaannya. Setelah jadi kita akan serahkan kembali ke Perinus untuk mengelolanya. Bekerja sama dengan masyarakat nelayan atau pembudidaya yang ada di sekitar situ. Tentunya ini perlu masukan-masukan dari semua pihak.

Tapi intinya kita mengajak bagaimana upaya ini bisa selesai dengan baik, upaya ini tanpa harus berpikir siapa yang salah dan sebagainya. Karena ini bermula dari instruksi Bapak Presiden kalau untuk melakukan budidaya perikanan. Muncul lah daerah-daerah ini yang dipilih, terjadi kegagalan

seperti itu. Nah kita mau memperbaiki ini menjadi supaya efektif dan baik Pak Ketua. Peluang itu ada, tinggal nanti mohon Pak Ketua bisa juga memberikan dukungan dalam rangka menuju ke arah sini. Menteri BUMN yang baru secara prinsip siap untuk membuka komunikasi tinggal pelaksanaan apa namanya perjanjian yang harus kita terbitkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Menteri kalau saya dengar tadi dari perkataan Pak Ono, ini sebenarnya kesalahan dari KKP. Karena menurut Pak Ono, Perinus itu hanya pelaksana. Sekarang kadang-kadang gak berpikir pejabat kita kok tidak membanggakan bangsanya sendiri? Di KKP kan banyak orang pintar, kan ada namanya siklus. Siklus per 5 tahun, siklus per 10 tahun, berapa ketinggian gelombang, berapa ketinggian arus, itu kan banyak. Metodanya pintar orang KKP. Kok sampai sedemikian kecolongannya. Ini loh yang kadang-kadang saya ga habis berpikirnya.

Jadi kalau masalah tadi Pak Menteri, itu Pak Menteri selesaikan saja dengan Perinus, kami tidak boleh ikut campur. Kalau masalah tadi yang 100 miliar sekian, itu domainnya berdua. Kami sangat mendukung untuk agar cepat selesai, ya Pak Menteri? Silakan lanjutkan Pak Menteri.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan.

Ya sebelum ke menjawab yang lain Pak.

Jadi pada saat KJA *Offshore* ini dibangun, ini kan diawali oleh Pak Presiden yang menyampaikan pidatonya pada saat Rapat Koordinasi Kemaritiman di Taman Mini Indonesia Indah. Beliau mempunyai harapan besar karena melihat memang perikanan tangkap bergejolak terus sehingga beliau menyampaikan bahwa budidaya ini sektor yang belum digarap. Nah sehingga harapan besar sebenarnya Presiden untuk bisa teknologi yang baru ini untuk dikembangkan di Indonesia. Dan dipilih Norwegia juga teknologinya menurut saya tidak salah juga karena memang diakui budidaya *Offshore* Norwegia lah yang paling maju. Nah sehingga saat diresmikan oleh Pak Presiden, seminggu kemudian dihantam ombak, buyar semua tuh. Nah makanya kan ini salahnya dimana? Teknologi nya? Apa nya? Nah tentunya ini kan harus benar-benar nanti dihitung.

Nah yang kedua, kasus yang sudah masuk ke kejaksaan apakah dengan pola Pak Menteri tadi bisa selesai terus dicabut? Terus yang tadinya Direktur Utama nya tersangka terus akhirnya di SP 3 atau seperti apa?

Yang ketiga, faktanya saat ini juga KJA nya tidak beroperasi, magkrak. Dalam penguasaan mungkin kejaksanaan. Nah apakah ini tidak rusak? Kalau rusak apakah ini menjadi kerugian misalnya. Sehingga kan tetap ini permasalahan yang pelik menurut saya, yang saya pikir ya tetap kita akan awasi. Kita akan tetap bantu, makanya tadi saya bilang Direktornya sombong itu karena tahu tuh saya rekomendasi dari KKP, mereka harus bikin surat utang supaya tidak masuk kasus hukum, tuh saya tahu, saya sampaikan. Lagi malahan Direktur Utama nya tuh maksa untuk menggugat dan kalah. Pak Irjen, iya kan? Saya tahu Pak terkait dengan itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Ono? Cukup Pak Darori.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya, cukup Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri tadi banyak pertanyaan dari anggota. Tolong dijawab dengan singkat. Saya berharap sebelum magrib kita sudah selesai.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik Pak Ketua.

Jadi kasus Perinus dengan kerambah jaring apung ini sebenarnya belum ada serah terima yang kita terima dari KKP sampai sekarang Pak Ketua. Makanya ini masih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tapi itu penugasan dari KKP ke Perinus? Kerambah apung itu, penugasan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Tidak. Proyek yang belum selesai.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kenapa?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Belum diterima Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Enggak. Penugasan atau maunya Perinus? Penugasan beda loh, Pak Menteri. Ini saya tugaskan kamu untuk bangun jaring apung duitnya sekian kamu kerjakan, atau bagaimana?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Lelang terbuka Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oh jadi ada lelang terbuka, Perinus ikut. Berarti bukan penugasan? Oh iya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Makanya kita harus cari jalan keluarnya Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pintu keluarnya situ Pak, nanti Pak setelah selesai Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Dari Bu Endang tadi bicara masalah profesor-profesor riset menjadi fokus kita. Kita juga merasa yakin ada kekuatan besar di KKP yang belum terlaksana, masih ditidurkan, belum dibangun. Kami sudah berdiskusi dengan Dirjen BRSDM untuk membangkitkan ini.

Kemudian masalah permodalan di BLU kita juga dapat berita gembira dari Pemerintah selain BLU yang dimiliki oleh KKP juga ada KUR. Dana KUR ini bunganya turun dari 7% menjadi 6%. Kemudian besaran uang kreditnya

dari 25 juta bisa sampai 50 juta. Yang 50 juta ke bawah tanpa agunan. Ini bisa diakses oleh siapa saja nanti akan ada pendampingan-pendampingan. Kemudian bantuan-bantuan yang lain sedang menjadi masukan kami, terima kasih Bu Endang.

Kemudian Bu Luluk, Bu Endang juga dan Bu Luluk tadi fokus tentang pemberdayaan perempuan. Secara prinsip kami ingin memfokuskan semua kegiatan bagaimana perempuan-perempuan ini menjadi ujung tombak juga karena kita merasa di laut ini juga banyak juga tokoh-tokoh perempuan disini yang merasa diabaikan. Nah kami berharap perempuan bisa maju dan juga tidak kalah kalau bisa juga mengelola kapal sampai ke tengah laut. Ini saya sudah komunikasikan lewat Menteri Pemberdayaan Perempuan. Saya minta kalau memang ada sampel-sampel, KKP siap bekerja sama termasuk Ibu-Ibu yang ada di dapil masing-masing manakala ada perempuan-perempuan yang ingin melaut atau ada kegiatan lain mohon disampaikan.

Tadi ada masukan dari Pak Daniel Johan tentang pemberdayaan dapil. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya merasa pernah 10 tahun jadi anggota DPR RI gimana rasanya jadi anggota DPR RI. Kita merasa lebih paham sebenarnya di wilayah kita masing-masing, maka itu bagi kami kekuatan yang tidak kalah pentingnya bagi KKP adalah kekuatan yang selama ini kurang dilirik yaitu keberadaan dapil-dapil Bapak Ibu sekalian di daerah. Kami berharap ke depan ini juga bukan hanya sekedar cari muka di depan Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan sendiri peran ini.

Tadi ada usulan tentang kampung nelayan, memang sudah terdata di kita untuk melakukan ada mungkin satu dapil. Kalau dalam satu dapil ada dua atau tiga anggota juga tidak masalah tinggal penyebaran saja diatur. Bapak Ibu tolong tunjukkan ke kita mana daerah sasarannya dulu, kami lagi bangun modelnya. Karena juga dalam membangun itu tidak bisa kita sendiri. PU, Perhubungan juga siap akan membantu. Komunikasi kami dengan Kementerian UKM juga akan terbantu. Domain yang lebih besar dia yang akan ikut menyerahkan. Seperti misal tadi dengan pemberdayaan perempuan. Bu, nanti kalau yang menyerahkan dari teman-teman Komisi IV gak dapat, wah kita gak masalah. Yang penting perempuan-perempuan di bawah saya hidup dan bergerak. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ini supaya ini bisa tajam tidak usah nanti terlalu ke permukaan. Bapak Ibu lah cari dimana titik-titiknya. Tolong kami diarahkan dan kami ditunjukkan. Kalau bisa jangan lama-lama, tahun pertama. Jadi ini salah satu masukan yang saya pikir sangat luar biasa.

Masalah kartel di garam, Bapak Ibu sekalian. Memang kelemahan kita, garam, industri garam di Indonesia awalnya memang tidak produktif. Kedua,

tidak efisien. kita sudah melakukan terobosan-terobosan, melakukan geomembran. Sudah terbukti produktivitas melalui geomembran itu yang tadinya hanya produksinya 84 ton per hektar, ini sudah ada yang sampai 140 an, 130 140an ton dan kualitas garamnya lebih putih. Sementara kita dari 27 ribu hektar garam, lahan garam yang ada milik masyarakat baru 7 ribu. Nah permasalahan utama dihadapi oleh garam kita Bapak Ibu, tadi ditanya oleh Pak Panggah dimana posisinya. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau garam, beda sekali dengan beras. Garam itu sangat kelihatan sekali karena sedikit tempatnya.

Masalahnya adalah ini terjadi perdebatan antara garam industri dan garam makanan minuman. Sebenarnya kalau kita, lupakanlah garam industri, kalau kita fokus dengan garam kita belum mampu masalah kualitas untuk garam industri karena memang bisa memang betul sekali garam industri itu ada kandungan-kandungan yang tidak ada di dalam garam yang diproduksi di laut kita. Namun demikian ada juga laut kita di bagian tertentu yang bisa memproduksi ini. Saat ini garam kita belum bisa dipakai untuk industri untuk chlor alkalin (CAB), chlor alkalin. Jadi kita ada ini spesifikasi khusus.

Kami sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, kemarin rapat. Memang kita juga tidak bisa menampilkan bahwa kita harus tetap impor yang itu. Kita sekarang sedang menggodok bagaimana industri makanan dan minuman harus menyerap. Seandainya ini 100% diserap garam kita, garam kita pun cukup ideal untuk bisa dilakukan. Maka ini terus menerus kami komunikasi dengan Menko Perekonomian. Dan ini ada jalan keluarnya. Kalaupun memang ujungnya tidak ada jalan keluarnya kamu sudah menyiapkan payung cadangan tapi ini kembali lagi ke kultur apakah para penambang garam mau berpindah, ikut bertambak atau mencari kita bantu dengan kerambah jaring apung ini masih dalam tahap penelitian. Bapak Ibu Sekalian.

Kemudian tentang perikanan tangkap, tentang perizinan. Kenapa tangkap stagnan? Memang secara prinsip maksimal persediaan ikan kita setahun itu hanya 12,5 juta maksimal sementara aturan untuk menangkap itu hanya 80% saja. Berarti walaupun kita harus tangkap semuanya maksimal tuh sekitar 9 juta setengah. Nah sementara ini kemampuan kita menangkap ikan baru 7an 7,9 makanya ini lah masih ada gap yang menurut saya masih bisa kita tingkatkan. Cara meningkatkannya bagaimana? Tadi pertanyaan banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya belum bicara teknologi yang lain. Yang ada saja dulu kita sederhanakan. Izin, perizinan tadi juga masalah *transshipment* yang di lapangan karena ternyata kapal-

kapal yang selama ini nangkep dari Jawa dari Sumatera. Nangkep sudah penuh balik lagi ke Jakarta ongkosnya sudah lebih dari Rp 4.000.

Nah seandainya ada dibantu dengan kapal angkut, jadi misal: Perinus kita berdayakan, ada kapal angkutnya yang 500an ton, itu saya pikir salah satu solusi dan masih banyak lagi solusi lainnya. Sebelum kita memutuskan untuk melepas bahwa ada kapal angkut untuk semua ataupun pengusaha ini kami butuh waktu untuk mengkaji beberapa saat saja karena saya yakin tidak butuh waktu lama. Banyak alih-alih nya.

Bapak Ibu sekalian

Kemudian masalah.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan.

Masalah perizinan sebelum dilanjut.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Saya pikir Pak, izin dulu saya selesaikan dulu. Nanti silakan masuk biar saya juga gak keputus. Kadang-kadang kalau saya ngomong begitu di *stop* saya juga susah konsentrasinya. Mohon izin boleh disetujui Pak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E):

Pak Ono masalah perizinan nanti setelah Bapak Menteri menjawab tuntas. Kalau perlu Pak Ono sama Zulficar berdua disini, kita pulang. Lanjutkan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ono, Pak Sudin.

Karena kalau fokus.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Tentang sampah laut dari Mba Luluk, masih. Ini memang harus ada terobosan khusus. Kita adalah penyumbang sampah nomor 2 di dunia setelah Cina. Nah sudah ada beberapa kemarin sebelum kami rapat kesini dan diundang Menko kami berbagi tugas. PU bertugas menyelesaikan sampah laut dimana, kami kemarin ditawarkan untuk di daerah Labuan Bajo.

Itu ada sekitar tumpukan sampah yang gak begitu besar sekitar 8 ton sebulan. Nah kita diminta mengelola wilayah sampah ini. Ini tentunya baru sebagian kecil tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, yang kecil-kecil ini gak kita mulai. Saya yakin yang besar janganlah kita mimpi untuk dapat yang besar.

Maka itu ada hal lain, tadi ada masalah Pak Wakil Ketua Pak Daniel menyampaikan tentang pendidikan yang tidak mengarah, betul sekali Pak. Kami setuju. Makanya kita mencari jalan keluarnya dengan menghidupkan pendidikan vokasi-vokasi jemput bola. Dengan program BSDM kita ada program bagaimana kita melakukan kegiatan vokasi-vokasi sampai ke rumah nelayan termasuk pembinaan pembersihan sampah di muara sungai. Semua sudah kita garap untuk segera bisa kita lakukan.

Kami mohon juga Bapak Ibu sekalian yang punya daerah-daerah pesisir yang menemui masalah terhadap sampah, kita ada anggarannya untuk bisa melakukan alat-alat bagian pembinaan masalah pesisir untuk mengelola sampah. Sampah kalau plastik saya pikir kan dulu susah dibuang tapi sekarang dengan plastik diolah bisa dibuat biji plastik, banyak sekali ini teknologinya dan gak terlalu mahal. Ini salah satu dengan konsep menjaring sebelum masuk ke laut kita jaring di muara-muara sungai. Ini semua perlu *effort* dan perlu kemauan yang besar.

Pak Ono tadi KJA sudah kami jelaskan dan memang tidak mudah. Kami akan terus berkonsultasi dengan pihak hukum. Pak Jaksa Agung sudah kami berkomunikasi, beliau siap membantu setiap kegiatan termasuk terhadap penanganan nelayan-nelayan kita di lapangan kita akan memfokuskan untuk pembinaan bukan hukuman atau pidana dulu. Selama ini masyarakat nelayan, masyarakat yang harus kita kasih tahu karena kesalahannya dia harus kita bina. Kecuali kalau mereka benar-benar melakukan pelanggaran tindakan pidana seperti penyelundupan atau mengirim benda-benda yang terlarang misalnya bahan ledak ataupun senjata.

Kemudian masalah perizinan kapal, kita mengupayakan, tadi sudah kami sampaikan pada saat pembukaan secara prinsip kami akan terus memperbaiki diri, kami selalu akan mohon bantuan-bantuan dari Bapak untuk memberikan masukan-masukan kepada kami.

Ibu Nur'aeni tentang dokumen dan data yang belum siap. Kami ke depan akan kami siapkan termasuk tadi ada pulau-pulau terluar yang tidak terjangkau jaringan listrik. Masalah zonasi laut juga menjadi PR. Kami juga sangat berhati-hati, kemarin di Bangka Belitung dapat masukan dari masyarakat ada keluhan. Kemudian dari Pemerintahnya perlu ada zonasi,

ada BUMN Timah kita disana, perlu adanya penentuan zonasi akhirnya ada komunikasi yang 2 arah dan bagaimana ini semua yang nelayan kecil tidak terganggu tapi BUMN kita masih bisa memproduksi timahnya tanpa harus mengganggu nelayan. Jadi kita terus upayakan. Ada kita masih punya terhutang sekitar 12 izin zonasi yang belum beres dan *insyallah* ini sedang kita matangkan dan mudah-mudahan ini begitu kita keluarkan tidak bersentuhan dengan masyarakat nelayan.

Pak Haerudin, Jabar Selatan kami juga masukannya terima kasih. Kalau bisa Pak nanti secara spesifik modelnya apa tentang kapal. Selama di Komisi IV kita juga selalu mengeluhkan banyak masukan, ada kapal-kapal disetujui pakai fiber tapi beberapa daerah tidak bisa fiber. Maunya kayu, maunya yang lebih kecil lagi. Kami juga membuka diri untuk mengutamakan kata Pak Ketua tadi, kearifan lokal. Kami butuh masukan-masukan yang jelas kan kita ini kalau kapal-kapal kecil di daerah bisa dibantu, yang masalahnya kan uangnya gak ada. Alat (suara tidak jelas) ya ini nanti perlu masukan-masukan detil Bapak Ibu sekalian

Pak Johan, yang sudah kami sebutkan masalah garam di Bima menjadi nanti kita akan terus. Masalah konsentrasi pariwisata memang sudah tugas dari Pak Presiden, tidak usah berpikir seperti biasa, harus luar biasa ada terobosan. Kalau bias kampung nelayan itu berfungsi juga sebagai Kawasan wisata, kenapa gak kita lakukan? Yang penting pasarnya kita tahu. Kami juga siap untuk menerima masukan itu. Sekali lagi Pak, kalau memang Bapak sudah ada rencana wilayah yang akan Bapak kembangkan mohon kami dikasih tahu juga. Kalau sudah ada sampai situ lebih baik juga buat kita.

Masalah pejabat yang tadi Pak Slamet, masalah pejabat nanti kami sampaikan ada datanya biar Pak Sekjen yang serahkan. Memang benar termasuk Pak Sekjen juga kita berikan sanksi, kita ingatkan. Tapi akan kita sampaikan ke Pak Slamet. Kemudian bantuan-bantuan kami sangat setuju akan kita evaluasi, setuju juga. Kami mohon juga kalau Bapak mau mengecek juga dimana silakan biar juga kalau bisa jangan kami tahu dimana biar seolah-olah kami tidak siap-siap ini. Ini juga bagus untuk *feedback* ke kami dalam rangka penyempurnaan bantuan-bantuan. Kami juga merasa memang banyak juga, pada *cold storage*, *ice flake* yang masuk ke daerah tapi tidak ada listriknya. Nah ini kami juga akan melakukan evaluasi dimana-mana itu yang bisa kita optimalkan atau kita relokasi, kita akan fokuskan.

Pak Budi, nilai tukar nelayan ya memang, memang kalau kita lihat dari kenyataan masih jauh dari.. tapi yang bikin nilai tukar nelayan tuh bukan kami Pak, yang bikin BPS. Kita tidak tahu dasar-dasarnya apa. Tapi peningkatan ataupun penurunan adalah yang melakukan pihak yang kami sendiri tidak

bisa intervensi. Subsidi, kita tidak bisa mengintervensi subsidi, tapi kita selalu nanti berkomunikasi dari pihak yang melakukan subsidi sebagai misal solar. Kita juga mendapat keluhan SPBN di beberapa wilayah sekarang ini masih sangat sulit menerima SPBN. Nah ini juga mohon kami diberi masukan karena program kami ke depan akan terus memulai SPBN-SPBN ini akan semakin ada. Mudah-mudahan Dirut Pertamina yang baru nanti kalau terpilih katanya akan ada pergantian, kita agak tahu atau Dirut yang sekarang juga mau komunikasi. Di tempat kita juga ada orang Pertamina yang sebentar lagi akan kembali ke Pertamina. Pak Tio, berapa lama lagi Pak? Mohon surat pengantar dari Ketua Komisi. Pak Tio memang sudah harus dikembalikan karena diminta sama atasannya kembali sehingga kita akan ada pergantian.

Nah masalah *foreign direct investment* atau *domestic investment*. Saya, kita belum punya presifik target yang harus kita lakukan, siapa yang menjadi sasaran. Tapi satu hal yang harus kami laporkan ke Bapak yaitu sekarang ini sangat banyak yang ingin masuk ke sektor dunia bisnis ini baik itu dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Tapi yang mereka inginkan kepastian perlakuan usaha. Bagaimana perizinannya, bagaimana aturannya, bagaimana, ini yang kita sekarang sedang perbaiki dan mudah-mudahan kalau ini semua sudah pasti saya yakin *domestic* maupun *foreign* dari *investment* itu harusnya tidak masalah.

Pak Muslim, masalah perizinan saya pikir kita sama . kemudian 1000 kapal tadi yang belum rekom memang kita mensinyalir lebih dari 1000 yang belum dapat rekom tapi sudah menjadi kapal, sudah ada sebagian yang memberanikan diri nangkap, ada yang sudah ketangkap ada yang memang masih malu-malu untuk keluar. Ini juga nanti kita akan lakukan upaya pendekatan secara persuasif mungkin mereka kita ajak untuk bayar denda atau apa. Kemudian yang secara manusiawi untuk segera menyelesaikan ini. Kita lagi data terus dan kita prioritas kita dalam bekerja.

Kemudian solusi untuk pakan mahal, kita sudah melakukan lebih dari 3 tahun bagaimana 40% ongkos budidaya ikan yang di sektor pakan ini bisa segera kita selesaikan dengan cara membantu masyarakat membagi alat pembuat pakan dna sentra-sentra pakan-pakan dimana pusat yang budidaya itu sudah banyak di beberapa wilayah tapi mungkin itu belum optimal. Di samping itu juga kita akan berkomunikasi langsung. Sudah ada komunikasi dengan para industri pakan ternak ikan. Mereka sendiri secara prinsip mau menurunkan kita mau buka-buka “Anda mau turunkan harga atau memang harga ini karena harganya memang mahal? Tapi kalau Anda mengambil untungnya besar-besar, kita akan dengan program kita” jadi mereka juga ingin terbuka sama kita, siap untuk menurunkan tapi belum tahu sampai

sejauh mana ini Pak Muslim. Ini baru komunikasi ya Pak Muslim, belum sampai kepada tanda tangan kontrak dan sebagainya.

Kemudian Kawasan konservasi wisata, pariwisata. Bagian tadi yang sudah saya jelaskan, banyak sekali tempat-tempat yang memang sangat berpotensi untuk wisata. Pak Suhardi Duka, masalah koral. Tadi saya lihat Bapak sangat fokus. Kami juga ingin yang namanya pengusaha koral juga tidak mati suri, tidak mati. Kita akan memberi fasilitas secepatnya sehingga kejelasan industri ini segera bisa hidup kembali. Kita adalah negara yang punya potensi menghasilkan koral nomor 1 di dunia, sekarang sudah disalip oleh Australia. Nah kita berharap ini bisa hidup. Hanya kita ada masalah di Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang Pesisir dilarang tapi jangan khawatir kita sudah ada mekanisme *omnibus law*. Kalau memang ini akan dilakukan. Tapi intinya begini Pak. Konservasi dulu kita pegang kemudian ada jaminan dulu dari para pengembang ini tidak menyentuh konservasi sehingga masalah undang-undang tadi yang di luar konservasi pun kita bisa lakukan melakukan melalui terobosan *omnibus law*.

Kalau budidaya sudah pasti akan kita lakukan. Nah sekarang bagaimana kita membedakan budidaya dan konservasi? Kita punya langkah-langkah, Badan Karantina kita punya alat sampai jangkauan cukup luas. Dan saya pikir itu kontrolnya bisa. Jadi sebelum kita lepas sampai ke pelabuhan, karantina harus memberikan rekomendasi apakah itu sebagai misal termasuk di daerah Bapak yang sama sekali gak ada konservasi kita juga akan terobos. Kalau bisa Pak, nanti usulan konkret ada pengusaha-pengusaha koral Bapak di Sulbar itu seperti apa? Bisa saja daerah-daerah yang tidak ada masalah terhadap koralnya boleh ini seperti apa? Dan juga kami mohon waktu supaya tinjauan kita ini melalui kajian-kajian yang punya nilai strategis yang juga tidak asal semena-mena atau melakukan keputusan *sa maunya* saja. Kita mau mendengar semua sektor.

Kemudian masalah regulasi. Saya pikir regulasi sama, kita pasti akan memihak yang paling kecil masyarakat nelayan. Yang besar juga tetap kita olah tapi kita tahu yang besar ini juga bisa hidup sendiri. Tapi kalau juga (suara tidak jelas) kita gak ada gunaan. Tidak akan juga jalan. Bagaimana yang besar bisa hidup, bagaimana yang kecil juga tidak ketinggalan. Mudah-mudahan kita gak jadi calon *disclaimer* Pak. Kita juga memahami yang kita pelajari juga terus dan kita terus memperbaiki diri.

Kemudian Pak Krisantus, danau Laik. Kami mohon nanti Pak apa yang bisa misalkan kita kan gak ngerti nih Pak, itu danau sejauh apa? Mungkin sudah ada kajian dari Kepala Daerah Bapak tentang danau itu. Langkah-langkah apa? Misalnya apakah kerambah jaring apung? Atau apa? Kita

belum tahu ya mungkin dangkal, tapi kan pada saat musim hujan itu kan mungkin bisa tinggi nah langkah-langkah ini kan bisa kita atur sehingga bisa memanfaatkan. Sayang sekali Pak. Airnya luas tapi tidak bisa kita manfaatkan. Saya butuh masukan, kami butuh masukan sama Bapak. Jangan nanti ini sebagai cerita, Bapak bisa saja fokus sebagai danau lain, Sentarum. Memang kami tahu Bapak penghasil ikan yang paling terkenal di dunia. Ikan super red, di rumah saya ada 20 ekor. Sebelum jadi Menteri sudah punya ikan arwana, jadi jangan khawatir Pak, kita sudah biasa.

Pak Krisantus, ini garis besar mohon yang tadi konsep beje itu salah satu alternatif untuk budidaya pada saat airnya dangkal kemudian kering sehingga Bapak masih punya kolam ikan disitu. Tapi sebanyak sejauh mana sebanyak berapa itu tergantung berapa kebutuhan yang bisa dilakukan secara kajian. Kami mohon kalau daerah Bapak sudah ada, misalnya sekarang Bapak dengan ini mau memanfaatkan seperti apa, tanya kepala daerahnya atau masuk di Kabupaten atau Provinsi. Saya piker supaya lebih enak langsung Provinsi saja Pak sehingga kita lebih mudah untuk mengontrolnya Pak. Karena Undang-Undang 23 kan semuanya sudah lari ke Provinsi.

Kemudian Pak Abdullah Tuasikal, lumbung ikan nasional menjadi catatan dari dulu kami ikut juga mendorong. Tapi sebelum kita bicara lembaganya Pak Abdullah, kita mungkin lebih baik fokus dulu dengan kegiatan-kegiatannya. Silakan nanti bahwa ada badan atau lembaga buat kita gak penting. Karena prinsipnya kalau ada badan tapi gak jalan juga, gak ada gunanya. Nah kami akan fokus kemarin saya sudah ketemu dari Gubernur Maluku dia hadir ke kantor. Secara prinsip begini Pak, kami ini kan Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi kalau Menteri Kelautan dan Perikanan fokusannya tidak memikirkan daerah yang banyak laut itu berarti salah besar arahnya. Betul daerah yang banyak penduduk kita sasar. Jawa sebagai misal, ini menjadi prioritas. Sumatera. Tapi untuk menggenjot produksi karena hampir setengah produksi itu ada di tempat Bapak, lebih dari setengah produksi ada di tempat Bapak. Sementara Pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan devisa supaya mengurangi defisit. Disinilah peluang yang kita lakukan.

Kami sudah terjadi komunikasi secara garis besar, tinggal nanti teknis pelaksanaannya. Mohon nanti Bapak sebagai mewakili masyarakat Maluku ikut juga menyampaikan atau menugaskan atau mengawasi terus pelaksanaan kegiatannya. Masalah moratorium tadi yang pulau Banda, itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh laut Banda Pak, jadi

pengertiannya terbawa semua. Tapi ini akan kami koreksi untuk kita perbaiki Pak. Sudah tadi dalam catatan.

Pak Sutrisno terima kasih masukannya Pak. Kami gak ngerti apakah tercapai atau tidak. Tapi kami sangat meyakini dengan program yang kita yakini bisa kita perbaiki di capaian keluarnya bisa Pak. Tapi kami mohon dengan adanya Bapak disini selalu akan ingati kami, mudah-mudahan pencapaian kami juga akan lebih baik. Karena secara prinsip kami baik pasti Komisi IV juga yang dapat nama.

Pak T.A. Khalid, penenggelaman kapal bukan tidak penting Pak. Bagi kami penenggelaman kapal adalah solusi yang memang menjadi catatan dan itu yang terakhir. Tapi kalau ada yang melanggar, itu sudah kita lakukan saja. Gak mau di peringatkan, kita kejar. Dia malah lari, kita tembak saja Pak. Saya juga tidak takut untuk menenggelamkan kapal. Tapi kan kita tidak boleh berpolemik dengan penenggelaman kapal saja. Yang harus kita lakukan apa yang setelah penenggelaman kapal? Ikan harus di tangkap, ikan harus di budidaya. Nelayan harus kita kasih makan, nelayan harus kita kasih kesempatan. Nah kalau fokus di satu isu, kita gak akan dapat manfaat yang lain, untuk apa? Makanya bukan berarti kami tidak menghentikan penenggelaman kapal. Kami akan tetapi melakukan penenggelaman kapal kalau memang ada kapal kita yang tidak yang kapal-kapal asing masuk yang dikasih tahu gak mau, dia dikejar lari gak menyerahkan diri, ya kita terpaksa tenggelamkan. Maka dari itu terima kasih atas dukungannya.

Masalah di Aceh. Pelabuhan-pelabuhan yang sudah dangkal kami juga temukan tidak hanya di Aceh. Di beberapa daerah juga ada. Ini sebenarnya solusinya sudah ada tinggal bagaimana pelaksanaannya Pak. Kata Pak Sudin mau atau enggak, *insyallah* mau Pak Sudin. Kalau Bapak mau saya mau.

Pak Panggah, masalah rendahnya penyerapan. Tadi sudah kami hitung Pak Pak jadi itu angka yang disini ini itu belum termasuk bulan terakhir yang rata-rata untuk gaji itu 6% berarti ditambah 6% sementara sekarang ada proyek-proyek yang sudah berjalan yang sudah dalam proses tepi kami belum catat Pak. Hitungan kami itu di atas 90 Pak, rata-rata diatas 95. Mudah-mudahan tercapai. Ada beberapa yang memang perlu kita minta perpanjangan sebagai misal di PDS. Pembangunan beberapa pasar ikan modern yang mungkin tidak akan selesai di akhir Desember ini, kami akan minta perpanjangan. Jadi secara prinsip penyerapannya tetap akan lebih dari 90 Pak. Terima kasih Pak (suara tidak jelas).

Nah perikanan budidaya memang ini salah satu peluang besar sebagai misal begini Pak. Di Indonesia ini ada budidaya udang, udang yang

intensifikasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha itu rata-rata menghasilkan paling sedikit 50 ton per hektar. Sementara udang-udang milik petani biasa, rakyat biasa itu rata-rata 1 ton saja. Berarti ini kan ada gap. Kalau gap ini bisa kita persempit artinya si petambak ini kita kasih budidaya yang intensif, kita kasih tahu cara berbudi daya yang baik. Saya yakin bisa kita tingkatkan sampai 5 ton saja ini sudah meningkatkan yang punya rakyat itu 400 kali nya. Nah ini sudah dilakukan di Muara Gembong, di Bekasi. Yang sudah terbukti kita kerja sama dengan Menteri UKM Mandiri, dibimbing oleh Dirjen Budidaya dan KLHK ternyata masyarakat sana sudah menghasilkan sampai 7 ton Pak. Jadi, dan kalau ini kita masif, saya pikir kita bisa lakukan.

Luas tambak kita tuh, tambak udang kita 300 ribu hektar. Yang ada saja 300 ribu hektar. Kalau kita fokus di 300 ribu hektar ini saja harusnya tidak ada masalah. Sementara para kepala daerah dari Sulawesi dari beberapa daerah di Indonesia Timur dari Maluku, mereka juga siap untuk membangun di daerahnya Kawasan-kawasan budidaya tambang udang. Dan saya pikir kalau ini terjadi dan kita bisa buktikan saya pikir untuk 1 komunitas saja tidak terlalu sulit kita tingkatkan Pak.

ANGGOTA KOMISI IV:

Kan sudah dianggarkan Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Sudah Pak.

Begini Pak, anggaran yang sekarang ada ini adalah eksisting yang kita sepakati dari tahun lalu. Saya belum merubah mengotak-atik. Tapi secara aturan boleh, nanti pada saat di perjalanan ada hal yang perlu kita geser. Saya tentunya akan minta persetujuan Bapak Ibu sekalian di Komisi IV. Selama itu akan memindahkan dari Dirjen yang sat uke Dirjen yang lain, kami akan minta persetujuan. Dan ini semua tentunya perlu apa namanya perlu penyesuaian-penyediaan di depan tentunya atas persetujuan Bapak Ibu semuanya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Edhy tadi realokasi akan dibahas dulu di Komisi IV karena selama ini realokasi kan hak gua jadi lo gak perlu tahu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Tidak Pak. Kami akan memberikan usulannya, Bapak yang akan mutuskannya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya gak? Kan selama ini begitu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Siap Pak, tidak Pak. Terima kasih Pak. Selama ini kan saya masih di Komisi IV.

Jadi Pak Darori, terima kasih Pak atas semangatnya mengingatkan kami tentang korupsi. Ya kita akan selalu fokus untuk hal itu, kita akan hindari. Masalah tadi, pantai Bapak yang terpanjang. Kita sedang tadi itu melakukan vokasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar pesisir. Kalau Bapak sudah ada masukan sebelum kami nanti terjun langsung dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten. Bapak sendiri silakan usulkan dimana sasaran-sasaran itu. Misalnya untuk budidaya apa saja Pak, kami akan siap dan Dirjen BPSDM juga siap dengan langkah-langkahnya, Bapak kasih tahu. Masalah koral Pak, saya pikir sama tadi sudah sempat disampaikan.

Bu Alien Mus, anggaran.. Bu Alien Mus ada? Gak ada ya?

Ya Pak tadi ini ada pertanyaan tentang anggaran PSDKP. Anggaran PSDKP memang meningkat. Kita rencana akan beli 2 kapal pengawasan untuk membuktikan bahwa kita komitmen untuk mengawal laut kita. PSDKP akan kami beri kesempatan dan akan kami pergunakan optimalkan untuk pengawasan sepenuhnya Pak. Karena ini adalah kekuatan yang kita miliki. Memang dulu pernah ada keraguan terhadap PSDKP yang dianggap bahwa PSDKP adalah biangnya pem *backup*, pelaku *illegal fishing*. Kemudian ada Polair *road*, ada Bakamla, ada angkatan laut, ada kejaksan, ada KPLP. Kami *insyaallah* tidak ada masalah berkomunikasi. Sebenarnya kalau koordinasi dengan pihak terkait ini sudah tidak ada masalah harusnya masalah yang di laut ini bukan masalah besar lagi Pak Ketua. Tentunya kalau Pak Ketua membela kami, pasti lah masalah ini akan lebih ringan lagi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya pasti membela, tapi memang PSDKP konon katanya dahulu kala ya seperti apa yang dikatakan oleh Menteri. Maka dibuatlah Satgas 115. Nah ini setelah PSDKP berjalan dengan baik, ya dikembalikan saja fungsinya, ya *toh?* Orang kedaulatannya Menteri kok PSDKP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Siap Pak. Terima kasih Pak.

Pak Bambang Purwanto. Di Kotawaringin Barat masalah pabrik tepung. Pak Bambang mana? Pak yang Kotawaringin Barat tolong nanti di *detail* kan saja yang masalah-masalahnya. Yang kekurangannya apa, segera saja Pak nanti Pak Dirjen Budidaya Kotawaringin Barat nanti silakan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Oh iya siap. Sama pabrik itu Pak tadi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Ya pabrik tepung kan? Sama Dirjen PDS.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Baik nanti akan saya berikan data yang lebih lengkap.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik Pak.

Pak Sumail, pengolahan pulau-pulau kecil saya pikir sama, sudah saya sampaikan. Terus yang masalah pelabuhan pendaratan ikan Muncang, Banyuwangi. Nanti biar kami lihat Pak, Muncang Banyuwangi apa masalahnya kalau Bapak sudah tahu. Muncang? Muncar? Muncar, kaya apa dia Muncar. Muncar Banyuwangi jadi mohon ini nanti menjadi masukan. Kalau Bapak sudah tahu langkah-langkahnya harus seperti apa, kasih tahu juga ke kami Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Masih panjang Pak Menteri? Masih Panjang jawabannya?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Sebentar Pak, sudah dikit Pak. Karena Bapak tadi merintahkan harus jawab semua, jadi saya jawab.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oh ya harus dong. Karena nanti atasan *complaint* sama saya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Kalau garis besarnya aslinya pendek Pak.

Siap Pak

Pak Rudi terima kasih atas masukannya. Pak Rudi mana?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Gak ada gak usah dijawab kalau gak ada.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Pak Ono, masalah PerMen mohon waktu. Semua PerMen yang Bapak masukkan tadi, yang Bapak sampaikan tadi kami tidak bisa jawab detil. Kami yang jelas, kami akan kaji. Ada waktunya kami akan umumkan dan sebelum umumkan kami akan minta pendapat Bapak Ibu semuanya pada waktunya. Karena kami harus perlu kehadiran. Kalau sekarang saya keluarkan, Pak Ono. Kemudian saya komentarin nanti berikutnya akan panjang dan akan lucu. Bapak tahu sendiri. Nanti Pak, nanti Pak.

Masalah termasuk *transshipment*, kapal-kapal. Nah kapal-kapal yang termasuk aneva Pak Ono, yang Analisa evaluasi. Dulu Analisa evaluasi selesai 1 tahun, kita dulu semua waktu di Komisi, kami waktu di Komisi IV ingin anev itu tindak lanjut nya apa. Kemarin dalam rapat dengan Menko kapal-kapal yang di anev ini sebagiankan sudah pulang ke negara asalnya. Tapi kan masih ada yang *stranded* di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tersebar di lebih dari 10 pelabuhan yang ada di Indonesia. Dari Bitung, Benoa, termasuk ke apa namanya di Ambon Merauke.

Nah Pak Ketua, ini kami diminta untuk memberikan rekomendasi mau ke arah mana karena ini jenis kapal termasuk dalam kapal eks asing. Eks asing ada yang eks asing dia beli dari luar negeri yang sebenarnya sudah ada rekomendasi dari KKP kemudian di bangun setelah dibangun dia kembali ke Indonesia, peraturan sudah berubah, dia gak dapat izin. Nah ini kita juga akan melakukan apa namanya itu rekomendasi-rekomendasi yang nanti juga kami akan bawa rapat ke dalam rapat Menko Pak. Sebelumnya juga kami akan sampaikan ke Pak Pimpinan. Kalau nanti Pak Pimpinan ada waktu, kami perlu berkonsultasi.

Masalah hibah kapal Pak Ono. Kita ada kapal 72 kapal yang sudah inkrah, 45 kapal dalam kondisi baik sisanya 26 kapal kondisinya masih sudah tidak baik, sisanya harus dimusnahkan. Nah yang 45 yang baik ini kemarin dalam rapat kami dengan Menko, Menteri Keuangan, dan Kejaksaan Agung kita mau hibahkan. Nah penghibahan ini kan kembalinya bukan di KKP lagi Pak. Penghibahan ini harus dilakukan oleh Menteri Keuangan karena ini sudah menjadi aset negara. Nah arahnya seperti apa, kami nanti diminta memberikan masukan-masukan termasuk sasaran. Hanya kemarin Menteri Keuangan mengingatkan kalau kita mau hibah di dalam Pemerintah itu sendiri tidak terlalu susah. Sebagai misal ada kapal yang besar di Lampulo di Sabang itu ada yang sampai 2000 GT lebih itu sudah diminta untuk rumah sakit terapung Pak Ketua. Nah ini mungkin tidak terlalu bisa. Tapi ada beberapa kapal yang jenisnya itu lebih dari 40 GT di daerah Batam kemarin itu. Kapal eks asing yang ketangkap sudah Inkrah. Apakah ini seperti apa, nah ini nanti kami akan memberikan masukan dan pada akhirnya akan di rapatkan dalam Ratas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Satu hal Pak Menteri, dalam hibah tersebut jangan sampai menjadi beban nelayan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada pelanggaran peraturan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Siap Pak, terima kasih Pak masukannya.

Nah masalah kapal modal asing Pak Ono, kami setuju. Kita tidak akan juga melibatkan penangkapan laut kita menggunakan pengusaha-pengusaha asing karena nelayan kita sendiri sudah mampu untuk nangkap ikan. Tinggal mampu tidak atau diberikan kesempatan atau tidak.

Masalah penyuluh kami sudah berkomunikasi dengan penyuluh yang selama ini sering kita lakukan, hari yang lalu kita juga sudah mengumpulkan mereka untuk mereka tetap mengusulkan untuk jadi PNS. Namun demikian kalau sudah di atas 35 tahun, sudah ada mekanismenya melalui P3K. Satgas 115 akan arahnya seperti apa tadi kami sudah jawab juga Pak Ono. Kira-kira gambarannya seperti itu.

Pak Daniel Johan tadi sudah saya jawab. Pak Ketua demikian jawaban dari kami memang tidak memuaskan tapi saya yakin kami akan lengkapi nanti dengan jawaban tertulis, kami akan berikan. Terima kasih. Demikian dari kami.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri ada satu hal. Saya lihat anggaran PSDKP ini kan 447 miliar. Kemudian ada lagi anggaran untuk Satgas 115, sedangkan Satgas 115 ini dibiayai oleh beberapa instansi baik itu KKP, Pertamina, angkatan laut, kepolisian, kejaksaan, Bakamla dan SKK Migas.

IRJEN KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF.S.H., M.M.):

Pak boleh bicara dulu Pak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Boleh silakan.

IRJEN KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.):

Kalau kita mau me realokasi anggaran yang 2019 ini, waktu kan sudah mepet Pak. Kami hanya takut tidak, lebih baik kami mengambil resiko.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini anggaran 2020 loh Pak.

IRJEN KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.):

Oh kalau 2020 bisa,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Saya kan sudah sampaikan ke Bapak, kami siap merubah yang mana Bapak mau

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sekarang mana yang lebih penting? Karena saya berharap inspektorat banyak memeriksa pejabat di dalam KKP sendiri yang melanggar aturan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Termasuk di daerah-daerah juga Pak. termasuk juga Bapak ke daerah kan kalau dengan 85 miliar kan gak mungkin Pak. Jadi tegakkan hukum Pak. tadi Pak Ono mau ngomong jadi?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya terima kasih Pak

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Anda datang baru setengah jam mau ngomong lagi.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pak Menteri terkait dengan perizinan Pak. saya itu mungkin orang yang dibenci lah di kalangan lingkungan KKP yang mengurus masalah perizinan karena ada beberapa waktu, saya nyamar. Saya pakai pakaian biasa tidak pakai jas seperti ini. Saya naik ke lantai 8 lantai 9. Saya lihat prosedurnya dan saya tahu dimana permasalahannya.

Yang kedua saya dibantu sama Pak Agus Suherman pada saat beliau menjadi Direktur Perizinan. saya hampir tiap hari ngantor di ruangan beliau, saya tidak nyalo Pak dan saya mencari solusi. Dan saat itu lantas juga saya ngomong ke Ibu Menteri jika Pak Agus ini memang ditugaskan secara khusus untuk membantu bagaimana terjadi percepatan. Pak coba bayangkan, sistem yang katanya *online* dibuka sistemnya tuh tidak ada data padahal yang dari bawah ini sudah me *upload*. Nah jadi sistem juga tidak belum sempurna.

Terus kadangkala saya dengan Pak Agus menginisiasi “sudah dipanggil saja pengusahanya, coba dijelaskan permasalahannya apaan? Kasubdit nya diundang” ya kan? Disitu tuh selesai tuh apa yang menjadi permasalahan mereka selesaikan. Sampai saya turun ke bawah, saya ketemu beberapa dari mereka yang saya ini lagi merokok, mereka tiba-tiba rombongan, ya mungkin dari perizinan datang terburu-buru masuk,

mereka ngomong dengan sangat kencang “ini gara-gara si Ono nih, kita jadi repot kaya gini” itu saya alami betul bagaimana sulitnya mengurus perizinan di KKP. Nah sehingga pada saat tadi Pak Menteri menjawab nih, tidak memuaskan saya. Jadi walaupun mau menyelesaikan, Pak Menteri tugaskan tuh Pak Zulficar, undang tuh semuanya yang saat ini masih merasa belum keluar tuh izinnya. Jangan dibiarkan. Akrena orang ketemu Zulficar saja susah. Saya WA ke beliau saja gak dijawab apalagi rakyat kan. Nah walaupun Pak Zulficar tidak bisa tugaskan siapa lah.

Besok nih, saya seizin Ketua Komisi yang selalu kami ini di WA, di telepon, izinnya belum keluar, kita perintahkan mereka ketemu siapapun yang diperintahkan Pak Menteri sekarang. Besok mereka suruh ke Jakarta. Nah sehingga selesai nih tanpa akan merubah sistem lebih baik apa segala macam, *bullshit* lah. Nah jadi mohon penugasan segera tuh ke Dirjen atau siapapun. Jadi saya tahu nih karakter Bu Erni siapa, dimana Bu Erni, saya tahu Cakmuh bagaimana, Budi seperti apa. Yang disana ada “wah yang menghambat ini Dodi” Dodi siapa saya juga gak kenal. Ada yang botak-botak, gak tahu juga, Dodi botak itu siapa. Itu yang menghambat katanya. Yang sangat membantu siapa? Oh Cakmuh yang selalu komunikatif kalau WA dijawab. Ibu Erni, oh galak kalau Bu Erni. Jadi saya tahu karakter yang mengurus perizinan dari rakyat. Pak Zulficar, wah susah Pak ke Pak Zulficar. Kalau Pak Agus, ah ini Pak Agus sangat populis ya, Pak Agus Herman di kalangan nelayan0.

Nah yang kedua terkait dengan masalah tadi PerMen-PerMen tadi. Kemarin walaupun saya tidak hadir tapi saya utus orang lah untuk hadir, hari Senin. Karena bentrok dengan Raker MenPAN. Disana terjadi rebut hanya gara-gara gambar cantrang yang tidak sesuai dengan pemilik cantrang nya. Nah sehingga paling tidak Pak Menteri ini harus membuka. Cantrang itu..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Ono, agak cepat dikit karena nanti sudah mau magrib.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Azan nanti *break* dulu kan Pak?

Nah ini supaya tuntas Pak. Karena ketemu Pak Menteri nih lama lagi. Nah terkait dengan masalah PerMen mohon semuanya diundang. Kalau saya sih pernah merekomendasikan ke Ibu Menteri dilakukan kajian komprehensif. Buka hanya dari satu aspek saja. Ada aspek lingkungannya, ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, semuanya. Dan kajian itu yang akan menjadi dasar. Karena tidak akan semua cantrang kalau pun diizinkan, ada juga yang menolak. Di Sumatera Utara itu sapai bakar-bakar kapal. Di

Lampung juga sama. Di tempat saya bukan cantrang tapi arak, galok, kapolo, mereka juga konflik antar sesama Nah sehingga bicara terkait dengan merevisi itu perlu tuh dilakukan kajian komprehensif. Mereka dilibatkan, 2 pihak berseteru itu pun dilibatkan.

Yang terakhir terkait dengan, oh cukup Pak. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Agus tadi mau ngomong? 1 menit ya Pak.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri.

Saya menyampaikan 4 hal saja, karena waktu satu menit. Yang pertama Pak. Bali seperti apa yang Bapak ketahui adalah daerah pesisir, jadi mohon bantuan untuk kelompok nelayan ditingkatkan Pak. Jadi seperti kemarin kita mohon 8 baru dikasih 1 Pak. Kami mohon bantuannya ya terutama terkait dengan mesin tempel dan perahu. Dan juga perlu dipikirkan, di Bali ini sekarang yang peralihan nelayan tangkap ke nelayan pariwisata Pak. Ini belum kita sentuh. Jadi perlu bantuan, disana perlu kita pikirkan untuk perahu bagan *boat*. Ini sangat menunjang kegiatan pariwisata.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Glass Bottom Boat.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Iya, *Glass Bottom Boat.*

Yang kedua tentang abrasi Pak. Sekarang yang di Klungkung, tanah sertifikatnya ada 1 hektar Pak, tapi tanahnya sudah tidak ada. Nah perlu sekitarnya antara KKP dan Menteri Pekerjaan Umum ada satu pembicaraan khusus tentang penanganan-penanganan ini. Di Jembrana, Pak Tio saya ajak lihat kemarin sampai sekarang masih terputus Pak, gak punya jalan. Nah ini perlu, mungkin perlu kita anggarkan atau sediakan anggaran cadangan bencana.

Terus yang ketiga, tadi Pak Ono juga sudah nyinggung PerMen. Jadi tentang PerMen 51 Pak, tentang lobster. Jadi kalau dulu di Bali itu lobster pasir nah ini harganya sampai 450 ribu. Kalau sekarang dijual 50 ribu gak ada yang mau beli Pak. Nah ini karena apa? Karena takut ditangkapi Pak.

Nah sekarang bagaimana kira-kira solusinya dan nelayan kita sudah gak punya pekerjaan di Pantai Soka, ini hasil saya kemarin.

Dan yang terakhir ini, saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri berita yang Bapak sampaikan barusan yang saya baca mudah-mudahan ini hoaks aja. Tentang reklamasi teluk Benoa. Katanya yang saya baca beritanya Bapak akan lanjutkan reklamasi itu, apa benar? Nah kalau mudah-mudahan salah, tapi kalau ada.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Adhi. Teluk Benoa atau Tanjung Benoa?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Maaf, Tanjung Benoa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya lebih tau dari dia kalau Bahasa.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Nah ini bukan, teluk Pak. Teluk Benoa nih Pak. Jadi saya bingung jadinya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang pelabuhan?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Bukan,bukan. Ini yang reklamasi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau yang reklamasi Tanjung Benoa Pak. Yang di ujung dekat Nusa Dua.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Itu Tanjung Benoa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Ini Teluk Benoa Pak. Di Nusa Dua itu ada 2 Pak ada Tanjung Benoa, ada Teluk Benoa. Kalau Tanjung Benoa itu Nusa Dua yang ke utara. Ini Teluk Benoa Pak. Teluk Benoa itu daerahnya disana juga, tapi ini teluknya Pak yang masyarakat Bali menolak dilaksanakan reklamasi. Jadi Pak Sudin gak jadi lebih tahu dari saya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Gini Pak, kalau yang Bapak maksud itu, itu yang kalau pada saat surut itu kan penuh lumpur, gitu kan? Itu kan jatohnya yang belakangnya Novotel yang sebelah sini bukan Novotel sebelah kanan. Iya kan?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Daerahnya Tanjung Benoa tapi yang dipermasalahkan Teluk Benoa Pak. Jadi ini, jadi ya Pak Menteri cuman baca berita, baca di *online*, apa benar? Sya berharap janganlah sampai dilaksanakan lagi kalau Teluk Benoa ini. Ini akan lagi memicu permasalahan. Kemarin sudah agak reda Pak, dengan dikembalikannya area itu menjadi daerah konservasi. Nah walaupun konserver dikembalikan sebagai daerah konservasi, namun ada PerPres yang gantung disitu. Memang sih ini dilemma juga. Namun dengan dikembalikan menjadi daerah konservasi, ini sudah memberikan kesejukan bagi masyarakat Bali.

Jadi mohon kepada Pak Menteri, jangan diteruskan itu karena ini aspirasi dari masyarakat Bali. Kalau memang ada keinginan begitu, mari kita turun sama-sama, masyarakat adat. Kalau disana ada 5 pura, kalau reklamasi ini dilaksanakan, disana ada simbol 5 pura yang akan terhanggu. Ini lah yang menjadi kecemasan dari masyarakat Bali itu sendiri. Sekian kira-kira Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri mau langsung dijawab? Supaya polemiknya jagan berlangsung.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Yang Teluk Benoa saya tidak pernah beri komentar tentang itu. Memang banyak yang nanya tapi saya gak tidak ada upaya melanjutkan ya. Kita belum tahu ke arah sana. Karena kebijakan yang di depan mata saja masih banyak yang harus saya bereskan.

Kedua, masalah lobster tadi itu juga termasuk tadi juga termasuk bagian daripada yang segera kita tuntaskan Pak. Kalau Teluk Benoa tidak ada pernyataan saya untuk melakukan lanjutan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Menteri nanti apabila ada pejabat yang ke Bali, tolong ditengok disitu, Teluk Benoa itu ada reklamasi. Waktu itu mungkin Pak Menteri tidak ikut ke Bali, jadi kami tanyakan tumpukan tanah itu yang kalau dari jalan tol keluar ada sebelah kanan posisinya ya, itu kami tanyakan “ini kenapa tidak dibuang?” mereka mengatakan tidak boleh oleh Kementerian Keuangan karena hasil dari pengerukan. Pendalaman alur. Tetapi infonya sampai hari ini sudah rata menjadi reklamasi. Betul gak Pak Tio? Tolong dijelaskan.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Bapa, di Teluk Benoa ada beberapa alokasi ruang. Di luar KKP itu ada alokasi ruang BLKM BLKP yang izinnya diberikan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yang izinnya diberikan oleh Kementerian Perhubungan Bapak. Yang Bapak sampaikan tadi adalah untuk reklamasi Pelindo Pak. Terima kasih

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Betul. Tapi waktu kami kunjungan kerja ke sana, kami tanyakan, itu bukan untuk reklamasi. Itu tidak dimanfaatkan tetapi tidak boleh dibuang. Karena apa? Karena itu harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Sama dengan kasusnya tadi, kapal sitaan.

DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Kami akan koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya karena waktu itu saya 2 kali kesana.

Pak Menteri saya minta kepada bagian perizinan yang sudah membayar PHP sudah dianggaap *clear* kecuali belum. Dan saya minta secepatnya diberikan info kepada Komisi IV. Berapa banyak yang belum selesai perizinannya, belum dikeluarkan. Karena kalau perizinan ini tidak

dikeluarkan kasihan nanti Pak Menteri ngomong 8 juta ton, 9 juta ton, itu omong kosong. Ya Pak Menteri?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ketua?

Mohon Pak Menteri langsung menanggapi langkah apa yang harus dilakukan. Saya cuman usulan, misalnya gini, dibutlah misalnya tempat pengaduan supaya Pak Menteri tahu. Tidak hanya dari 1 pihak. Diumumkan semua. Pusat perizinan pengaduan kapal. Karena ada yang sudah 3 bulan di cetak kalau di *online* nya tuh sudah tercetak tapi belum ditandatangani. Mungkin di meja Pak Zulficar juga gak ada mungkin. Jadi coba dibuatlah terobosannya gitu. Misalnya pusat pengaduan, diumumkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Gini saja Pak. Daripada susah kan, kita belum jelas siapa orang yang bermasalah yang akan menunggu izin itu. Pak Ono saya pikir punya data, saya minta yang selama ini mungkin Pak Ono lihat. Baru kita bisa eksekusi Pak. Karena yang kita tahan juga, saya yakin ada yang juga bermasalah. Ini juga perlu kita cek dengan baik Pak Ketua. Secara prinsip izin-izin yang sudah siap saya sudah perintahkan untuk segera dikeluarkan.

Kemarin sudah ada hampir 500 izin yang sudah kita keluarkan. Mungkin masih tersisa kalau Pak Ono punya data mohon disampaikan. Kami siap akan keluarkan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kemarin tuh kapan Pak Menteri? Setahu saya Pak Menteri waktu memanggil pengusaha perikanan sambal marah-marah baru keluar, itu pun terpaksa keluarnya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Marah-marah? Saya gak ada marah-marah Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Marah-marah ama Dirjennya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Gak ada Pak. Gak ada yang dimarah-marahin. Kemarin langsung serahkan izin. Ada berapa Pak? 407 pagi, sisanya berapa? Sisanya 35. Ada Pak. Gak ada Pak, Bapak silakan cek. Nah ini kalau ternyata ada yang menggantung-gantung mohon kasih daftarnya ke kita. Gak usah pakai *call center* karena kalau *call center* itu sudah ada. Nah sekarang kalau memang ada, dimana izinnya kami keluarkan segera. Selama itu sesuai dengan ketentuan. Terima kasih Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Diserahkan sama siapa nanti Pak?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Kalau Bapak gak percaya sama yang lain, serahkan ke saya saja Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Di rumah Kalibata apa di Widya Candra Pak?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Enaknya Bapak dimana, saya tunggu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Ono waktunya sudah habis, lebih baik kita ambil kesimpulan Pak Menteri. Pak Menteri sudah siap kita ambil kesimpulan? Biar segera kita bisa tampilkan.

Kesimpulan keputusan nomor 1: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan atas evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I tahun 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Anggota setuju? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Kedua, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.328.029.549.473 atau sebesar 78,61% per 18 November 2019. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaran. Anggota? Pak Menteri? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Ketiga, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 6.448.61.749.000. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendalaman lebih detil terkait rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota? Pak Menteri? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan Pemerintah tahun anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kearifan lokal serta mempublikasikan petunjuk teknis di *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segala sesuai persyaratan yang ada dapat dipersiapkan sejak dini oleh masyarakat. Anggota? Pak Menteri? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Kelima, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penyelesaian segala bentuk perizinan kapal yang masih terhambat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota? Pak Menteri? Setuju Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Keenam, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Perhubungan dan Ketenagakerjaan dalam melindungi awak kapal, anak buah kapal, yang diperlakukan secara tidak adil baik sistem penggajian maupun sistem fasilitasnya dengan pendampingan khusus agar kehadiran negara sejalan dengan hak asasi manusia. Anggota? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Ketujuh, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan pencemaran laut yang terjadi di perairan Indonesia akibat sampah, limbah plastik, dan tumpahan minyak. Anggota? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pakai *mic* Bu.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

ya, siap.

Untuk yang poin 7 sebenarnya kan masalahnya bukan sampah limbah plastik. Kalau mau semua ya ditambahkan misalnya akibat dari sampah limbah plastik, pertambangan, dan juga limbah B3, dan tumpahan minyak. B3-nya dimasukkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pertambangan , limbah B3, dan tumpahan minyak.
Pak Menteri setuju?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M.,
M.B.A.):**

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Kedelapan, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi terhadap semua peraturan Menteri, PerMen KP yang berpolemik di masyarakat agar iklim usaha kelautan dan perikanan tumbuh maju dan kondusif. Anggota? Pak Menteri?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M.,
M.B.A.):**

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Sembilan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meindaklanjuti kapal-kapal hasil IUU *Fishing* yang telah memiliki kekuatan hukum yang keputusannya dirampas untuk negara agar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti: Lembaga Pendidikan, koperasi, badan hukum yang memiliki kopetensi diri dan usaha penangkapan ikan. Anggota? Setuju Pak Menteri?

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M.,
M.B.A.):**

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya kalau Pak Menteri gak setuju ya susah juga nantinya.

(RAPAT: SETUJU)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Bapak kan belum nanya saja, jadi saya tunggu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sepuluh, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait untuk melakukan pengembangan sentra kelautan perikanan atau program unggulan yang menjadi prioritas di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian ekspor demi kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Anggota?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua.

Ikan dan udang Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak, budidaya ikan itu termasuk udang dan lain-lain Pak. Yang gak masuk disitu cuman budidaya monyet Pak. Anggota setuju? Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah setuju semua, tolong di *print*.

(RAPAT: SETUJU)

Yang wisata tadi belum. Jadi kan daerah pesisir itu sebagai salah satu alternatif destinasi wisata sehingga kita bisa mendapatkan jasa lingkungan. Iuran jasa lingkungan disitu banyak untuk pendapatan negara. Ini Pak Johan, yang terkait melakukan pengembangan sentra kelautan itu termasuk jasa lingkungan, wisata, dan lain-lain. Cuman ini secara global atau garis besar.

PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya ketok lagi ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih kepada saudara Menteri yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum acara ini kita akhiri, kami bacakan eh..demikian kesimpulan rapat ini. Mohon tanggapan dari Pak Menteri sebelum ditutup.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, S.E., M.M., M.B.A.):

Baik.

Pak Ketua, Para Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPR RI Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya, *support* nya. Mudah-mudahan rapat hari ini semakin menguatkan kami dalam mengembangkan tugas negara dalam menjaga laut Indonesia, nelayan kita, para pelaku usaha, pembudidaya, para pelaku usaha di sector bisnis kelautan dan perikanan. Dan kita berharap Komisi IV tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami dan jangan pernah ragu dengan KKP bahwa KKP selalu menganggap orang tuanya adalah Komisi IV.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi masih ada utang sedikit Pak Menteri. Yang pertama mengenai, saya waktu itu rapat dengan Pak Sekjen mengenai PerMen. Kami minta segera disiapkan. Kedua, permintaan Pak Daniel perihal jenis impor dan kapal-kapal yang disita. Yang ketiga, tolong segera juga sampaikan perizinan kapal yang masih tertunda, apa masalahnya? Saya sudah beberapa kali ingatkan disini ya. Apabila kurang berkasnya, kembalikan saja, jangan terima PHP nya. Terima kasih. Demikian.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan, sebelum ditutup. Sedikit saja.

Saya menepati janji Pak Menteri lah karena sahabat jadi selesai jam 6. Menteri Pertanian jam 9 malam, Menteri Lingkungan Hidup kehutanan jam 10 malam. Tapi mohon yang tadi menjadi kesimpulan dan apa yang menjadi hasil dari rapat kita ini ditindaklanjuti. Kalau tidak, kita bikin Raker sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Atas nama Pimpinan dan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabil alamin*. Rapat Kerja ini kami tutup. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00)

Jakarta, 20 November 2019

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001